



# **EKONOMI KERAKYATAN**

## **DALAM DISKUSI DUA GENERASI**



**DR. H. Erman Munzir, Ph.D.**  
**Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.**





# **EKONOMI KERAKYATAN DALAM DISKUSI DUA GENERASI**

**DR. H. Erman Munzir, Ph.D.  
Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.**

SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2020

**EKONOMI KERAKYATAN  
DALAM DISKUSI DUA GENERASI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
*All rights reserved*

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
xii + 136 hlm.,; 16 x 24 cm

ISBN 978-623-94259-3-7

Cetakan Pertama, November 2020

Penulis:

DR. H. Erman Munzir, Ph.D.

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.

Penyunting:

Muhammad Arief

Perancang Grafis - Tata letak:

Dito Sugito

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Tlp. 021-571 5697 Faks. 021-571 5421

Surel: bag\_penerbitan@dpr.go.id

# Serangkai kata buat Papa; DR. H. Erman Munzir, Ph. D.



**T**ERAS rumah papa menjadi salah satu saksi, ketika kita saling berbagi cerita dan berdiskusi tentang hidup, kerja keras dan sejahtera. Semua tentu tak terlepas dari perilaku ekonomi setiap manusia. Salah satu keprihatinan kita adalah ketika menyaksikan para pedagang sayur hingga pedagang asongan yang melintas dan menggelar dagangan di pojok jalan. “Mereka adalah pelaku ekonomi kerakyatan yang seharusnya bisa berkembang dan sejahtera,” ucap papa, ketika suatu hari kita memulai diskusi. Kemudian kita pun larut dalam diskusi, sesuai dengan ilmu dan pengalaman kita masing-masing.

Buku ini adalah buah pemikiran dalam beragam diskusi kita tentang Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Dan sesuai permintaan papa, agar hasil diskusi dan pemikiran kita bisa dijadikan sebuah buku yang bisa dipahami oleh lintas generasi dan beragam profesi. Mudah-mudahan suatu hari nanti semua ide dan pemikiran kita tentang ekonomi kerakyatan bagi bangsa ini bisa terwujud.

Semoga semua ilmu yang papa wariskan kepada kami, ilmu yang diterapkan di tempat mengabdikan dan ilmu yang ditularkan kepada murid-murid, menjadi amal jariah yang tak terputus hingga di hari penentuan nanti. Beristirahatlah dengan tenang. Kelak, Insya Allah kita akan bersua.

Ananda,

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.

Penulis





# Pengantar Kata

*As'salammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Politik dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kebijakan politik pemerintah (penguasa) tentu akan sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi yang terjadi. Demikian pula halnya Negara Indonesia. Dalam sejarah perjalanan bangsa ini, setiap keputusan politik akan terkait di dalamnya perkembangan perekonomian bangsa. Wabil khusus tentunya pelaku ekonomi. Selain sejarah tentang Ekonomi, buku ini coba mengupas lebih dalam keputusan-keputusan politik yang berdampak langsung terhadap pelaku ekonomi kerakyatan.

DR. H. Erman Munzir, Ph.D. dan Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. adalah dua tokoh dari generasi yang berbeda, berusaha menumpahkan hasil pemikiran dan ide-ide mereka dalam buku ini. Dua generasi yang merupakan ayah dan menantu ini mencoba menyatukan pemikiran, walau memiliki latar belakang profesi yang berbeda.

Sebagai seorang ekonom, DR. H. Erman Munzir adalah, MA, Ph.D pernah meniti karir di Bank Indonesia, kemudian juga menjadi seorang akademisi dengan membagikan ilmunya sebagai dosen di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Di usia pensiunnya, DR. Erman Munzir, MA, Ph.D, masih sering menulis dan tak sungkan berbagi ilmu kepada siapapun.

Sedangkan Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. adalah politisi yang sudah kenyang merasakan asam garam dalam berorganisasi, dan menyaksikan langsung kondisi pelaku ekonomi di kelas menengah ke bawah. Beragam pengalamannya berada di tengah rakyat yang juga mengantarnya menjadi wakil rakyat di DPR RI, hingga sekarang menjadi wakil ketua DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).

Karena kondisi kesehatan DR. H. Erman Munzir, Ph. D. yang kian menurun dan juga karena kesibukan Dr. H M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. sebagai wakil ketua DPR RI, beberapa percakapan dan diskusi kedua tokoh ini dilakukan melalui media elektronik.

Namun kondisi tersebut tidaklah mengurangi semangat kedua tokoh ini untuk tetap mewujudkan keinginan mereka menjadikannya sebagai tulisan yang berbentuk buku. Hingga Sabtu, 5 September 2020, Sang Khalik memanggil DR. H. Erman bin Munzir, Ph.D.

Buku ini merupakan sumbangan pemikiran yang terakhir dari beliau untuk generasi berikutnya sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang beliau miliki. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadahnya, dan mengampuni kesalahan dan kekurangannya. Amin.





# DR. H. Erman Munzir, Ph.D.

## “Kerja keras dan berbagi ilmu”



**WALAU** berasal dari keluarga yang jauh dari kata ‘berkecukupan’, Erman Munzir tetap bisa memiliki pendidikan yang baik, bekerja dan berkarir sebagai bankir hingga menularkan ilmu kepada para mahasiswanya di berbagai universitas. Bersama orang tua dan saudara-saudaranya, Erman tinggal di sebuah gubug kecil di pinggir kali. Bahkan akte kelahiran mereka hanya dituliskan di sebatang pohon tak jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi ini membuat orang tuanya ‘*hampir tidak mungkin*’ bisa membiayai sekolah anak-anaknya ke jenjang yang tinggi, termasuk Erman Munzir. Tetapi kondisi ini tak mematahkan semangat Erman. Justru membuatnya giat belajar dan bekerja keras. Ia bekerja keras agar tetap bisa mendapatkan pendidikan. Sebuah

kerja keras yang akhirnya memang membuahkan hasil, bahkan hingga menyelesaikan kuliah di Universitas Indonesia.

Tak cukup sampai disitu, bahkan setelah tamat dan mendapat gelar S1, ia tetap haus akan ilmu, khususnya di bidang ekonomi. Ia mendapat kesempatan untuk menambah ilmunya dengan mengambil S2 dan S3 di Amerika Serikat. Selama di Amerika, Erman Munzir tak hanya belajar, tapi juga bekerja untuk menambah penghasilan agar anak-anaknya dapat sekolah. Usai mendapatkan ilmu dari negeri Paman Sam tersebut, Erman mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya, menjadi karyawan Bank Indonesia. Setelah pensiun dari Bank Indonesia, Erman bekerja sebagai profesor di AIU, MMUI, Prasetya Mulia, dan sekarang di Universitas Esa Unggul. Sesuai dengan ilmunya, ia menularkan ilmu Ekonomi kepada mahasiswanya.

Sedari kecil Erman Munzir adalah seorang pekerja keras. Bahkan di usianya yang sudah berkepal tujuh, ia tetap aktif dalam mewariskan ilmunya. Ia tak pernah terlihat seperti orang yang lelah dan renta. Semangat yang selalu membuat iri kalangan muda; Bersemangat dan bekerja keras!

“Semangat dan kerja keras” kata-kata yang bagi sebagian orang hanya sebagai pemanis hidup saja. Bagi Erman Munzir, kedua kata ini sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Bukan lagi sebagai kata-kata motivasi. “*Ingin berhasil? Ya harus kerja keras,*” tegasnya. Dan hingga akhir hayatnya, Erman Munzir sudah mencontohkannya.



## Intisari Buku

**B**AB I menjelaskan bahwa perekonomian timbul karena ada manusia, sebab mereka punya *demand* dan *supply* untuk hidup, sehingga timbul transaksi-transaksi ekonomi. Untuk itu, mereka dianugerahi oleh Allah SWT sumber daya alam, sumber daya manusia dan enterprenur, serta barang modal K dan teknologi hasil penggunaan kepandaian dan pikiran dari Allah SWT.

Perekonomian yang timbul, baik kekuasaan di bawah kerajaan dan atau koloni sebelum ada negara dan sejak negara lahir. Contoh, perekonomian timbul dan di bawah kerajaan tanpa koloni dan tanpa negara adalah Inggris, kemudian berada di bawah kerajaan dan negara. Contoh, perekonomian timbul dan di bawah kerajaan dan koloni adalah Malaysia, kemudian berada di bawah kerajaan dan negara. Indonesia, contoh untuk perekonomian yang timbul di bawah koloni (Belanda) saja, kemudian di bawah negara, demikian juga Amerika Serikat sebelum jadi negara berada di bawah koloni Inggris.

Bab II menyatakan bahwa negara ada setelah ada perekonomian, bukan sebaliknya. Negara ada setelah kekuasaan di bawah koloni, seperti Indonesia di dalam kekuasaan kolonial Belanda dan Amerika Serikat di bawah koloni Inggris. Atau negara ada setelah dikuasai kerajaan, seperti Inggris dan Malaysia, serta juga Indonesia.

Bab III adalah tentang gambaran perekonomian atau ekonomi makro suatu negara.

Bab IV mengenai pemahaman tentang sistem politik dan sistem ekonomi.

Bab V mengenai rangkuman sejarah suasana politik dan ekonomi, termasuk sistemnya di Indonesia sejak kemerdekaan pada 17 agustus 1945 hingga sekarang.

Bab VI tentang sejarah suasana dan sistem politik dan ekonomi di Indonesia selama masa pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945- 1949.

Bab VII mengenai sistem politik dan sistem ekonomi di Indonesia: sejarah pemerintahan parlementer selama masa tahun 1950- 1959

- Bab VIII merupakan pandangan Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. tentang Ekonomi Kerakyatan, yang seharusnya bisa menjadi kekuatan perekonomian bagi rakyat Indonesia sesuai amanah pasal 33 UUD 1945.
- Bab IX berisi tentang strategi dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi wabah Covid-19 pada tahun 2020 yang melumpuhkan banyak sendi-sendi perekonomian di Indonesia.
- Bab X berisi kesimpulan diskusi dari dua generasi yang menjadi isi buku

Serangkai kata buat Papa **v**

Kata Pengantar **vii**

Hidup untuk berbagi ilmu **ix**  
Biografi singkat Drs. Erman Munzir, MA, Ph.D

Intisari buku **xv**

**BAB I 1**  
**Manusia dan Perekonomian**

**BAB II 11**  
**Manusia dan Negara**

**BAB III 21**  
**Gambaran Perekonomian atau Ekonomi Makro Suatu Negara**

**BAB IV 41**  
**Sistim Politik Demokrasi dan Non Demokrasi serta Sistim Ekonomi Masing-masing**

**BAB V 59**  
**Suasana Politik dan Ekonomi serta Sistimnya di Indonesia sejak Kemerdekaan**

**BAB VI 77**  
**Suasana dan Sistim Politik dan Ekonomi di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 - 1949**

**BAB VII 93**  
**Sistim Politik dan Ekonomi Indonesia pada pemerintahan Parlementer (1950 - 1959)**

**BAB VIII 107**  
**Ekonomi Kerakyatan dalam pandangan  
Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H**

**BAB IX 119**  
**Dampak Covid-19 dan perekonomian di Indonesia**

**BAB X 129**  
**Kesimpulan Diskusi Dua Generasi**

**Daftar Pustaka**





# BAB I

## MANUSIA DAN PEREKONOMIAN



DEVA.FAPERTA.UGM.AC.ID

### A. Perekonomian timbul karena hidup 1 manusia: Sebuah imajinasi

Anda lapar? Kalau sedang berada di suatu tempat di permukaan bumi ini, perut yang merengek tersebut akan membuat anda bertindak; Mencari makan! Bagi pekerja kantoran yang beraktivitas di pusat-pusat bisnis di berbagai kota di Indonesia, sederet pedagang makanan, mulai dari Warung Padang, Warung Tegal, Warung Sunda hingga restoran berbintang, sudah menanti dengan senyum manis. Atau paling tidak, bagi seorang karyawan rendahan yang berada di penghujung bulan, dengan sisa rupiah yang ada di kantongnya, juga akan berusaha mencari makanan sekedar pengganjal perutnya, walau hanya berupa sepotong gorengan dan segelas kopi keliling.

Pada zaman dahulu, kondisi perut yang lapar ini tentu akan mendorong manusia mencari makanan yang sudah disediakan oleh alam, seperti berburu atau mencari buah. Di zaman sekarang, jumlah manusia



yang semakin banyak dengan aktivitas yang beragam, kebutuhan makan sudah disediakan oleh manusia lain, sehingga terjadi tukar menukar kebutuhan.

Tindakan manusia yang berusaha memenuhi kebutuhan perutnya agar bisa bertahan hidup, secara alami sudah menghasilkan sebuah kegiatan perekonomian. Ada kebutuhan manusia dan ada manusia lain yang menyediakannya (*demand and supply*). Usaha mengisi perut adalah kebutuhan paling mendasar dari setiap manusia hidup di muka bumi, sehingga terjadilah tukar menukar barang dan jasa yang menyebabkan timbulnya perekonomian.

Bayangkan, jika saat ini seorang manusia hidup sendiri di muka bumi dan harus bertahan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar tadi; Makan! Mungkin bisa hidup, tapi hampir dipastikan tidak bisa berkembang, karena manusia juga butuh melakukan kegiatan lain untuk membedakannya dengan hewan. Karena bagi manusia, walau menjadi kebutuhan paling mendasar, tapi hidup bukanlah hanya untuk makan.

Allah SWT sudah menciptakan manusia dengan maha adil. Untuk bertahan dan bisa hidup, Sang Pencipta juga menghadirkan

manusia-manusia lain yang berbeda tapi saling melengkapi. Allah SWT membekali manusia tersebut dengan:

1. Memberi sumber daya (*resources*) atau disebut faktor produksi (*factors of production*). Selain itu, manusia tersebut juga diberi pikiran dan kepandaian. Semua pemberian itu dimaksudkan agar manusia mampu melakukan produksi barang (*tangible goods*) dan jasa (*intangible goods*), termasuk memproduksi barang modal dan membuat teknologi untuk melakukan kegiatan produksi.
2. Menjadikan manusia mempunyai permintaan (*demand*) terhadap barang (*tangible goods*) dan jasa (*intangible goods*), karena manusia harus hidup. Dari hasil produksi, dia memiliki persediaan (*supply*) sehingga mampu memenuhi *demand*.

**Produksi Barang dan Jasa.** Untuk tercipta *supply*, manusia harus melakukan produksi barang dan jasa, dengan menggunakan *resources* atau faktor produksi dan teknologi produksi yang dimiliki. Ada 4 faktor produksi, terdiri dari:

1. Sumber daya alam (SDA) yaitu semua yang ada di alam dunia baik di dalam maupun di atas bumi, dengan inisial N (*natural resources*),
2. Sumber daya manusia (SDM) yaitu berupa tenaga kerja, dengan inisial L (*labors*),
3. Sumber daya manusia (SDM) sebagai enterprenur (*entrepreneurs*) yang mempunyai kemampuan hasil dari penggunaan kerja pikiran dan kepandaian yang dimiliki. Karena sama-sama manusia juga diberi inisial L (*labors*),
4. Barang modal buatan manusia hasil dari penggunaan kerja pikiran dan kepandaian, diberi inisial K (*capital*).

Jadi terdapat 4 faktor produksi untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, terdiri dari N, L, L, K. Biasanya dalam ilmu ekonomi 2 L itu digabung jadi 1 L secara keseluruhan, sehingga faktor produksi menjadi 3 yaitu N, L dan K. Selain itu, karena manusia juga punya pikiran dan kepandaian, akan membuatnya mampu membuat teknologi produksi, dalam ilmu ekonomi sering diberi inisial dengan f.

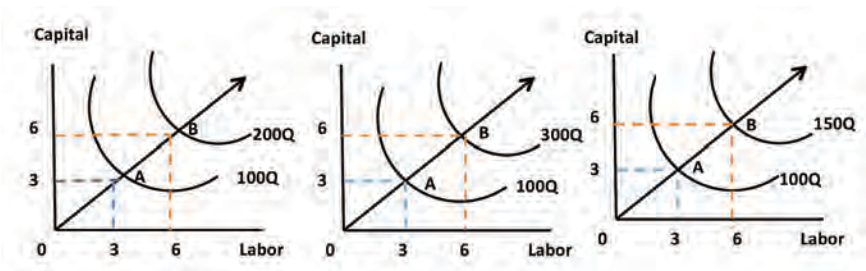
## B. Fungsi Produksi

Selanjutnya, 1 manusia itu dengan menggunakan teknologi  $f$  yang sangat sederhana tentunya, menggabungkan 3 faktor produksi  $N, L, K$ . Upaya manusia ini dimaksudkan untuk memproduksi satu atau setiap barang atau jasa yang diperlukan untuk hidup, biasanya diberi inisial  $Q_j$ . Semua 4 faktor  $N, K, L$  dan  $f$  menjadi penentu terlaksana produksi barang atau jasa, disebut *four wheels* oleh Professor Paul Samuelson ahli ekonomi pemenang nobel dari *Massachusetts Institute Technology* (M.I.T.) di Boston, Massachusetts.

Dalam ilmu ekonomi penggabungan *four wheels* itu ditulis dalam bentuk fungsi produksi satu jenis barang atau jasa, yaitu  $Q_j = f(N, K, L)$ . Tetapi dalam ilmu ekonomi mikro (*microeconomics*)  $N$  tidak diikutkan dalam analisa, karena nilai tambah sumber daya alam  $N$  diubah oleh 3 faktor yaitu  $f, K$  dan  $L$ . Sebagai contoh, fungsi produksi Cobb-Douglass (*the Cobb-Douglas production function*)  $Q_j = AK^aL^b$  dimana  $A$  merepresentasikan teknologi  $f$ .

**Gambar 1** di bawah menunjukkan fungsi produksi tersebut dalam bentuk *Isoquant*, dalam 2 dimensi dengan sumbu horizontal untuk faktor produksi  $L$ , sumbu vertical untuk faktor produksi  $K$ . *Isoquant* menyatakan tingkat produksi ( $Q_j$ ) satu barang atau jasa, serta akan meningkat dengan pertambahan atau pengurangan  $K$  dengan pangkat  $a$  dan pertambahan atau penurunan  $L$  dengan pangkat  $b$ , atau salah satu dari perubahan  $K$  atau  $L$ . Apabila  $a = \frac{1}{2} = b$ ,  $a + b = 1$ , maka fungsi produksi bercirikan the constant return to scale. Artinya, jika  $K$  dan  $L$  ditingkatkan dobel, maka  $Q_j$  juga akan bertambah dobel.

**Gambar 1**  
**Isoquants and Returns to Scale**





Apabila skala (*scale*) dari faktor K dan L dinaikkan 2 kali, maka apakah akan menyebabkan Q (*output*) :

- 1). Naik 2 kali : berarti fungsi produksi bersifat *Constant Returns to Scale* (CRS), atau;
- 2). Naik lebih dari 2 kali : berarti fungsi produksi bersifat *Increasing Returns to Scale* (IRS), atau;
- 3). Naik kurang dari 2 kali: berarti fungsi produksi bersifat *Decreasing Returns to Scale* (DRS).

Bentuk fungsi produksi  $Q = f(K,L)$  adalah *the Cobb-Douglas production function*, yaitu

$Q_1 = AK^aL^b$  . Apabila K dan L didobel, maka menjadi :

$Q_2 = 2^{(a+b)}Q = A(2K)^a(2L)^b = 2^{(a+b)}AK^aL^b$ ; sehingga apabila (lihat Gambar 1):

- $(a + b) = 1$ , maka Q naik 2 kali ( $Q_2=2Q_1$ ;  $Q_2/Q_1 = OB/OA$ ), berarti CRS;
- $(a + b) > 1$ , maka Q naik  $> 2$  kali ( $Q_2>2Q_1$ ;  $Q_2/Q_1>OB/OA$ ), berarti IRS;
- $(a + b) < 1$ , maka Q naik  $< 2$  kali ( $Q_2<2Q_1$ ;  $Q_2/Q_1<OB/OA$ ), berarti DRS.

### C. Terciptanya Transaksi Dan Perekonomian

Jika ada 1 individu manusia yang memiliki kebutuhan, maka terdapat hanya 1 *demand* dan 1 *supply* untuk setiap atau satu jenis barang dan jasa. Dengan kata lain, pasar untuk setiap jenis barang dan jasa terjadi hanya pada diri 1 manusia, jadi tidak ada pasar secara nyata. Namun, pertemuan *demand* dan *supply* pada dirinya sendiri itu menciptakan transaksi jual beli barang dan jasa. Harga yang terkandung pada tiap transaksi adalah nilai riil dari jerih payah dan waktu yang dia keluarkan untuk melakukan produksi dan membuat *supply*, atau disebut produktivitas dalam jumlah barang dan jasa yang dia hasilkan.

Dengan demikian, hakikat kehadiran dari manusia di dunia menyebabkan terciptanya suatu perekonomian dan timbulnya transaksi-transaksi jual beli serta kontrak ekonomis lainnya. Dalam hal ini, tentu perekonomian yang tercipta dalam bentuk sangat sederhana. Sebab hanya 1 manusia yang menyediakan *supply* dan melakukan *demand* terhadap barang dan jasa untuk kehidupannya.



Selain itu, 1 manusia tersebut dan perekonomian yang timbul tidak disebut bernegara, karena hidup hanya 1 manusia di dunia atau di suatu wilayah belahan dunia. Karenanya, dalam perekonomian tersebut tidak terdapat sistem ekonomi dan sistem politik. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah karena ada 1 manusia, terdapat *demand* dan *supply*, kemudian transaksi, dan selanjutnya timbul suatu perekonomian dengan 2 sisi. Sisi barang dan jasa dan tenaga kerja pada sisi yang lain..

#### **D. Perekonomian Timbul Karena Hidup Sangat Banyak Manusia: Suatu Kenyataan**

Semakin banyak manusia, maka semakin banyak *demand* dan *supply*. Dalam kenyataan sebenarnya, banyaknya manusia yang hidup di setiap wilayah di berbagai di permukaan bumi, atau di setiap negara, akan banyak sekali menghasilkan transaksi sesuai *demand* dan *supply*. Seperti di China dan India yang mempunyai penduduk lebih dari 1 miliar jiwa. Atau sebuah negara yang terdiri dari sejumlah bagian berupa negara bagian (*states*) seperti di Amerika Serikat, atau berupa propinsi di Indonesia.

Dengan kehadiran banyak manusia, maka timbul banyak *demand* barang dan jasa dengan banyak jenis, macam dan jumlah. Akibatnya,

*supply* barang dan jasa juga berkembang pesat dalam jumlah, jenis dan macam, proporsional dengan perkembangan *demand*. Di zaman klasik hingga akhir tahun 1950an, berlaku pernyataan klasik “*supply creates its own demand*” atau “*demand* diciptakan oleh adanya *supply*”, serta adanya istilah yang menyebutkan “*banyak anak banyak rezeki*”. Sebuah istilah yang kala itu diyakini bahwa semakin banyak kehadiran manusia, otomatis akan menciptakan *supply* (rezeki). Jadi banyak manusia, banyak *supply*, banyak *demand*.

Tapi di zaman modern, suatu kecenderungan justru menyebutkan bahwa “*supply is created on the basis of the existence and emergence of demand*” atau “*supply* diciptakan oleh adanya *demand*. Karena itu, di zaman modern penelitian pasar (*market research*) dan pemasaran (*marketing*) menentukan terciptanya *demand* dan pasar untuk satu jenis produk barang atau jasa.

Timbul pasar, *the invisible hand mechanism of a market*. Setiap *demand* terhadap 1 barang atau jasa milik 1 manusia pembeli, disebut *demand* individu (*an individual demand*), berinisial **iD**. Semua iD datang dan kumpul di pasar, sehingga terdapat total iD atau *demand* pasar, diberi inisial **TiD**. Begitu juga, setiap *supply* akan 1 barang atau jasa oleh oleh 1 produsen atau penjual, disebut *supply* individu (*individual supply*), berinisial **iS**. Juga, semua iS dibawa atau diangkut dan kumpul di pasar, sehingga terdapat total iS atau *supply* pasar, diberi inisial **TiS**. Pasar untuk barang biasanya di suatu tempat, tetapi untuk jasa bisa di tempat tertentu dan tidak untuk sejumlah jasa tertentu.

Di pasar dari setiap jenis dan macam barang atau jasa, terjadi pertemuan dan interaksi semua *demand* dan semua *supply* yaitu TiD dengan TiS, sehingga tercipta transaksi jual beli. Transaksi itu melalui proses negosiasi atas dasar mekanisme pasar tanpa ada campur tangan (*the invisible hand mechanism of a market*) karena sepenuhnya berdasarkan hukum *demand* dan hukum *supply*. Proses itu berujung menghasilkan keseimbangan pasar (*a market equilibrium*) pada  $TiS = TiD$ . Keseimbangan itu menetapkan harga per unit pada jumlah jual beli yang terjadi di pasar atau  $TiS = TiD$ .

Dalam hal terjadi campur tangan atau gangguan terhadap perilaku *demand* dan *supply* serta pasar oleh pemerintah dan atau masyarakat, keseimbangan tidak akan terjadi. Situasi ini tidak akan menghasilkan harga pada keseimbangan pasar, bahkan menyatakan ketidak seimbangan, sehingga menimbulkan eksese kelebihan atau kekurangan *demand* dan *supply* (*an excess demand or an excess supply in a market*).

Hukum *demand* dan hukum *supply* di pasar untuk setiap barang atau jasa, sama sepenuhnya dengan hukum *demand* bagi 1 manusia pembeli atau konsumen, serta dengan hukum *supply* untuk 1 manusia penjual atau produsen. Juga demikian untuk bentuk kurva *demand* pasar dan *supply* pasar, sama sepenuhnya dengan bentuk kurva *demand* 1 manusia pembeli dan kurva *supply* bagi 1 penjual. Kesamaan ini terjadi karena  $TiD$  atau *demand* pasar adalah total dari semua  $iD$ , serta karena  $TiS$  atau *supply* pasar adalah total dari semua  $iS$ .

Hukum *demand* adalah harga rendah banyak *demand* atau beli (*lower price higher demand or buy*). Hukum *supply* adalah harga tinggi banyak *supply* atau jual (*higher price more supply or sale*). Semua ini dibahas dalam ilmu ekonomi mikro, yang biasanya paling tidak mencakup *theory of demand*, *theory of cost and supply*, *theory of market structure and theory of market*.

*Demand* individu ( $iD$ ) dan hukum *demand* dihasilkan oleh *theory of demand*, dengan metode optimisasi kepuasan konsumen (*consumer utility*) sebatas pendapatan konsumen (*consumer income*). *Supply* individu ( $iS$ ) diperoleh dari *theory of cost and supply*, dengan metode minimisasi total biaya produksi sebatas jumlah produksi 1 barang atau jasa. *Theory of market structure and theory of market* menetapkan hukum *supply* sesuai dengan arah positif dari biaya marginal (*marginal costs*,  $MC$ ).

## **E. Timbul Perekonomian Dan Sektor Ekonomi.**

Kesimpulan dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa karena terdapat banyak manusia, maka ada total *demand* ( $TiD$ ) atau *demand* pasar dan total *supply* ( $TiS$ ) atau *supply* pasar, banyak pasar dan transaksi, sehingga akhirnya timbul perekonomian. Dengan kata lain, banyak pasar

dan banyak transaksi atas semua barang dan jasa menciptakan suatu perekonomian.

Di awal muncul perekonomian hanya terdapat 2 sektor ekonomi. Sektor riil (*the real sector*) mencakup semua produksi, *supply* dan *demand*, serta kegiatan ekonomi lainnya untuk barang dan jasa. Di sektor tenaga kerja (*the labor sector*) atau SDM meliputi *supply* dan *demand* akan tenaga kerja (*labors*) dan enterprenur (*entrepreneurs*). Di bawah akan dikemukakan sektor ke 3 yang muncul setelah terbentuk negara dan terdapatnya penggunaan uang untuk setiap transaksi, simpan kekayaan serta investasi. Sektor ini disebut sektor moneter dan keuangan (*the monetary and finance sector, or, the financial sector*).

Jadi, setiap kebutuhan seorang manusia atau sekelompok manusia, sudah ada manusia lain yang siap menyediakannya. Tak perlu kuatir untuk mendapatkan sebuah kebutuhan, karena pasti ada manusia lain memikirkan, mengerjakan serta menyediakan kebutuhan tersebut sesuai kemampuan yang diberikan Sang Pencipta. Kebutuhan dan kemampuan yang diciptakan berbeda-beda. Sebuah proses dan kondisi yang dialami dan dijalani manusia sepanjang hidupnya. Semua titik temu antar manusia yang saling membutuhkan ini akan berujung pada timbulnya perekonomian dan memunculkan berbagai sektor ekonomi, sesuai kebutuhan manusia. Alhamdulillah, Allah SWT memang Maha Adil.





## BAB II

# MANUSIA DAN NEGARA



### **A. Terbentuk suatu negara atas perbedaan dan golongan dari banyak manusia.**

Matahari sedang berada di puncak kekuasaannya, ketika seorang pemuda tak mau tunduk dengan garangnya sang penguasa siang itu. Keringat yang mengalir diantara senyumnya, sudah membayangkan rupiah yang akan mengalir ke kantongnya. Kampungnya, sebuah desa di kawasan Cirebon, Jawa Barat, menjadi lokasi penggalian pasir. Hanya sedikit tempat yang tersisa untuk bisa dijadikan sawah. Bagi kelompok masyarakat yang turun temurun hidup dengan cara bertani, kondisi ini tidak bisa disebut 'menguntungkan'. Atau tidak bisa diandalkan untuk bertahan serta memenuhi hidup 'sebagai petani'.

Namun sejak kehadiran manusia yang semakin bertambah jumlahnya, kebutuhannya juga semakin tinggi. Seperti kebutuhan untuk



membangun dan memiliki rumah, membangun gedung, jalan, jembatan dan sebagainya semakin meningkat, maka pasir adalah kebutuhan utamanya. Kalau dulu hamparan lahan atau bukit-bukit berisi pasir lebih sering menjadi keluhan karena tak bisa ditanami, sekarang anugrah alam ini justru disyukuri.

Hal inilah yang membuat sang pemuda bekerja keras menggali pasir sebanyak mungkin, kemudian dikumpulkan oleh pedagangnya, karena meningkatnya pembangunan membuat kebutuhan pasir ikut terseret. Bahkan puluhan pemuda dari kampung lainnya juga berdatangan untuk menggali pasir di tempat ini. Pasir dari kampungnya ini.

Untuk kebutuhan pokok, ia cukup membeli beras yang didatangkan dari daerah tetangganya yang memang dikenal memiliki lahan yang subur dan cocok untuk bertanam padi. Dengan uang yang didapatkan dari menggali pasir, semua penggali pasir di kampungnya ini sudah pula memiliki *smartphone*, sebuah benda yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

Di tempat lain, ratusan buruh sebuah pabrik elektronik tampak sibuk merakit *smartphone* merek terkenal. Mereka menerima upah bulanan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Mulai dari beras dan lauk pauk yang didatangkan dari berbagai tempat, pakaian, kendaraan

hingga kebutuhan untuk membeli pasir, jika diantara para pekerja tersebut hendak membangun atau memperbaiki rumah.

*Smartphone* hasil kerja mereka juga beredar ke seluruh penjuru, termasuk yang digenggam oleh para penggali pasir untuk kebutuhan mereka berkomunikasi. Begitulah Allah SWT menciptakan kehidupan banyaknya manusia di berbagai tempat dengan kekayaan alam yang berbeda, membekali manusia dengan kepandaian dan rezeki yang berbeda. Saling melengkapi satu sama lainnya dalam sebuah aktivitas ekonomi.

Pada bagian B dalam Bab I, telah diungkapkan bahwa banyak manusia akan menimbulkan suatu perekonomian. Dimana, banyak manusia juga ditandai dengan perbedaan lokasi tempat tinggal menurut belahan dunia, seperti negara dan daerah. Tanda lainnya adalah banyaknya perbedaan bahasa antara tempat yang satu dengan tempat lainnya sesuai dengan bangsa, ras, suku, warna kulit. Perbedaan penting lainnya adalah keinginan, kepribadian, cara hidup dan berbagai perbedaan lainnya. Semua itu mengakibatkan hadirnya banyak golongan dengan berbagai keinginan dan ciri khas, sesuai dengan lokasi manusia itu berada.

Sebuah kenyataan adalah, banyaknya manusia yang terdiri dari berbagai golongan dan banyak preferensi kehidupan, lengkap dengan berbagai perbedaannya, ingin bersatu dan membentuk satu negara. Kenapa? Karena semua manusia yang berada di suatu wilayah tertentu di belahan dunia, ingin hidup bersama, meskipun terdapat perbedaan diantara mereka.

Tidak diketahui persis, tentang terbentuknya Benua Eropa Barat dan masing-masing negara anggotanya walaupun manusianya mempunyai ciri dan bentuk yang serupa. Contoh, negara Inggris (*United Kingdom*, disingkat UK) dan Jerman menjadi dua negara yang berbeda, barangkali hanya karena perbedaan bahasa dan ciri sosial serta perbedaan kecil lainnya. Juga tidak diketahui persis mengenai terbentuk negara-negara di belahan dunia. Seperti halnya negara-negara di Semenanjung Balkan yang berada di Eropa Timur.

Demikian juga dengan terbentuknya negara Amerika Serikat (*United States of America*, disingkat U.S.A), Soviet (*Union of Soviet Socialist Republics*, disingkat USSR), serta negara-negara Amerika Latin, negara-negara di Afrika dan Asia yang juga mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Selatan dan Asia Utara. Hingga tahun 2020, terdapat 193 negara di dunia berdasarkan jumlah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Angka ini belum termasuk negara-negara yang keberadaannya belum diakui walau sudah menyatakan kemerdekaannya.

Pada dasarnya, setiap negara tersebut memiliki ciri manusia yang pada dasarnya identik satu sama lain. Seperti terbentuk negara Indonesia dengan ciri dan postur manusia yang serupa. Namun begitu, kenapa Indonesia tidak bersatu dengan Malaysia, Singapura, Filipina, yang manusianya juga mempunyai ciri dan bentuk manusia yang sama.

Demikian juga dengan Amerika Serikat (USA) yang merupakan satu negara dan terdiri dari manusia berkulit Putih, Merah dan Hitam, serta merupakan satu kesatuan dari sejumlah wilayah yang disebut negara bagian (*states*). Konon kabarnya, pada awal terbentuk negara ini, diawali kumpulan manusia disebut koboi di U.S.A. bagian barat. Mereka adu jago untuk penguasaan manusia (SDM, faktor L) dan kekayaan alam (SDA, faktor N) serta barang modal dan kekayaan finansial (K) dan teknologi (f), untuk keperluan produksi dan jual beli barang dan jasa.

Begitu pula bagi berbagai negara di Eropa Barat, Amerika Latin, ternyata tidaklah menjadi satu, walaupun pada dasarnya manusia antar negara itu memiliki kesamaan, antara lain dalam hal ciri dan bentuk, serta warna kulit putih merah dan hitam. Kesamaan dan perbedaan juga terdapat diantara mereka dalam hal bahasa, seperti bahasa Inggris, Jerman, serta bahasa lainnya, serta bahasa latin di Amerika Latin.

Selanjutnya, di setiap negara juga terdapat perbedaan preferensi kehidupan dan lainnya. Walaupun di satu negara pada dasarnya terdapat ciri dan bentuk manusia serta bahasa yang sama, namun dalam negara terdapat perbedaan preferensi atau keinginan dan perbedaan falsafah dan politik.

Perbedaan seperti itu kadang juga menyebabkan ketegangan antar golongan di suatu negara, bahkan juga terhadap negara lain. Di beberapa



negara Arab seperti Suriah, Irak, terjadi pertentangan antar golongan dan bahkan terhadap negara lain. Misalnya ketika Irak berperang melawan Iran di era Presiden Saddam Husien, sebelum terjadinya invasi Amerika Serikat.

Karena perbedaan itu pula, di Negara Uni Soviet (USSR) terjadi pemisahan sejumlah wilayah tahun 1980an hingga 1990an. Negara besar ini terpecah menjadi beberapa negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Pemisahan itu menciptakan sejumlah negara baru, dengan ciri dan bentuk manusia yang pada dasarnya serupa. Di Amerika Latin juga banyak terjadi pertentangan antar golongan di dalam negeri.

Yang masih terus stabil walau terdapat sejumlah perbedaan adalah di negara U.S.A., China, negara-negara di Eropa Barat, Skandinavia, Balkan dan Asia. Khusus untuk Indonesia, kita harus bersyukur, meski terdapat sejumlah perbedaan, tapi berhasil menjadi satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang sudah berdaulat sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi menyatakan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semua itu, berkat para proklamator Indonesia yang dipimpin oleh dwitunggal Bung Karno dan Bung Hatta. Rasa Sukur itu harus direalisasikan oleh setiap warganegara Indonesia yang berkewajiban memelihara dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai catatan, di bumi Indonesia sebelum merdeka terbagi dalam kekuasaan sejumlah kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, selain sejumlah kerajaan kecil.

Sebelum kemerdekaan itu, bumi Indonesia dijajah oleh beberapa bangsa sehingga berada dalam penjajahan selama  $\pm 350$  tahun. Sama halnya dengan U.S.A, sebelum dilakukan *the declaration of independence*, bumi U.S.A. dikuasai kobo dan masing-masing golongan pendatang dari Eropa. Termasuk Inggris sebagai suatu kenyataan sebelum perang dunia pertama, paling tidak dikuasai oleh kerajaan. Demikian juga Jepang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan. Kedatangan manusia lain di Indonesia dari bumi belahan Eropa ini juga berdasarkan kebutuhan mereka sehari-hari. Posisi Indonesia yang berada di garis tropis permukaan bumi, menyediakan kebutuhan yang tak bisa mereka dapatkan di negara di Benua Eropa.



Namun terlepas dari latar belakang bagaimana terbentuknya suatu negara, terdapat suatu kesimpulan dan keniscayaan; Yaitu, ternyata terbentuknya suatu negara di dunia adalah karena hidup banyak manusia dengan disertai sejumlah ciri, perbedaan dan golongan. Semua manusia di dunia sangat ingin bersatu dalam suatu negara yang terbentuk berdasarkan masing-masing ciri, perasaan senasib, satu tujuan dan harapan walaupun ada perbedaan yang melekat pada setiap golongan.

Dalam setiap negara yang terbentuk itu, akan timbul perekonomian. Hal ini karena dalam suatu negara pasti hidup banyak manusia yang menyebabkan terciptanya banyak pasar dan memunculkan banyak transaksi. Semua berawal karena setiap insan manusia dalam hidup mempunyai *demand* dan *supply*. Selain itu, juga setiap negara sejak terbentuk memiliki 3 faktor produksi SDA (N) dan SDM (L), serta barang modal (K). Teknologi produksi f dan K dibuat oleh manusia sebab punya keahlian karena manusia dilengkapi dengan pikiran dan kepandaian. Untuk faktor yang tidak tersedia di negaranya, mereka akan mencarinya ke negara lain. Semua faktor produksi N, L, K dan teknologi itu diperlukan oleh manusia agar mampu memproduksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup.

Dengan terbentuknya suatu negara, walau penduduknya terbagi dalam berbagai golongan, dengan perbedaan dan ciri masing-masing, tetapi semuanya diikat oleh negara dalam kehidupan bersama dengan masing-masing ciri dan perbedaan yang melekat pada setiap golongan. Untuk itu manusia-manusia dalam satu negara memerlukan suatu sitem politik yang kemudian menentukan sistem ekonomi. Sebelum membahas 2 sistem tersebut, terlebih dahulu digambarkan seluk beluk suatu perekonomian atau ekonomi makro, karena telah terbentuknya suatu negara.

## **B. Perekonomian Di Bawah Kekuasaan Kerajaan Dan Atau Negara.**

Kebutuhan manusia antar wilayah atau antar negara bahkan antar benua yang memiliki potensi alam yang berbeda, telah menyebabkan timbulnya perekonomian. Artinya, perekonomian sudah



timbul di dunia sebelum terdapat atau berdirinya suatu negara. Berdirinya suatu negara didasarkan atas keinginan semua penduduk secara bersama dan keseluruhan, maupun karena merdeka dari penjajahan.

Fakta menyatakan, sebelum sebuah negara berdiri, perekonomian di dunia dikuasai oleh raja suatu kerajaan atau oleh sejumlah raja dari berbagai kerajaan. Juga terdapat perekonomian di bawah kekuasaan penjajahan oleh negara-negara tertentu. Seperti halnya perekonomian telah ada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris (Great Britain) sebelum keberadaan negara United Kingdom yang meliputi Inggris (England), Skotlandia dan Wales, serta Irlandia, di luar Irlandia Utara. Begitu pula, perekonomian telah ada di bawah sejumlah kerajaan di tanah negeri semanjung Melayu.

Setelah memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan Inggris, didirikan negara Malaya bersama dengan keberadaan sejumlah raja yang menguasai tanah Melayu sejak awal sebelum kemerdekaan. Nama negara

Malaya kemudian diganti dengan Malaysia. Thailand juga serupa dengan Malaysia, sejak awal dikuasai oleh kerajaan dan kemudian didirikan negara Thailand. Hal serupa juga terjadi di Jepang, yang memiliki perjalanan dan keberadaan perekonomian serupa dengan Malaysia.

Di Indonesia, perjalanan dan keberadaan perekonomian, awalnya dikuasai oleh sejumlah raja dari berbagai kerajaan. Kemudian bersama penjajahan Belanda, para raja juga mengatur dan menguasai perekonomian selama  $\pm 350$  tahun. Penguasaan perekonomian oleh penjajah ini berakhir dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian perekonomian berada di bawah kekuasaan negara Indonesia. Ketidakadilan yang dirasakan oleh manusia yang mendiami salah satu wilayah Asia Tenggara ini, berakibat terjadinya perlawanan yang berakhir dengan runtuhnya sistem penjajahan.

Hal yang sama dialami Amerika Serikat, perekonomian wilayah ini pada masa koloni Inggris, dikuasai oleh penjajah dan para pendatang dari berbagai negara Eropa. Setelah merdeka, perekonomian berada di bawah kekuasaan negara yang didirikan, dimulai dari saat *the declaration of independence*. Juga konon kabarnya, perekonomian ikut dikuasai oleh para koboi yang mengandalkan senjata api untuk berkuasa di daerah tertentu dengan diawasi oleh Sheriff sebagai pihak kepolisian negara.

Kenyataan tersebut menyimpulkan bahwa perekonomian tetap timbul dan terjadi baik setelah berdirinya suatu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar ketatanegaraan, atau sebelum terbentuknya suatu negara. Contoh, United Kingdom, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philippines, China.

Keberadaan suatu negara, walau dihuni oleh manusia dengan ciri dan latar belakang budaya yang berbeda akan membuat perekonomian menjadi lebih tertata dan lebih berkeadilan. Kondisi ini membuat manusia menjadi lebih puas dan akan terus bekerja keras untuk melengkapi semua kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk melengkapi semua kebutuhan inilah yang pada ujungnya akan meningkatkan aktivitas perekonomian, disebabkan karena meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dan usaha

memenuhinya sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan negara lengkap dengan segala undang-undang dan peraturan yang diberlakukan, membuat manusia yang menjadi penduduknya merasa terlindungi dalam semua aktivitas ekonominya. Termasuk para penggali pasir yang menggandalkan bahan galian yang sudah disediakan alam sebagai sumber perekonomiannya untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sebagai manusia.



# BAB III

## GAMBARAN PEREKONOMIAN ATAU EKONOMI MAKRO SUATU NEGARA



### A. Pendahuluan

Sebuah kapal kayu berukuran sedang tampak berlayar tenang menyusuri Sungai Lilin, yang sekarang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tujuan kapal ini adalah adalah sebuah dermaga kecil di Sungai Lilin. Kapal ini tampak penuh bermuatan peralatan rumah tangga. Mulai dari lemari pakaian dengan cermin yang masih mengkilap, kadang memantulkan cahaya matahari ke permukaan sungai, meja, kursi serta beberapa peralatan elektronik seperti radio



transistor, TV tabung hitam putih hingga peralatan dapur seperti periuk, kualiti, dandang hingga kompor minyak tanah. Semua tersusun rapi di bagian buritan kapal. Semua masih baru.

Pemilik kapal bukan sedang pindah rumah, atau mengantar seserahan bagi penganten baru. Mereka adalah para pedagang yang sudah puluhan tahun memanfaatkan aliran sungai ini untuk berdagang di dusun-dusun sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Selat Bangka ini. Siang itu, ketika hendak merapat ke dermaga, para penduduk yang hendak menukar hasil kebun sudah menunggu. Dari kejauhan mereka sudah memandangi-mandangi barang-barang yang tersusun rapi di bagian belakang kapal tersebut.

Tak lama kemudian terjadilah transaksi. Beberapa petani Getah tampak menawarkan deretan karet getah yang terapung dan terikat rapi di bibir sungai sambil mematut-matut barang yang mereka inginkan yang diatas kapal tersebut. Seorang petani menawarkan madu lebah untuk ditukar dengan radio transistor yang sudah lama diidamkannya. Dahulunya Sungai Lilin memang dikenal sebagai penghasil madu lebah hutan, karena nama Lilin sendiri artinya adalah sarang lebah.

Begitulah aktivitas ekonomi di daerah ini yang jamak terlihat pada tahun 1960an hingga tahun 1970an. Semua transaksi dilakukan secara barter atau tukar menukar barang. Walau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berdiri dan memiliki mata uang, tapi di wilayah tertentu, para pelaku ekonomi lebih suka menukarkan langsung hasil produksi mereka dengan barang yang mereka inginkan. *Demand* dari penduduk di dusun-dusun sepanjang aliran sungai ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang pengepul yang hilir mudik sepanjang sungai manyambangi dusun-dusun, menukar barang-barang dengan hasil kebun atau hasil hutan lainnya, kemudian akan menjualnya ke pedagang besar. Praktek perekonomian seperti ini mungkin sudah terjadi sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelumnya, sejak masa kerajaan atau masa penjajahan.

Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian timbul karena ada manusia di wilayah tertentu yang punya *demand* dan *supply*

terhadap barang dan jasa untuk hidup di muka bumi ini. Kenyataan itu menyebabkan timbul transaksi-transaksi ekonomi, sehingga timbul perekonomian.

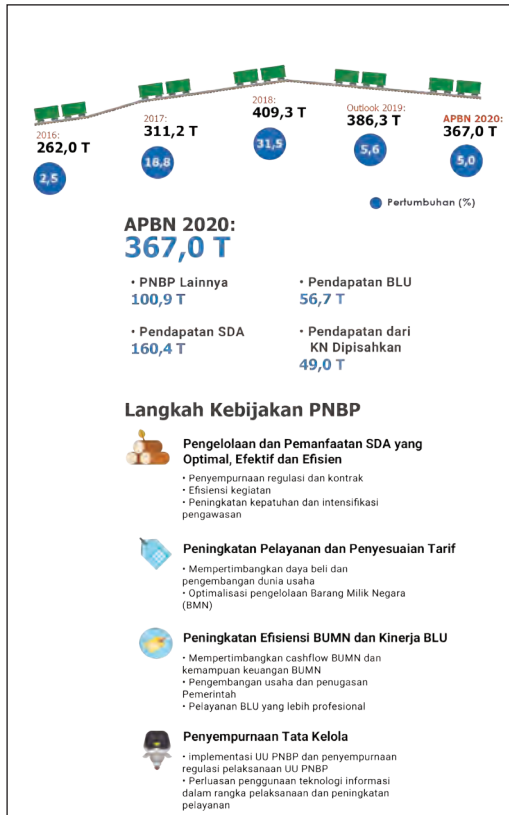
Transaksi perekonomian yang terjadi di Dermaga kecil di Sungai Lilin ini juga terjadi hampir di seluruh belahan bumi. Khususnya ketika wilayah-wilayah tertentu keberadaan perekonomiannya berada di bawah kekuasaan kerajaan dan atau koloni penjajahan, karena pada masa itu manusia belum mengenal alat tukar resmi seperti uang. Manusia bertransaksi berdasarkan kebutuhan yang mereka inginkan untuk bisa bertahan hidup.

Contoh, keberadaan perekonomian berada di bawah kerajaan tanpa koloni dan tanpa negara, yaitu Inggris. Kemudian perekonomian Inggris berada di bawah kekuasaan kerajaan dan negara. Keberadaan perekonomian Malaysia, pada awalnya berada dalam kekuasaan kerajaan dan koloni Inggris, kemudian berada di bawah kekuasaan kerajaan dan negara. Indonesia dan Amerika Serikat, contoh untuk keberadaan perekonomian yang pada awalnya di bawah kekuasaan koloni Belanda untuk Indonesia, dan koloni Inggris untuk Amerika Serikat, kemudian menjadi hanya di bawah kekuasaan negara.

Menyambung Bab I dan Bab II, Bab III mempunyai intisari tentang gambaran perekonomian atau ekonomi makro suatu negara, baik secara fakta dan teori secara singkat. Dengan demikian, Bab III tersambung dengan Bab I mengenai perekonomian dan dengan Bab II tentang negara.

## **B. Timbul APBN Sejak Terbentuk Suatu Negara**

**Penerimaan Negara.** Sejak sebuah negara terbentuk dan bersatu karena telah merdeka dan berdaulat, pemerintah suatu negara seperti Indonesia berhak menetapkan pajak dan pungutan negara lainnya. Di Indonesia, pajak secara keseluruhan dipungut oleh Direktorat Jendral Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendapatan negara dari dua macam sumber tersebut biasanya secara keseluruhan disebut pajak. Untuk pungutan negara lainnya non pajak, misalnya Dana Reboisasi, biasanya dilakukan oleh lembaga di Departemen Keuangan.



Sumber keuangan negara lainnya selain pajak adalah utang negara. Utang negara dapat berasal dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri, seperti dilakukan Indonesia. Perolehan utang itu dapat dilakukan melalui penerbitan dan penjualan surat utang negara, serta pinjaman langsung dengan negara luar dan pihak swasta luar negeri. Surat utang, baik yang dikeluarkan oleh negara atau swasta, dapat dalam bentuk obligasi, dengan jangka waktu bayar kembali yang panjang sekitar di atas 3 tahun hingga 30 tahun. Obligasi dan saham merupakan surat berharga pasar modal.

Surat berharga berjangka pendek, biasanya kurang dari sekitar 3 tahun dan didefinisikan sebagai surat berharga pasar uang, serta hanya ada dalam bentuk surat utang. Surat utang berjangka pendek di Indonesia

tidak diterbitkan oleh negara, tetapi hanya oleh pihak non negara terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Di Amerika Serikat surat berharga berjangka pendek juga diterbitkan oleh negara selain pihak swasta, disebut *Treasury bills* atau T-bills dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, serta merupakan salah satu sumber dana negara.

Perolehan dana oleh negara Amerika Serikat dilakukan dengan menjual T-bills dan obligasi kepada pihak di luar Bank Sentral Amerika Serikat (Bank Sentral disebut *The Federal Reserves* disingkat *The Fed*). Penjualan tersebut dilaksanakan melalui lelang tertutup dengan peranan sejumlah perusahaan keuangan Amerika Serikat disebut *Merchant banks*, biasanya berlokasi di New York. Untuk keperluan pelaksanaan kebijakan moneter, *The Fed* menggunakan surat berharga negara yang ada di pasar sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan moneter disebut Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*) disingkat OPT. Melalui OPT dengan sistem dan teknis tertentu, pelaksanaan OPT dengan pembelian surat berharga berarti untuk kebijakan moneter ekspansi, sedangkan sebaliknya dengan penjualan untuk kebijakan moneter kontraksi.

**Pengeluaran Untuk Belanja Negara.** Sejak negara terbentuk dan bangsa bersatu karena negara telah merdeka dan berdaulat, timbul suatu kewajiban bagi negara melakukan pengeluaran untuk belanja negara. Komponen dari pengeluaran negara di Indonesia terdiri dari Pengeluaran rutin dan Pengeluaran pembangunan, di Amerika Serikat terdiri dari *Direct spending* dan *Discretionary spending*.

Pengeluaran rutin biasanya sudah tetap setiap tahun karena untuk pembiayaan pelaksanaan operasi pemerintah di pusat dan di daerah yang bersifat tetap setiap tahun. Pengeluaran pembangunan dapat bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung dari jumlah proyek yang direncanakan dan yang akan dibangun. Total pengeluaran pada dasarnya tidak tergantung pada jumlah seluruh pendapatan negara dari pajak. Pembiayaan Total pengeluaran dapat berasal dari utang negara atau bahkan bisa dari Bank Sentral seperti telah dipraktekkan oleh sejumlah negara di dunia dalam bentuk bujet defisit (*deficit budget*).

**APBN.** Sejak negara terbentuk dan bangsa bersatu karena negara telah merdeka dan berdaulat, telah terdapat perencanaan atau rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN atau bujet negara (*Government budget*), sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara setiap tahun. Apabila APBN surplus berarti total pendapatan melebihi total pengeluaran, sedangkan apabila total pendapatan kurang dari total pengeluaran disebut APBN defisit, sehingga negara perlu melakukan hutang.

Pasal 23 UUD 1945 menyatakan, APBN diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas oleh DPR bersama pemerintah, serta kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, APBN dilaksanakan oleh pemerintah dan diawasi oleh DPR.



### **C. Tercipta Uang Sejak Terbentuk Suatu Negara, Serta Kemudian Tercipta Sektor Moneter**

**Uang.** Sejak negara terbentuk dan bangsa bersatu, negara segera memberlakukan suatu mata uang. Uang dipahami sebagai alat pembayaran yang sah terdiri dari uang kertas dan koin (UKK). Uang berperan sangat vital dalam suatu perekonomian, untuk kemajuan dan kelancaran perekonomian. Pencapaian kondisi ekonomi seperti itu tidak

bisa terjadi dalam ekonomi barter, dimana transaksi dilakukan dengan pertukaran antar barang dan atau jasa.

Penyebab uang menjadi sangat berperan karena uang mempunyai 4 fungsi:

1. Alat tukar atau alat pembayaran transaksi (*medium of exchange*),
2. Alat penyimpan kekayaan (*store of value*),
3. Satuan hitung (*unit of account*),
4. Standar pembayaran di waktu mendatang (*standard of deferred payments*).

**Uang Beredar.** Uang Beredar (*money supply*) timbul karena pemberlakuan uang, didefinisikan sebagai UKK yang berada di masyarakat atau beredar di luar bank-bank, ditambah uang milik masyarakat disimpan di bank-bank. Simpanan atau deposit masyarakat di bank berbeda dalam 3 bentuk, yaitu Giro (*demand deposit* atau DD), Tabungan (*saving deposit* atau SD), Deposito berjangka (*time deposit* atau TD). Perbedaan itu terjadi karena beda jenis simpanan dalam hal jangka waktu, suku bunga, kemudahan dan cara penarikan uang dari bank oleh masyarakat. Istilah umum Uang Beredar terdiri dari 3 inisial: 1. M1 (*narrow money*) terdiri dari UKK masyarakat + DD, QM (*quasi money*) yaitu Uang kuasi terdiri dari SD + TD, M2 (*broad money*) terdiri dari M1 dan QM. Sejumlah negara telah mendefinisikan Uang Beredar lebih dari 3, termasuk misal M3.

Monetisasi setiap transaksi dan kekayaan melalui penggunaan uang di Indonesia berlangsung terus. Kondisi ini memuncak ke level tinggi mulai tahun 1990 dengan berdirinya banyak kantor bank, penerbitan dan perdagangan surat berharga semakin meningkat. Serta penyebab peningkatan monetisasi, karena sistem pembayaran telah dan terus berkembang, termasuk sistem kliring antar bank dan pengambilan uang dari bank serta pembayaran melalui uang.

**Pencipta Uang Beredar.** Pencipta Uang Beredar dilakukan oleh bank-bank umum (*commercial banks*), tidak termasuk Bank



Perkreditan Rakyat karena tidak diperbolehkan mempunyai Giro. Proses penciptaannya melalui penyaluran dana oleh bank-bank ke masyarakat dan debitur bank lainnya. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dalam bentuk kredit dan pembelian surat utang dalam perekonomian, termasuk surat utang negara berbentuk surat utang jangka pendek (*treasury bills*) dan surat utang jangka panjang atau obligasi (*bonds*).

Uang Beredar yang diciptakan oleh bank-bank tidak mempengaruhi atau bahkan tidak menyebabkan perubahan tingkat suku bunga. Sebab, bebas melakukan penetapan tingkat suku bunga untuk tabungan dan deposito, maupun untuk penyaluran dana dalam bentuk kredit serta untuk pembelian surat utang dari semua pihak di luar bank serta yang diterbitkan oleh bank. Juga, semua tingkat suku bunga bank-bank biasanya jarang berubah, berlaku dalam waktu cukup lama, serta kaku atau susah untuk turun (*sticky downward*). Semua itu disebabkan oleh kompetisi antar bank setingkat dan struktur pasar bank-bank bersifat oligopoly.

**Penerbit uang dan Bank Sentral.** UKK diterbitkan dan disirkulasi serta diedarkan oleh Bank Sentral sebagai bank sirkulasi. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia disingkat BI berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD 1945, yang berfungsi segera setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

UKK di Indonesia disebut dengan nama mata uang Rupiah. Selama masa penjajahan sekitar 350 tahun, di seluruh bumi Indonesia sebelum terbentuk negara berlaku uang negara Belanda sebagai penjajah. Serta selama masa penjajahan, pada umumnya transaksi ekonomi antar penduduk di bumi Indonesia berlangsung dengan sistem barter antar barang atau jasa.

**Uang Primer dan Bank Sentral.** Bank Sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia, menciptakan Uang Primer (*Reserve Money*) yang terdiri dari UKK di bank dan di masyarakat atau di luar bank ditambah Giro bank pada Bank Sentral. Uang Primer merupakan kewajiban atau hutang moneter Bank Sentral, berada di sisi kanan neraca

Bank Sentral. Turun naik Uang Primer disebabkan langsung oleh turun naik aset-aset di sisi kiri neraca Bank Sentral dan naik turun hutang lain dan modal Bank Sentral.

Selain itu, Bank Sentral juga menentukan tingkat suku bunga melalui operasi penyediaan kredit atau fasilitas diskonto (*Discount Window*). Selain itu, penentuan juga terjadi melalui transaksi surat berharga yang diperjual belikan, biasanya melalui Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*), sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank Sentral juga berperan menentukan atau mempengaruhi kurs mata uang asing melalui operasi jual beli valuta asing. Biasanya Bank Sentral termasuk Bank Indonesia merupakan pemegang tunggal Cadangan Devisa negara, umumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang suatu negara termasuk Indonesia.

**Kebijakan Moneter Dan Hasilnya.** Bank Sentral melalui kebijakan moneter mengelola penciptaan dan perubahan Uang Beredar. Kebijakan tersebut berupa ekspansi moneter dengan menaikkan Uang Primer, atau dengan menurunkan Uang Primer dalam rangka kebijakan kontraksi moneter. Sebab terdapat formula  $UB = m \cdot UP$ ,  $UB =$  Uang Beredar,  $m =$  pelipat ganda Uang Beredar (*the money supply multiplier*),  $UP =$  Uang Primer. Artinya, setiap perubahan Uang Primer, dengan  $m$  tetap, menyebabkan secara proporsional perubahan Uang Beredar melalui bank-bank, serta seterusnya merubah tingkat suku bunga.

Bersamaan dengan kebijakan moneter melalui perubahan  $UP$ , kebijakan moneter juga dilakukan melalui perubahan  $UB$  oleh bank-bank. Kedua cara itu menyebabkan  $UB$  berubah, kemudian efek selanjutnya akan menyebabkan perubahan Produk Domestik Bruto Riil dengan inisial  $Y$ , serta perubahan dari harga atau  $P$  yang menimbulkan inflasi atau deflasi dalam perekonomian.

Apabila semua kebijakan moneter dimaksud menaikkan  $UB$  atau berupa kebijakan moneter ekspansi, maka  $Y$  akan naik atau terdapat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kenaikan harga  $P$  sehingga menyebabkan inflasi. Hubungan ini dapat terlihat dari kaitan

formula atau persamaan berikut ini. Persamaan pertama,  $UB = m \cdot UP$ , seperti dikemukakan di atas. Persamaan kedua,  $UB/P = L$ , dimana  $L$  adalah Total likuiditas dalam perekonomian. Persamaan itu menyatakan  $UB$  seimbang dengan Likuiditas nominal atau  $L \cdot P$  dalam perekonomian. Persamaan ketiga,  $UB \cdot v = Y \cdot P$ , menyatakan bahwa Total  $UB$  hasil perputaran sebanyak  $v$  dalam membiayai transaksi di perekonomian, yaitu  $UB \cdot v$ , seimbang dengan Nominal  $Y$  yaitu  $Y \cdot P$ .

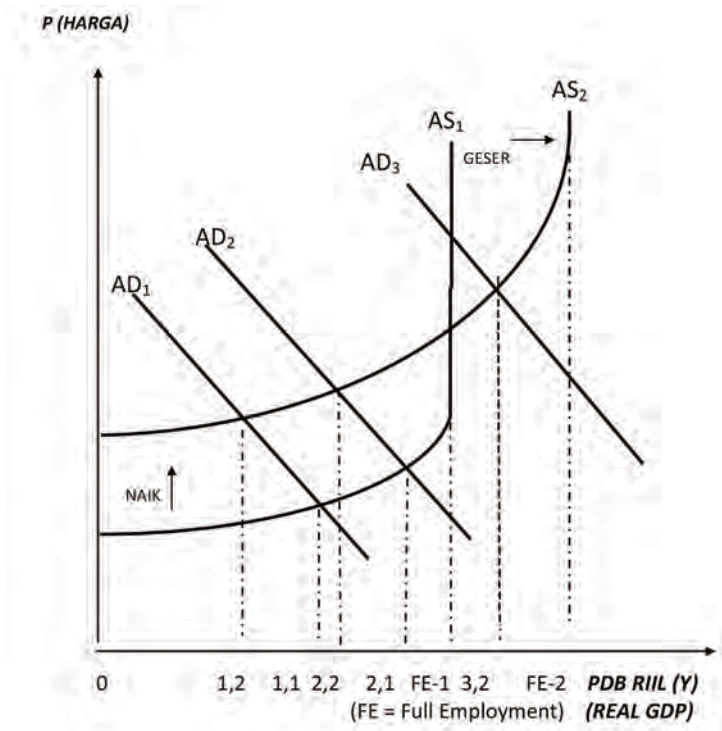
Jadi apabila  $UB$  naik karena kebijakan moneter ekspansi, baik karena  $UP$  naik dan atau kenaikan  $UB$  oleh bank-bank, maka akan menaikkan  $L$ . Ini berarti sumber pembiayaan atau pendanaan untuk kegiatan ekonomi dalam perekonomian meningkat. Sebagai dampaknya, kemudian menghasilkan peningkatan Nominal  $Y$  atau  $P \cdot Y$ , karena baik  $Y$  naik maupun  $P$  meningkat atau berarti terjadi inflasi. Dengan demikian, kebijakan ekspansi moneter memberi hasil  $Y$  naik, tetapi disertai dengan timbul efek bahaya berupa inflasi. Sebaliknya, untuk kebijakan menurunkan  $UB$  disertai atau berupa kebijakan moneter kontraksi, maka akan menurunkan  $L$ , dengan dampak menurunkan Nominal  $Y$  dan menimbulkan penurunan harga atau terjadi deflasi.

Sementara itu, Bank Sentral dapat juga mengintrodusir kebijakan ekspansi moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit diskonto dan atau suku bunga OPT. Juga sebaliknya, Bank Sentral melakukan kebijakan kontraksi moneter berupa kebijakan menaikkan tingkat suku bunga kredit diskonto dan OPT.

**Valuta asing atau devisa.** Adapun untuk transaksi internasional antar negara, dulu sebelum perang dunia kedua, memakai uang emas dalam sistem emas (*the gold standard*). Kemudian berdiri institusi moneter dan keuangan dunia pada tahun 1944 melalui konferensi di Bretton Woods, dengan nama *The International Monetary Fund*, disingkat IMF. Hasilnya, mata uang emas dan sistemnya dengan tehnik yang rumit dapat diganti dengan sistem moneter baru. Serta mata uang emas diganti oleh Poundsterling mata uang negara UK, yang kemudian menjadi mata uang internasional penting. Dalam masa selanjutnya mulai awal tahun 1960an, IMF berkembang dengan baik, sehingga menjadikan US\$ mata

uang U.S.A. sebagai uang internasional terpenting karena dikenal dan digunakan di seluruh pelosok dunia.

**Gambar 2**  
**Model 1 : Abstraksi Perekonomian Suatu Negara**



- ✓ Kurva AS terdiri dari dua bagian: miring ke atas (*positive slope*) – Neo Keynesian dan tegak lurus pada PDB tingkat *full employment* – Neo Classical
- ✓ Kurva AS miring cekung naik ke atas karena biaya produksi naik, berarti hanya P naik atau terjadi inflasi tanpa ada kenaikan Y. Sedangkan, kurva AS vertikal geser ke kanan menyebabkan Y naik tanpa P meningkat. Pergeseran kurva AS ini disebabkan oleh kualitas SDM naik, kapital tambah, serta teknologi semakin maju dan terdapat teknologi baru.
- ✓ Sepanjang pada kurva AS miring, geser kurva AD ke kanan dengan kebijakan *aggregate demand* memberi hasil PDB naik tapi disertai

Harga (P) naik atau inflasi. Tapi ketika AD menyentuh kurva AS vertikal, geser AD ke kanan hanya meningkatkan P tanpa menaikkan Y.

#### D. Abstraksi Suatu Perekonomian Dalam 2 Model

Model pertama abstraksi perekonomian atau ekonomi makro suatu negara menggunakan kurva AD dan kurva AS seperti terdapat pada **Gambar 2** di atas. Gambar tersebut dalam 2 dimensi, dengan sumbu horizontal menunjukkan jumlah AD dan jumlah Y atau AS, sedangkan pada sumbu vertical menyatakan tingkat harga umum (*the general prices*) P. Interaksi AD dan AS dengan pergerakan kurva AD dan kurva AS menghasilkan dan berhenti pada keseimbangan  $AS = AD$ . Arti dari keseimbangan itu adalah jumlah AD membeli jumlah AS yang sama, sehingga diperoleh tingkat keseimbangan P dan Y, sebagaimana dikemukakan di bawah.

Secara agregat atau total, dalam suatu perekonomian dan negara terdapat Permintaan Agregat (*Aggregate Demand*), dengan inisial AD. AD adalah total pengeluaran atau belanja untuk kehidupan semua manusia dalam suatu perekonomian dari suatu negara. Pengeluaran itu dilakukan oleh semua atau total pembeli atau pemilik *demand* terhadap semua atau total barang dan jasa. Penawaran *Aggregate (Aggregate Supply)*, berinisial AS, yaitu total dari semua *supply* atau penjualan barang dan jasa guna memenuhi setiap *demand* manusia pembeli. AS tidak lain adalah total barang dan jasa hasil produksi dalam suatu perekonomian dari suatu negara, disebut Produk Domestik Bruto disingkat PDB (*Gross Domestic Product*, disingkat GDP), dan diberi inisial Y. Ungkapan lain mengenai AD dan AS juga dikemukakan di bawah.

Walaupun AD dan AS bersifat agregat atau total, tetapi kurva AD mempunyai bentuk atas dasar hukum *demand*, yaitu turun dari atas kiri ke kanan bawah dengan arah (*slope*) negative, serta garis lurus atau linear biasanya. Sedangkan, kurva AS juga demikian, berbentuk atas dasar hukum *supply*, produktivitas dan biaya produksi, serta tingkat ekonomi tanpa pengangguran terpaksa (*a level of full employment economy with no involuntary unemployment*). Jadi, kurva AS mempunyai bentuk naik

dari kiri bawah ke kanan atas dengan arah (*slope*) positif dan cekung biasanya karena pengaruh produktivitas dan biaya. Ujung kurva AS yang miring cekung mentok pada kurva AS yang vertical pada *a level of full employment economy*.

Seperti telah diungkapkan di atas, tingkat keseimbangan P dan Y pada  $AS = AD$  merupakan hasil dari interaksi AD dan AS dalam suatu perekonomian atau ekonomi makro. P atau harga dimaksud adalah tingkat dari biaya untuk hidup (*cost of living*) per bulan di suatu area yang meliputi sejumlah daerah seperti kota dan propinsi atau negara bagian dalam suatu negara. Persentase perubahan dari harga ( $\% \Delta P/P$ ) disebut inflasi per bulan atau per tahun. Inflasi dari suatu negara merupakan jumlah dari inflasi di tiap-tiap propinsi atau negara bagian.

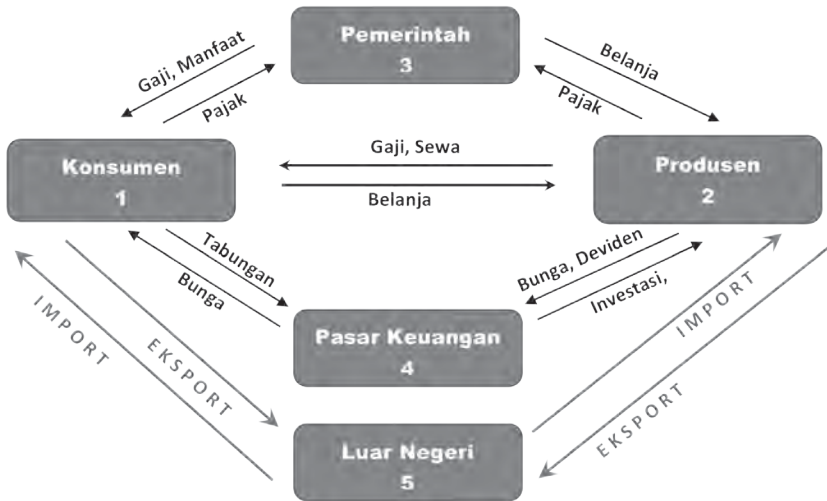
Model kedua untuk abstraksi perekonomian atau ekonomi makro suatu negara direpresentasikan oleh **Gambar 3 di bawah**. Model ini disebut *the circular flow of an open economy*, berdasarkan alur dan interaksi dari agen-agen dalam dan terkait dengan perekonomian dan negara. Juga, model 2 didasarkan atas 3 sektor, selain sektor ril (*the real sector*) mencakup kegiatan terkait barang dan jasa, sektor tenaga kerja (*the labor sector*) berkaitan dengan penyediaan dan perolehan tenaga kerja dan enterprenur, juga sektor keuangan (*the financial sector*). Sektor keuangan muncul setelah penggunaan uang dalam perekonomian, serta mencakup 3 unsur. Pertama, instrumen keuangan termasuk uang, surat berharga utang seperti *commercial papers* dan sertifikat deposito untuk berjangka pendek, serta obligasi dan saham untuk berjangka panjang. Kedua, lembaga keuangan seperti bank, Dana Pensiun, lembaga-lembaga milik Pasar Uang dan berada di Pasar Modal. Ketiga, sistem yang mengatur bagaimana sektor *financial* atau keuangan dapat bekerja dan berlangsung secara efisien dan efektif.

Pada Gambar 3 terlihat dalam suatu perekonomian di suatu negara terdapat 5 agen dan 6 alur interaksi (*the circular flow*) antar agen, sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Interaksi antar agen pertama atau konsumen (*consumers*) yang juga disebut rumah tangga (*households*) dengan agen kedua atau produsen



**Gambar 3**  
**The circular flow of an open economy**



(producers) yang juga disebut perusahaan (*firms*) memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga merupakan beberapa manusia dalam 1 keluarga ikatan suami isteri dan anak. Interaksi antar rumah tangga dengan perusahaan adalah dalam rangka rumah tangga membeli barang dan jasa dari produsen untuk konsumsi (*consumption*) bagi kehidupan manusia, diberi inisial C.

Interaksi sebaliknya dari agen kedua dengan agen pertama dalam 2 hal. Pertama, agen kedua membeli semua factor dari agen pertama, untuk melakukan produksi barang dan jasa. Faktor itu terdiri dari 4 faktor produksi N, L, L, K dan teknologi f milik agen pertama. Kedua, atas pembelian 4 faktor dari agen pertama, agen kedua membayar kepada agen pertama semua pendapatan dari 4 faktor yaitu sewa (*rent*), upah/gaji (*wage/salary*), bunga (*interest*).

Interaksi agen pertama dengan pemerintah sebagai agen ketiga untuk pembayaran pajak, diberi inisial T, serta sebaliknya bagi pembayaran gaji dari agen ketiga kepada agen pertama.

Interaksi agen pertama dengan sector finansial atau keuangan (*the financial sector*), yaitu agen keempat, karena agen pertama melakukan simpan tabungan (*savings*) di agen keempat. Simpanan itu diberi inisial **S**.

Interaksi agen keempat dengan agen kedua, dalam rangka penyaluran dana melalui kredit dan pembelian surat berharga utang untuk investasi, diberi inisial **I**. Investasi melalui agen keempat tersebut juga berasal dari penduduk negara-negara luar (*the rest of the world*) yaitu agen kelima.

Interaksi agen ketiga dengan agen kedua melalui agen keempat. Yaitu agen ketiga dengan dana negara disimpan di agen keempat melakukan pembelian barang dan jasa dari agen kedua, dalam rangka belanja atau pengeluaran negara untuk Pengeluaran rutin dan Pengeluaran pembangunan berdasarkan APBN. Belanja atau pengeluaran negara ini diberi inisial **G**.

Interaksi penduduk suatu negara, terdiri dari agen pertama, agen kedua dan agen ketiga, melalui agen keempat, dengan agen kelima yaitu penduduk dari negara luar (*the rest of the world*), dalam rangka 2 hal. Pertama, pembelian barang dan jasa hasil produksi domestic atau penduduk suatu negara oleh agen kelima, yaitu ekspor, dapat inisial **X**. Kedua, penduduk domestic suatu negara melakukan pembelian barang dan jasa hasil produksi penduduk *the rest of the world*, yaitu impor, dapat inisial **M**.

Jadi 3 agen yaitu agen pertama, ketiga dan kelima semuanya berperanan melakukan demand atau belanja atau pengeluaran (*expenditures*) terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu negara. Juga, dalam kenyataan agen kedua melakukan demand terhadap barang atau jasa untuk keperluan produksi serta investasi pada barang dan jasa. Pengeluaran tersebut dilakukan melalui peranan agen keempat yang memberikan jasa untuk transaksi dan kelancaran dalam rangka I, G, X dan M.

## E. Persamaan Ekonomi Makro

Jumlah dari  $C + I + G + X$  dimaknai sebagai Total Pengeluaran terhadap semua barang dan jasa termasuk dari impor dalam suatu perekonomian di suatu negara. Sedangkan untuk  $C + I + G + X - M$  diartikan sebagai Total Pengeluaran terhadap semua barang dan jasa produksi dalam negeri di suatu perekonomian, tanpa impor. Total Pengeluaran disebut terakhir juga dimaknai sebagai Total Permintaan atau Agregat Permintaan atau Agregat Pengeluaran (*Aggregate Demand* atau *Aggregate Expenditures*), diberi inisial AD. Lihat ungkapan lain dari AD di atas.

Seperti terlihat pada Gambar 3 penduduk domestic atau agen kesatu, agen ketiga dan para investor domestik melakukan transaksi internasional dengan penduduk negara-negara *rest of the world* atau agen kelima. Transaksi ini tidak saja untuk barang dan jasa disebut  $X$  dan  $M$  di atas, tetapi juga berupa transaksi bisnis modal. Transaksi bisnis modal meliputi transaksi bisnis modal masuk dan keluar (*capital inflows*  $+K$  dan *capital outflows*  $-K$ ) dalam bentuk fisik dan dana. Jadi, total aliran modal bersih  $\pm K = +K + -K$ , atau terdiri dari  $\pm K_p$  atau aliran modal swasta domestik dan  $\pm K_G$  atau aliran modal bersih oleh pemerintah domestic. Sehingga,  $\pm K = \pm K_p + \pm K_G$ .

Sebagai ikhtisar, suatu perekonomian terbuka atau ekonomi makro dari suatu negara mempunyai 5 agen, serta interaksi antar agen menghasilkan 5 persamaan, untuk sisi *demand* atau AD 4 persamaan dan 1 persamaan untuk AS di sisi produksi dan *supply*. **Persamaan pertama**, Total Pengeluaran (*Aggregate Expenditures* atau *Aggregate Demand*) adalah  $C + I + G + X - M$ , yang membeli semua produksi atau *supply* barang dan jasa atau AS. Pada keseimbangan AD dengan AS atau  $Y$ , menjadi  $Y = C + I + G + X - M$ . Kesamaan ini dengan asumsi sisa produksi tahun lalu sama dengan sisa produksi barang dan jasa tahun berjalan, sehingga produksi sama dengan *supply* di setiap tahun berjalan. **Persamaan kedua**, Total pendapatan rumah tangga menjadi  $C, T$  dan  $S$ , sehingga terdapat keseimbangan  $Y = C + S + T$ . **Persamaan ketiga**, hasil dari penyamaan persamaan kesatu dan persamaan kedua, yaitu  $(X - M) = (S - I) + (T - G)$ . Artinya bagi suatu perekonomian, Neraca Berjalan (*Current Account*)

atau  $(X - M)$  adalah sama dengan perbedaan antara Selisih Tabungan dengan Investasi (*Saving-Investment Gap*) atau  $(S - I)$  ditambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, biasa disingkat APBN atau  $(T - G)$ . **Persamaan keempat**,  $\pm K = +K + -K$  atau  $\pm K = \pm K_p + \pm K_G$ , yaitu Total Bersih Aliran Modal Internasional (*Total Net International Capital Flows*) merupakan hasil transaksi internasional untuk aliran modal keluar masuk antara perekonomian domestic dengan perekonomian negara-negara luar mitra bisnis. **Persamaan kelima**,  $(X - M \pm K) = (S - I \pm K_p) + (T - G + \pm K_G)$ , penggabungan dari persamaan ketiga dan persamaan keempat. Artinya, surplus atau deficit Neraca Pembayaran (*Balance of Payments*) adalah penjumlahan dari *Saving-Investments Balance* ditambah surplus atau deficit APBN.

## F. Interaksi AD dan AS, pertumbuhan ekonomi dan inflasi

AD dibahas dalam ilmu ekonomi makro melalui pembahasan IS-LM. IS merepresentasikan keseimbangan di sector riil yaitu  $Y = C + I + G + X - M$ , yaitu AS = AD yang berarti total *demand* terhadap barang dan jasa atau AD membeli jumlah yang sama AS atau total *supply* akan barang dan jasa. LM menyatakan keseimbangan di sector moneter dan keuangan, atau seperti disebut di atas sebagai sector finansial. Keseimbangan di sector finansial adalah Uang Beredar Riil atau *Real Money Supply* atau  $M/P$  seimbang atau sama dengan Permintaan Uang atau  $L$ , yaitu  $M/P = L(Y, i, (\Delta P/P)^e)$ . Permintaan uang merupakan fungsi atau ditentukan oleh PDB atau  $Y$ , tingkat suku bunga nominal  $i$ , ekspektasi inflasi  $(\Delta P/P)^e$ . Atau dengan pernyataan lain, hubungan  $M$  dengan  $P$  dan  $Y$  dinyatakan oleh Persamaan Kuantitas (*Quantity Equation* atau *Equation of Exchange*) yaitu  $MV = PY$  atau  $M/P = (1/V) Y$ ,  $V = \text{velocity of money}$ . Dari kesamaan IS = LM menghasilkan AD dalam figurasi dan hubungan langsung  $P$ - $Y$  seperti pada Gambar 2 di atas.

AS atau  $Y$  atau PDB dalam ilmu ekonomi makro diperoleh dari pasar tenaga kerja, dengan sistem upah atau gaji yang mengandung upah atau gaji kaku atau susah turun (*sicky wage downward*) dan dengan jenis pengangguran serta levelnya. Tidak ada pengangguran diartikan sebagai

tidak ada pengangguran terpaksa (*involuntary unemployments*) dan hanya terdapat pengangguran sukarela (*voluntary unemployments*). *Involuntary unemployments* dipahami sebagai pengangguran terjadi setelah mencari pekerjaan (*employments*) dimana-mana di domestic suatu negara, tapi tidak ditemukan atau diperoleh. *Voluntary unemployments* dimaknai sebagai pengangguran karena tidak mau kerja walaupun pekerjaan tersedia atau ditawarkan pada tingkat upah atau gaji yang layak atau lebih dan menarik. Atas dasar harga barang jasa dalam perekonomian yang proporsional dengan upah nominal  $W$ , maka bagian pertama kurva AS berbentuk naik seperti pada Gambar 2 di atas, jadi bila  $Y$  naik  $P$  juga meningkat. Ujungnya menyentuh kurva AS garis tegak lurus pada *the level full employment of Y or an economy*. Artinya setelah titik tempat mentok itu,  $Y$  tidak bisa naik dan kenaikan kurva AD hanya menyebabkan  $P$  naik terus ke arah inflasi hiper (*hyper inflation*).

Interaksi AD dan AS seperti dapat diperlihatkan pada Gambar 2 dengan kurva AD dan kurva AS atau  $Y$ , akan menghasilkan perubahan harga  $P$  dan PDB atau  $Y$ . Sebab bentuk dan ciri-ciri AD dan AS itu, terdapat 2 strategi dalam rangka memajukan ekonomi dengan pertumbuhan yang sesuai dan sambil terus menciptakan dan memelihara stabilisasi.

**Strategi pertama.** Bayangkan, sepanjang kurva AS yang miring dan naik ke atas, kurva AD digeser ke kanan karena unsur-unsur AD pada  $C, I, G, X$  dan  $M$  sebagai penyebabnya. Artinya,  $P$  dan  $Y$  semuanya akan naik, yang dimaknai sebagai terjadi inflasi ( $\% \Delta P/P$ ) dan pertumbuhan  $Y$  atau pertumbuhan ekonomi ( $\% \Delta Y/Y$ ). Batas akhir dari strategi pertama, bila penggeseran AD hingga mentok kurva AS tegak lurus pada kondisi  $Y$  *full employment*.

**Strategi kedua.** Situasi terakhir bermakna, bila AD naik atau digeser ke kanan pada kurva AS tegak lurus di level  $Y$  *full employment*, hasilnya hanya kenaikan  $P$  tanpa ada peningkatan  $Y$ . Indonesia pada dasarnya melakukan strategi pertama, meskipun juga berusaha memakai strategi kedua seperti diungkapkan di bawah ini. Jadi, situasi terakhir mengharuskan kurva AS tegak lurus digeser ke kanan. Berarti, mulai dari geseran kurva AD terakhir hingga menyentuh kurva AS tegak lurus, untuk

terdapat pertumbuhan ekonomi hanya relevan dengan menggerakkan kurva AS tegak lurus ke kanan.

Strategi itu telah diungkapkan oleh analisa cerdas pada Solow model, dihasilkan oleh Professor Robert Solow, ahli ekonomi pemenang nobel ekonomi dari *Massachusetts Technology (MIT)*. Solow model, dengan menggunakan fungsi produksi untuk PDB disebut  $Q$ , yaitu  $Q = f(K,L)$  atau  $Q = f(K/L, 1)$  atau  $Q = f(k)$ , mengungkapkan bahwa  $Q$  di setiap perekonomian dari semua negara ditentukan oleh teknologi  $f$  dan  $k$ , dimana  $k = \text{Capital-Labor Ratio}$ . Singkatnya, jika  $k$  naik, berarti pemakaian  $K$  meningkat, sedangkan penggunaan  $L$  menurun karena kualitas  $L$  dan pemakaian  $K$  naik. Kondisi ini akan menyebabkan terjadi pertumbuhan  $Y$  atau PDB atau pertumbuhan ekonomi. Juga demikian, karena teknologi semakin maju yang berakibat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi barang atau jasa.

Dengan demikian, karena kurva vertical AS digeser ke kanan sepanjang kurva AD yang tetap, berarti  $K$  naik karena  $K$  tambah-tambah, tapi  $L$  semakin sedikit dalam jumlah namun semakin tinggi kualitas, sehingga  $k$  meningkat. Juga berarti, teknologi produksi dan cara kerja semakin tinggi yang dapat memberi hasil semakin efisien tapi efektif.

U.S.A. dan Jepang, misalnya, terutama menggunakan strategi kedua, walaupun strategi pertama juga dimanfaatkan. China juga sama dengan Jepang, tapi lebih banyak berhasil karena strategi pertama sebab ekspor mengalami kenaikan yang tinggi. Negara-negara di Eropa Barat, juga terutama menerapkan strategi kedua. Negara-negara berkembang pada dasarnya memakai strategi pertama.

Saat ini, strategi yang dipakai di berbagai negara maju tersebut tentu juga sudah menular ke berbagai belahan bumi lainnya. Tolok ukurnya adalah efisiensi dan efektivitas. Termasuk bagi penduduk dan pelaku ekonomi di Sungai Lilin, sebagai contoh kecilnya. Dengan bertransaksi langsung menggunakan uang, tentu mereka bisa memilih barang yang lebih berkualitas sesuai kebutuhan hidupnya. Bahkan barang hasil pertanian yang mereka tawarkan bisa memiliki nilai lebih tinggi dengan terbukanya kesempatan untuk menjualnya kepada pedagang lain dan harga yang lebih kompetitif.





## BAB IV

# SISTEM POLITIK DEMOKRASI DAN SISTEM EKONOMI



**AHIRNYA** sebuah negara, diikuti terbentuknya sistem politik, akan berujung pada terbentuknya sebuah sistem ekonomi. Tak banyak negara di dunia yang bisa menikmati kedua sistem ini, sehingga rakyatnya benar-benar merasakan kedamaian dan kemakmuran. Politik dan Ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang terus berupaya keras untuk mensinergikan kedua sistem ini melalui lembaga-lembaga kekuasaan yang ada. Dari uraian sebelumnya, terdapat keniscayaan, banyak manusia di suatu wilayah belahan dunia menyebabkan timbul dan keberadaan suatu perekonomian, serta kemudian suatu negara. Sedangkan perekonomian ditentukan oleh Sistem Politik dan kemudian diatur oleh Sistem Ekonomi.



## A. SISTEM POLITIK

Pemahaman Sistem Politik. Secara umum, sistem politik di dunia terdiri dari Sistem Demokrasi dan sistem non demokrasi yang meliputi Sistem Komunisme serta Sistem Sosialisme. Di setiap Sistem Politik pada dasarnya terdapat tiga cabang kekuasaan dan terpisah satu sama lain. Yaitu, kekuasaan legislatif yang mempunyai peran pokok sebagai pembuat dan penentu Undang-Undang Dasar atau konstitusi, serta Undang-Undang. Kekuasaan eksekutif yang berkuasa terutama melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan yudikatif yang memegang peran pokok mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menetapkan hukum serta sanksi bagi pelanggar hukum dan undang-undang.

Lembaga pada kekuasaan legislatif terdiri dari lembaga untuk wakil rakyat hasil pemilihan umum, atau berdasarkan penunjukan atau pengangkatan. Lembaga di kekuasaan eksekutif adalah kepala negara dan pemerintahan yang disebut sebagai Presiden dan wakil, atau Perdana Menteri dan Wakil hanya sebagai kepala pemerintahan. Mereka merupakan hasil pemilihan umum oleh rakyat atau pengangkatan



GESJAR.COM/PG

oleh wakil rakyat hasil pemilihan umum, atau pengangkatan oleh partai terhadap Ketua Partai dan Wakil Ketua partai. Pemerintahan terdiri dari para Menteri dan kepala eksekutif lainnya. Lembaga di kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (*Supreme of Court*) yang membawahi para hakim pengadilan, serta Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).

**Sistem demokrasi.** Sistem Demokrasi (SD) dipahami sebagai sistem politik yang mempunyai unsur pokok berupa semua aspek politik dan aspek kehidupan rakyat ditentukan oleh rakyat atau wakil rakyat serta diawasi oleh rakyat. Berarti, rakyat dalam SD mempunyai kebebasan dan kedaulatan, serta hak azazi setiap warganegara anggota rakyat dihormati atau dihargai.

Kebebasan itu termasuk dalam memilih jalan kehidupan dan aktivitas rakyat sesuai ketentuan perundangan. Kebebasan itu juga mencakup kebebasan pers dan media, kebebasan rakyat menyampaikan pendapat dan kritik melalui wakil rakyat, lembaga negara, serta melalui setiap kesempatan yang dapat digunakan.



Selain kebebasan itu, semua kepemilikan pada dasarnya dikuasai dan dimiliki oleh rakyat, dan atau sebagian oleh negara berdasarkan ketentuan yang disetujui oleh wakil rakyat. Penggunaan atas kepemilikan juga ditentukan oleh rakyat dan negara atas dasar ketentuan yang disetujui oleh wakil rakyat.

Penentuan oleh rakyat menghasilkan penetapan pimpinan dan anggota pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan pilihan rakyat. Pelaksanaan pilihan rakyat dapat dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum langsung, atau secara tidak langsung melalui wakil rakyat hasil pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

Hasil pemilihan umum menetapkan anggota wakil rakyat di kekuasaan legislatif, kepala negara dan pemerintahan pada kekuasaan eksekutif, pimpinan Mahkamah Agung bagi kekuasaan yudikatif. Di sejumlah negara, pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak ditetapkan melalui pemilihan umum, melainkan dilakukan dengan pengangkatan oleh kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Jadi dalam SD, sistem negara dan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

**Sistem Komunisme.** Sistem Komunisme (SK) dapat diartikan sebagai sistem politik yang mempunyai unsur pokok dimana semua aspek politik dan kehidupan rakyat ditentukan oleh negara yang dikuasai oleh satu partai, biasanya disebut Partai Komunisme. Rakyat dalam SK tidak mempunyai kebebasan berpolitik dan bernegara, serta hak azazi setiap anggota rakyat kurang atau tidak dihormati dan dihargai.

Unsur pokok lain, Partai Komunis dan negara meniadakan kebebasan pers dan media, kebebasan rakyat menyampaikan pendapat dan kritik melalui wakil rakyat, lembaga negara, pers dan media yang telah ditentukan, serta melalui setiap kesempatan yang dapat digunakan. Juga sebagai unsur pokok, SK biasanya memberlakukan prinsip sama rata dan sama rasa untuk kehidupan dan aktivitas rakyat.

Semua pimpinan dan anggota pada lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta pada lembaga di bawahnya, ditetapkan, ditunjuk dan

diangkat oleh partai melalui rapat pada partai di pusat atau partai di daerah. Rakyat tidak memilih langsung, tetapi semuanya melalui dan ditentukan oleh satu partai, yaitu Partai Komunis.

**Sistem Sosialisme.** Sistem Sosialisme (SS) dapat diartikan sebagai sistem politik yang mempunyai unsur pokok serupa dengan SK, dipimpin oleh dan melalui satu partai biasanya yaitu Partai Komunis atau dengan nama Partai Sosialis. Penetapan semua pimpinan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif ditunjuk dan ditetapkan oleh partai di pusat dan daerah. Perbedaan dengan SK, SS tidak menerapkan penuh prinsip sama rata sama rasa, tetapi masih mengakui dan memberikan kebebasan antar rakyat dalam batas tertentu yang diatur dalam ketentuan.

### **Contoh Negara-Negara Demokrasi**

Contoh negara dengan sistem demokrasi, U.S.A. (sumber utama: Google-Wikipedia). Contoh untuk negara dengan SD yang hampir sempurna adalah Amerika Serikat, disebut United States of America dengan singkatan U.S.A. atau disebut United States dengan singkatan U.S. U.S.A. adalah sebuah negara berbentuk republik konstitusional federal, serta dengan sistem politik berbentuk SD dimana tiga kekuasaan terpisah secara jelas untuk kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.

U.S.A. terletak di bagian tengah benua Amerika Utara, terbagi dalam 48 negara bagian dari seluruh berjumlah 50 negara bagian termasuk Alaska dan Hawaii. Alaska terletak di ujung barat laut Amerika Utara berbatasan dengan Kanada dan Rusia. Hawaii adalah pulau terletak di laut Samudera Pasifik.

Sistem politik dalam bentuk SD di negara U.S.A. telah berlangsung stabil dan sangat lama berabad-abad. Kondisi SD seperti itu disebabkan karena pada dasarnya semua ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan terhadap dua partai besar yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Dua partai tersebut, selain pihak Independen kalau ada, merupakan tempat rakyat menyatakan pilihan politik.

Pilihan politik rakyat itu dilakukan melalui pemilihan Partai Republik atau Partai Demokrat, pihak Independen bila ada, secara



langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (luberja). Melalui pemilihan partai, rakyat menentukan anggota wakil rakyat di lembaga legislatif yaitu House of Representatives yang meliputi Senate dan Congress. Calon anggota dari partai atau grup independen pemenang pasti akan diangkat menjadi anggota Senate atau Congress.

Dengan melalui pemilihan partai, rakyat menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan pengadilan negara federal. Calon Presiden dari partai pemenang niscaya akan diangkat dan disumpah menjadi Presiden. Demikian pula untuk anggota Mahkamah Agung. Setelah itu, Presiden menetapkan pemerintahan yang terdiri dari para menteri. Sedangkan untuk pimpinan lembaga negara yang lain ditetapkan oleh Presiden secara langsung, atau atas dasar usul Presiden, kemudian ditetapkan oleh Senate dan disetujui oleh House of Representatives yaitu Senate dan Congress.

Sistem pemilihan umum di U.S.A. adalah sistem distrik berdasarkan lokasi daerah pemilihan dan hanya ada satu pemenang, atau bukan sistem proporsional atas dasar jumlah penduduk dan pemilih. Sebagai catatan, di U.S.A. untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlaku sistem *electoral college*, yaitu dewan pemilih yang menentukan pemenang.

Anggota dewan pemilih yang menjadi utusan ditentukan oleh rakyat pada hari pemilihan umum sebanyak 2 anggota yang sejak awal sudah berjanji akan memilih calon Presiden/Wakil Presiden tertentu. Jumlah utusan dari negara bagian adalah 2 anggota dimaksud ditambah jumlah anggota DPR dari negara bagian. Sementara itu, pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (luberja) juga diterapkan untuk penetapan Gubernur negara bagian (state), walikota (the mayor of city), serta Kepala Kejaksaan Agung (The Chief of Attorney General).

Sebagai catatan penting, kemantapan dan kestabilan negara U.S.A., baik dari sistem politik dan sistem ekonomi, serta kemajuan teknologi dan kebijakan politik dan ekonomi, telah memberi hasil bagi negara U.S.A. mengalami kemajuan ekonomi yang baik dan stabil. Selain itu, dalam kaitan dengan pihak luar negeri dan dunia, U.S.A. juga berhasil menjadi patokan dalam kestabilan dan keamanan dunia. Kepercayaan dunia

kepada U.S.A. secara keseluruhan termasuk perekonomian sangat tinggi. Sebagai bukti, hampir semua negara di dunia menempatkan Cadangan Devisa dalam bentuk surat utang (*treasury bills* dan *bonds*) negara U.S.A. dan senang memegang mata uang dolar U.S.A.

Contoh negara dengan sistem demokrasi, UK (sumber utama: Google-Wikipedia). UK merupakan negara kesatuan (*unitary state*) dengan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan, dimana tiga kekuasaan terpisah secara jelas untuk kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. UK untuk kekuasaan eksekutif menerapkan sistem pemerintahan parlemen dan merupakan yang pertama di dunia (*the mother of parliament*). Sistem pemerintahan itu menjadikan UK mempunyai sistem politik berbentuk SD. Sehingga rakyat UK dapat secara demokratis menentukan pimpinan lembaga negara, agar negara dapat mengatasi masalah sosial ekonomi kemasyarakatan untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan rakyat seluruhnya.

UK merupakan bagian dari Eropa Barat, serta terdiri dari negara Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara. Sekarang, Kerajaan Inggris terbagi dalam 2 kelompok wilayah, yaitu England atau Great Britain dan Irlandia Utara. Kerajaan UK mempunyai pimpinan Ratu dan sebelumnya Raja, yang berfungsi sebagai kepala negara dalam arti sebagai simbol kenegaraan atau simbol kedaulatan, keagungan dan persatuan negara. UK menerapkan sistem politik berbentuk SD, serta merupakan SD yang hampir sempurna dan telah berlangsung stabil dalam masa lebih lama dari masa SD di U.S.A.

Kondisi SD seperti itu disebabkan oleh karena semua ditentukan oleh rakyat melalui pemilihan umum, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (*luberja*). Pemilihan tersebut dilakukan terhadap dua partai peserta yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh tempat rakyat menyatakan pilihan politik.

Rakyat menentukan Perdana Menteri, yaitu ketua Partai Konservatif atau ketua Partai Buruh dari partai pemenang pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, *jujur dan adil*. Pemenang pemilu terhadap calon dari dua partai itu menjadi anggota Majelis Rendah

(*House of Commons*). Sedangkan Majelis Tinggi (*House of Lord*) merupakan perwakilan yang terdiri dari para bangsawan dan berdasarkan turunan dan warisan.

Selanjutnya setelah hasil pemilu, Perdana Menteri menetapkan pemerintahan atau kabinet yang terdiri dari para menteri yang biasanya berasal dari Majelis Rendah. Sedangkan untuk pimpinan lembaga negara lain ditetapkan oleh Perdana Menteri secara langsung, atau atas dasar usul Perdana Menteri, kemudian ditetapkan oleh Majelis Rendah dan Majelis Tinggi.

Majelis Rendah memiliki kekuasaan yang lebih besar dari Majelis Tinggi, gabungan dari kedua majelis menjadi Parlemen atau Dewan Perwakilan yang memiliki kekuasaan membubarkan kabinet atau pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Partai yang menang pemilihan umum adalah mayoritas dalam Parlemen, partai yang kalah bertindak sebagai oposisi dan mempunyai pemerintah bayangan. Sistem parlementer Inggris selalu stabil, karena Majelis Rendah hanya terdiri dari 2 partai. Yaitu, partai mayoritas di Majelis Rendah sebagai parlemen memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan partai minoritas parlemen sebagai oposisi dan di luar pemerintahan.

Badan peradilan ditentukan oleh kabinet, jadi Mahkamah Agung dan para hakim bukan hasil pemilihan oleh rakyat. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada dewan (*council*) hasil pemilihan rakyat di masing-masing daerah.

Sebagai catatan penting, kemantapan dan kestabilan negara UK, baik dari sistem politik dan sistem ekonomi, serta kebijakan politik dan ekonomi, telah memberi hasil bagi negara UK mengalami kemajuan ekonomi yang baik dan stabil. Selain itu, dalam kaitan dengan pihak luar negeri dan dunia, UK menjadi salah satu sentral pasar finansial di dunia.

Contoh beberapa negara dengan sistem demokrasi (sumber utama: Google-Wikipedia). SD dan pola SD yang lebih kurang serupa seperti di U.S.A. dan berlaku sejak negara berdiri adalah Perancis, Filipina, Indonesia, serta negara demokrasi lainnya. Sistem Demokrasi yang lebih kurang sama seperti di UK berlaku sejak awal negara berdiri termasuk

Jepang, Malaysia, Thailand, serta negara demokrasi lainnya. Singapore juga serupa dengan UK, namun dengan kepala negara bukan raja tetapi Presiden.

### **Contoh negara-negara dengan sistem non demokrasi-komunisme dan sosialisme**

Contoh negara dengan sistem komunisme, Republik Rakyat China disingkat RRC (Sumber utama: Google-Wikipedia). RRC, juga disebut Republik Rakyat Tiongkok disingkat RRT, didirikan pada tahun 1949 setelah berakhir perang saudara Tiongkok. Sejak itu RRC atau RRT dipimpin oleh sebuah partai disebut Partai Komunis Tiongkok, tempat kedaulatan rakyat bermuara dan atas nama dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menyelenggarakan negara dan pemerintahan.

Sebelum akhir tahun 1970an, di RRC bagi seluruh rakyat tidak ada dan tidak boleh mempunyai kebebasan semua aspek kehidupan, seperti di negara dengan bentuk SD. Model tanpa ada kebebasan itu, termasuk memilih semua pimpinan dan anggota lembaga negara. Oleh karena pemberlakuan model dimaksud, semua yang ada dalam negara termasuk manusia atau rakyat dikuasai sepenuhnya oleh negara atau berarti di bawah kekuasaan partai.

Penguasaan semua dimaksud termasuk aspek politik, ekonomi, produksi, semua aspek lainnya kehidupan rakyat. Sebagai contoh, demonstrasi terutama terkait politik dilarang dan ditumpas secara tegas, seperti Peristiwa Tiananmen dan yang terakhir di Hong Kong. Yang pokok lagi, SK di RRC juga menerapkan prinsip sama rata sama rasa pada kehidupan bernegara dan kehidupan semua rakyat. Penerapan prinsip itu di China era sebelumnya, dimana semua manusia berpakaian sepatu dengan model dan bentuk yang sama, tidak ada variasi, begitu juga untuk model dan warna pakaian. Contoh negara dengan sistem politik seperti di RRC dimaksud adalah negara Korea Utara.

Di awal tahun 1980an, Deng Xiaoping pemimpin RRC dan Ketua Partai Komunis kedua setelah Mao Zedong, demi mensejahterakan rakyat RRC mengambil langkah perubahan atau reformasi sistem ekonomi

RRC. Sistem ekonomi baru menjadikan perekonomian RRC diswastakan sehingga menjadi relatif bebas sesuai aturan atau mekanisme pasar.

Kegiatan ekonomi sesuai mekanisme pasar juga berlaku untuk perusahaan negara dan aktivitas di bidang keuangan termasuk perbankan. Peranan politik oleh partai terhadap perekonomian tetap berlangsung, dengan tujuan untuk menjamin kemandirian jalan dan kemajuan perekonomian. Dengan demikian, dalam masa pimpinan Deng Xiaoping di RRC tidak diberlakukan lagi prinsip sama rata sama rasa seperti di masa sebelumnya. Tetapi rakyat menjadi penguasa negara, walaupun semua aspek di bidang politik tetap ditentukan dan dikomandoi oleh Ketua Partai Komunis RRC (PKC).

Jiang Zemin adalah pemimpin ketiga RRC, menjabat Sekretaris Jenderal Partai Komunis RRC selama tahun 1998 hingga 2002 menggantikan Zhao Ziyang, menjadi Presiden RRC dari tahun 1993 hingga 2003. Jadi ketegasan partai dan pemerintahan terhadap peristiwa Tiananmen sebagai demonstrasi menantang PKC dan pemerintahan pada tahun 1998, terjadi di bawah kekuasaan Jiang Zemin.

Langkah reformasi Deng Xiaoping diteruskan oleh Jiang Zemin, serta membuat pemerintahan dan partai mempunyai tujuan berbagai hal penting bagi negara, perekonomian dan rakyat. Tujuan dimaksud adalah modernisasi, kesejahteraan rakyat, negara sosialis demokrasi, serta meningkatkan peranan RRC di tingkat internasional dan menyelesaikan masalah Taiwan. Tujuan itu membawa perubahan signifikan pada partai. Kemudian Jiang Zemin memunculkan langkah disebut Tiga Perwakilan (*Three Represents*) untuk pembaharuan partai dan merealisasikan sosialisme RRC, persatuan, serta merangkul para pengusaha swasta.

Setelah masa Jiang Zemin muncul Hu Jintao sebagai Presiden RRT ke-6 selama tahun 2003 hingga 2013. Pada masa ini peranan partai, pembangunan ekonomi dan memajukan kesejahteraan rakyat, serta peranan RRC di tingkat internasional termasuk pelaksanaan Beijing Olympics Games, menjadi fokus. Sayangnya di periode akhir masa kepemimpinan Hu Jintao, korupsi muncul secara signifikan.

Presiden ke-7 adalah Xi Jinping yang bercirikan personalistik yang menonjol. Xi Jinping berhasil melanjutkan kemajuan ekonomi, konsolidasi partai dan penetapan penghapusan batas dua masa jabatan Presiden, sehingga Xi Jinping dapat menjabat Presiden lebih dari tahun 2023. Jadi selama masa dari Presiden ke-2 Deng Xiaoping hingga Presiden ke-7 Xi Jinping, terjadi perubahan sistem politik di RRT dari SK ke Sistem Komunisme Demokrasi Terkendali atau dapat disebut sebagai Sosialis Demokrasi. Ini ditandai dengan pasar dan perekonomian yang terus diswastakan disertai kebebasan ditingkatkan, sesuai dengan suasana liberal ekonomi pasar.

Sebagai catatan penting, di RRC sejak era kepemimpinan Deng Xiaoping di awal tahun 1980an hingga sekarang, terdapat kebebasan pasar dan perekonomian. Kondisi ini terjadi walaupun sistem politik tetap di bawah dan dikuasai oleh satu partai yaitu Partai Komunis RRT. Penyebab kondisi itu terjadi, karena ekonomi diswastakan dan suasana keterbukaan di RRC ditimbulkan. Karena kondisi itu pula, RRC selanjutnya hingga sekarang mengalami kemajuan cukup spektakuler di dalam negeri dan pada hubungan dengan luar negeri.

Contoh negara dengan sistem sosialisme, negara Rusia dan lainnya (Sumer utama: Wikipedia). Uni Soviet atau *Union of Socialist Soviet Republic* disingkat USSR berdiri dari tahun 1922 hingga 1991, sebagai negara dalam bentuk satu kesatuan politik dari sejumlah negara republik. USSR menganut sistem politik SK dengan satu partai yaitu Partai Komunis, tetapi dalam kenyataannya sebagai negara sosialis, karena menerapkan ekonomi terencana dan tidak memberlakukan prinsip sama rata sama rasa.

Uni Soviet berada di benua Eropa dan Asia, seperempat wilayah berlokasi di Eropa, bagian timur USSR berada di Asia hingga Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Afghanistan. Selama USSR berdiri terdapat 6 pemimpin, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Nikita Krushchev, Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev.

Setelah perang dunia ke II, USSR muncul sebagai pemenang perang selain U.S.A, kemudian terlibat dalam perang dingin dengan pihak U.S.A.



dan sekutunya dalam perebutan pengaruh ideologi dan politik global. Akhirnya, USSR mengalami kekalahan dalam hal ekonomi dan politik dalam dan luar negeri. Sehingga pada akhir tahun 1980an pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev mengambil Langkah restrukturisasi dengan kebijakan keterbukaan politik (*glasnost*) dan restrukturisasi ekonomi (*perestroika*). Kebijakan dimaksud sesungguhnya bertujuan memberi kebebasan pada semua aspek secara terbatas dan memajukan ekonomi.

Namun, kebijakan restrukturisasi tersebut justru menjadi pemicu perpecahan di USSR dan deklarasi kemerdekaan serta pemisahan 15 negara dari USSR pada 26 Desember 1991 menjadi negara merdeka dan berdaulat. Negara negara tersebut adalah Rusia, Georgia, Ukraina, Moldova, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizstan, Tajikistan. Tiga negara lainnya adalah Estonia, Latvia dan Lituania yang mengaku tidak pernah sebagai bagian dari USSR.

Sejak USSR berakhir, semua negara yang sebelumnya tergabung dalam USSR dengan Partai Komunis berkuasa menjadi negara sosialis demokrasi. Fenomena itu terjadi pula pada beberapa negara komunis sebelumnya, yaitu Bulgaria, Cekoslawakia, Hongaria, Jerman Timur, Polandia, Rumania.

Di Rusia sejak USSR berakhir, pemimpin negara dan partai berkuasa Rusia adalah Vladimir Putin. Sebagai catatan penting, dalam negara Rusia diberlakukan pemilihan umum, berarti dilakukan penerapan demokrasi secara berangsur untuk kebebasan rakyat. Demikian juga untuk kebebasan menyatakan pendapat secara terbuka, serta penghargaan hak azazi rakyat.

Selain itu, di Rusia juga dikembangkan kondisi dimana terdapat kebebasan pasar dan perekonomian. Jadi, semua penyesuaian dan perubahan tersebut di atas dapat saja sejalan dengan *glasnost* dan *peretroika* yang gagal pada era Mikhail Gorbachev. Namun harus diakui, penyesuaian dan perubahan dimaksud belum menghasilkan kemajuan perekonomian seperti di RRC, yang juga dialami oleh banyak negara.



## B. Sistem Ekonomi

Pemahaman tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi dipahami sebagai sistem yang menentukan sejauh mana kebebasan atau kondisi liberal bagi setiap pasar dan perekonomian di suatu negara. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, pasar terdapat di semua tiga sektor dalam perekonomian, yaitu semua pasar di sektor riil atau sektor barang dan jasa, semua pasar di sektor tenaga kerja, semua pasar di sektor finansial.

Pasar menjadi liberal atau bebas bila tidak diatur atau diganggu oleh faktor tertentu. Berarti, pasar bekerja secara liberal mencapai keseimbangan berdasarkan mekanisme pasar yang disebut *the invisible hand mechanism* pada setiap struktur pasar seperti telah diungkapkan sebelumnya. Kebebasan dalam perekonomian adalah dalam bentuk kebebasan aktivitas dan perilaku dalam perekonomian di suatu negara. Kebebasan itu termasuk pada konsumsi, produksi, investasi, pemerintah, interaksi dengan pihak negara luar.

Struktur pasar. Terdapat 4 macam struktur pasar, yaitu pertama, kompetisi maksimum atau dekat sempurna (*almost perfect competition*). Contoh, struktur pada pasar dari warung makan kecil atau dikenal dengan sebutan warteg pada tiap daerah di Jakarta, serta struktur pada pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Struktur pasar kompetisi ini mempunyai



ciri jumlah penjual dan pembeli banyak, barang yang dijual sama sejenis, halangan untuk berjualan atau mendirikan usaha hampir tidak ada, informasi pasar transparan.

Struktur pasar kedua, monopoli, mempunyai ciri satu perusahaan dan satu produk, halangan untuk mendirikan usaha sangat berat karena biaya tinggi serta teknologi dan resiko usaha tinggi, informasi terbatas. Contoh monopoli adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan minyak Pertamina.

Struktur pasar ketiga, kompetisi monopolistik (*monopolistic competition*), memiliki ciri banyak perusahaan tapi berukuran relative sedang, produk beda-beda jenis dan macam, halangan mendirikan perusahaan relatif sedikit dan kecil, informasi cukup terbatas. Contoh, perusahaan sabun, pasta gigi, restoran, binatu (*laundry*).

Struktur pasar keempat, oligopoly. Cirinya, mempunyai cukup banyak perusahaan dimana ada yang berukuran besar, sedang dan kecil sehingga beberapa perusahaan besar menjadi panutan dan patokan bagi usaha lain yang berukuran kurang besar dan berukuran kecil, halangan mendirikan perusahaan cukup berat, produk bisa sama atau beda-beda

jenis dan macam, informasi agak terbatas. Contoh OPEC singkatan dari *The Organization of the Petroleum Exporting Countries*, perbankan, perusahaan telekomunikasi, dimana di dalam pasar beberapa perusahaan besar menjadi pimpinan (*leaders*).

Penentu dan jenis sistem ekonomi. Setiap sistem ekonomi mempunyai skala kebebasan pasar dan perekonomian berbeda, dapat berskala maksimum atau kurang bahkan tidak bebas. Perbedaan skala kebebasan itu sangat ditentukan oleh sistem politik yang berlaku di suatu negara, sehingga bersenyawa dengan tingkat kebebasan rakyat.

Misalnya, pada negara dengan sistem politik dalam bentuk SD yang hampir sempurna seperti di U.S.A. dan UK, tidak saja memberikan kebebasan maksimum bagi rakyat, tetapi juga untuk pasar dan perekonomian. Kemudian, skala kebebasan pada sistem ekonomi juga dipengaruhi oleh struktur pasar. Misal seperti di U.S.A., karena hampir semua pasar mempunyai struktur pasar kompetisi, menyebabkan timbul sistem ekonomi pasar yang maksimum sebagaimana dikemukakan di bawah.

Karena kebebasan tertinggi di U.S.A dan UK, berarti kepemilikan 3 faktor produksi N, L, K serta faktor teknologi  $f$  yang ada hampir semua berada pada rakyat atau swasta. Kondisi ini menjadikan alokasi atau penggunaan 4 faktor itu dilakukan melalui pasar, tidak oleh negara dan pemerintah melalui perencanaan negara yang rumit dan kompleks. Bentuk sistem ekonomi yang tercipta dan berlaku adalah Sistem ekonomi pasar maksimum disingkat dengan SEPASM.

Sistem ekonomi non pasar maksimum pada posisi lain, bercirikan semua dikuasai dan diatur oleh negara, atas dasar ketetapan oleh satu partai penguasa negara yaitu Partai Komunis atau Partai Sosialis. Jadi, kebebasan rakyat tidak ada, sehingga tidak saja kebebasan pasar dan perekonomian tidak ada, juga kepemilikan 4 faktor dimaksud berada pada negara dan partai. Oleh karena itu, alokasi faktor produksi pasti tidak melalui pasar tetapi berdasarkan perencanaan yang rumit dan kompleks dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sistem ekonomi ini disebut Sistem ekonomi perencanaan penuh dengan singkatan SEPP.

**Tabel 1.**

Sistim Ekonomi	Sistim Demokrasi	Sistim Sosialis	Sistim Komunis
Sistim Ekonomi Pasar Maksimum - SEPASM	√		
Sistim Ekonomi Bukan Pasar Maksimum -SEBPASM	√	√	
Sistim Ekonomi Bukan Perencanaan Penuh - SEBPP		√	√
Sistim Ekonomi Perencanaan Penuh - SEPP			√

Sebagai catatan, seperti diungkapkan sebelumnya, di RRC sejak era kepemimpinan Deng Xiaoping di awal tahun 1980an hingga sekarang di bawah Xi Jinping, terdapat kebebasan pasar dan perekonomian, karena ekonomi diswastakan dan suasana keterbukaan ditimbulkan. Perubahan dan penyesuaian itu diterapkan walaupun sistem politik tetap di bawah dan dikuasai oleh satu partai yaitu Partai Komunis RRC. Perubahan dan penyesuaian kondisi itu memberi hasil dimana RRC kemudian hingga sekarang mengalami kemajuan cukup spektakuler di dalam negeri dan untuk hubungan dengan luar negeri.

Dua jenis sistem ekonomi, terdiri dari Sistem ekonomi bukan pasar maksimum disingkat dengan SEBPASM dan Sistem ekonomi bukan perencanaan penuh dengan singkatan SEBPP. SEBPASM mempunyai karakteristik lebih banyak ke SEPASM tidak ke SEPP, sedangkan SEBPP memiliki ciri lebih banyak ke arah SEPP dan tidak ke sisi SEPASM.

Adapun sistem politik dari negara dengan salah satu dari dua sistem ekonomi SEBPASM dan SEBPP dapat bervariasi, dalam bentuk SD atau SK atau SS. Jadi terdapat 4 jenis sistem ekonomi yang berlaku pada masing-masing negara di dunia dari dulu hingga kini, seperti terlihat pada Tabel 1 di atas. Pada tabel terlihat sistem ekonomi yang mengandung ciri pasar karena sistem politik dalam bentuk SD atau SD

campur SS, yaitu SEPASM dan SEBPASM. Sedangkan, sistem ekonomi yang bersandarkan pada perencanaan disebabkan oleh sistem politik dalam bentuk SK atau SK campur SS, yaitu SEPP dan SEBPP.

Alokasi faktor produksi di suatu negara. Alokasi 4 faktor terdiri dari 3 faktor produksi tambah faktor teknologi yang dimiliki oleh setiap negara di dunia merupakan masalah alokasi 4 faktor yang harus dilakukan oleh setiap negara. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesejahteraan rakyat dan keamanan serta ketahanan negara di masing-masing negara. Dalam ilmu ekonomi makro masalah itu digambarkan dengan kurva *Production possibility curve* dan *Edgeworth box*.

Gambaran itu menunjukkan bahwa negara dan pemimpinnya harus memilih dan menetapkan kombinasi jumlah produksi barang dan jasa untuk kesejahteraan di satu sisi dan di lain sisi untuk keamanan dan ketahanan. Pemilihan dan penetapan itu menjawab 3 pertanyaan dalam masalah alokasi 4 faktor di setiap negara. Pertanyaan pertama adalah jumlah dan jenis produk barang jasa apa yang akan diproduksi – *what to produce*. Semua produk dimaksud merupakan hasil dari penggunaan 4 faktor. Kedua, bagaimana produksi itu dilakukan, jadi berkaitan dengan penyediaan dan pemilihan teknologi yang akan digunakan (*how to produce*). Apakah teknologi menyesuaikan jumlah dan keterampilan tenaga kerja atau teknologi menengah ke atas yang digunakan. Ketiga, untuk siapa produk diproduksi, semua rakyat dengan perbedaan tingkat pendapatan (*for whom to produce*).

Siapa yang memilih dan menetapkan jawaban terhadap 3 pertanyaan alokasi 4 faktor akan ditentukan oleh sistem politik dan pemimpin yang berkuasa. Dengan demikian sistem ekonomi yang berlaku ditentukan oleh sistem politik. Misalnya, untuk negara yang menganut sistem politik dalam bentuk SD atau SD campur SS, maka sistem ekonomi tentu akan dalam bentuk berdasarkan pasar penuh atau sebagian, yaitu Sistem ekonomi pasar atau Sistem ekonomi bukan pasar penuh. Sedangkan untuk negara yang menganut sistem politik dalam bentuk SK atau SK campur SS, maka sistem ekonomi akan dalam bentuk berdasarkan perencanaan penuh atau sebagian, yaitu Sistem ekonomi perencanaan penuh atau Sistem ekonomi bukan perencanaan penuh.





# **BAB V**

## SUASANA POLITIK DAN EKONOMI SERTA SISTEMNYA, DI INDONESIA SEJAK KEMERDEKAAN HINGGA SEKARANG



### **A. Sejarah Suasana Politik Dan Ekonomi, Serta Sistem Politik Dan Ekonomi, Di Indonesia Dalam 5 Era Sejak Kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Hingga Sekarang**

Sejak tanggal 17 Agustus 1945, teriakan 'Merdeka!' sudah bergema dimana-mana. Setiap orang atau sekelompok orang selalu meneriakkan kata yang sama ketika berpapasan sambil mengepalkan tangan ke atas. Teriakan ini terdengar dari setiap penjuru kota, hingga ke

kampung-kampung pelosok segenap wilayah Republik Indonesia yang baru lahir ini.

Namun euphoria kemerdekaan ini belum berbanding lurus dengan kondisi politik dan ekonomi. Walau semua memperlihatkan semangat kebebasan dan kemerdekaan, sesungguhnya kondisi perekonomian tak jauh berbeda dengan masa penjajahan. Apalagi 5 tahun terakhir dijajah oleh Jepang, sehingga kehidupan rakyat dan perekonomian juga masih babak belur.

Pada tahap awal, secara politik, juga belum bisa disebut mandiri. Undang-undang serta segala peraturan perundangan baru saja dibuat, dan tentu belum bisa diterapkan sepenuhnya. Padahal sistim perekonomian sangat tergantung dari sistim politik yang akan diterapkan oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih bayi ini. Kondisi ini diperparah dengan niat Belanda yang ingin kembali menguasai bumi nusantara, yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) ini.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, dengan mencakup berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950, hingga kembali lagi memberlakukan UUD 1945, sejarah suasana politik dan ekonomi, serta sistem tentang politik dan ekonomi, di Indonesia terbagi dalam 5 era atau masa.

Era pertama adalah pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia-selama tahun 1945-1949. Masa kedua, Pemerintahan parlementer selama tahun 1949-1959. Masa ketiga, Pemerintahan demokrasi terpimpin-selama tahun 1959-1965. Era keempat, Pemerintahan orde baru-selama tahun 1965-1998. Era kelima, Pemerintahan orde reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Suasana dan sistem baik untuk politik dan ekonomi dalam setiap era akan diungkapkan pada setiap bab berikutnya.

Selama 5 era itu, terdapat suasana politik dan ekonomi yang berbeda, namun sistem politik terus berlangsung dalam bentuk sistem demokrasi dengan beberapa variasi pada setiap era. Sebagai konsekuensi, sistem demokrasi itu menjadikan sistem ekonomi di Indonesia mengacu

pada pasar atau bersifat liberal. Kondisi ini terjadi setelah berada dalam suasana ekonomi kolonial Belanda pada era awal setelah kemerdekaan hingga tahun 1950.

Kemudian, kondisi ekonomi berada dalam suasana dengan tumbuhnya peran penduduk domestik karena sudah lepas dari peranan kolonial Belanda. Selain itu, perekonomian berada dalam kondisi bersifat ekonomi tradisional dan primer dengan mengandalkan kekayaan atau sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan kualitas ala kadarnya.



## B. Undang-Undang Dasar Sejak Kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Hingga Sekarang, Khususnya Tentang UUD 1945.

Tiga Undang-undang dasar yang berlaku, serta penyimpangan terhadap UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disingkat UUD 1945 atau UUD '45 ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI, dengan ditandatangani oleh semua anggota PPKI. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat disingkat KNIP dalam sidang pada tanggal 29 Agustus 1945.

Periode pertama dari pemberlakuan UUD 1945 meliputi waktu dari 18 Agustus 1945 hingga 15 Agustus 1950. Dalam pemberlakuan pertama UUD 1945, terdapat 2 penyimpangan; Kesatu, KNIP diubah fungsinya berdasarkan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945, dari berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi badan dengan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara disingkat GBHN yang merupakan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat disingkat MPR.

Alasan perubahan fungsi KNIP ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan MPR atas dasar UUD 1945 belum terealisasi. Kenyataan tersebut disebabkan karena belum pernah dilakukan pemilihan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Keadaan ini disebabkan pula oleh kesibukan Republik Indonesia dalam perjuangan melawan dan mengusir Belanda dari bumi Indonesia.

Penyimpangan UUD 1945 kedua terjadi ketika diberlakukan sistem parlementer semasa periode pertama berlaku UUD 1945, dari 18 Agustus 1945 hingga 15 Agustus 1950. Menurut UUD 1945 Presiden adalah kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Tetapi sebagaimana dikemukakan, sejak 14 Nopember 1945 hingga 15 Agustus 1950, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara.

Penyimpangan UUD 1945 ketiga disebabkan oleh terbentuknya negara federasi berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat Konstitusi RIS, menggantikan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan berdasarkan UUD 1945. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS diberlakukan dalam periode dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.

Terbentuknya negara federasi itu adalah atas dasar keinginan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar disingkat KMB antara Belanda



dengan Indonesia, di Den Haag, Belanda, selama periode 23 Agustus hingga 2 November 1949. Tujuan Belanda adalah melemahkan integrasi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebagai kelanjutan dari kesepakatan pada KMB, Belanda juga mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Selanjutnya, sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 disingkat UUDS 1950 atau UUDS '50. Pemberlakuan UUDS 1950 dimulai dari sejak berakhirnya Konstitusi RIS, hingga UUD 1945 diberlakukan kembali melalui ketetapan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Konstitusi berupa UUDS 1950 dinamakan sementara, karena hanya bersifat sementara, menunggu terbentuknya Konstituante setara DPR hasil pemilihan umum yang akan dilakukan kemudian. Konstituante diberi amanat oleh UUDS 1950 untuk membuat dan menetapkan undang-undang dasar baru.

Jadi, masa kedua dari pemberlakuan UUD 1945 adalah sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang dengan sejumlah amandemen dalam periode dari Oktober 1999 hingga Agustus 2002. Pada masa kedua pemberlakuan UUD 1945, yaitu kembali ke UUD 1945 dari UUDS 1950, terdapat sejumlah penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan pokok adalah, pertama, Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR dan DPR serta Mahkamah Agung disingkat MA dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung disingkat DPA menjadi Menteri Negara. Kedua, MPR sementara disingkat MPRS menetapkan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup.

### **Tiga Cabang Kekuasaan Serta Sistem Politik Berdasarkan Undang-Undang Dasar.**

Berdasarkan UUD 1945 dan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, terdapat pemisahan kekuasaan di negara Indonesia dalam 3 cabang kekuasaan (*trias politica*), seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Tiga kekuasaan itu terdiri dari kekuasaan pada cabang legislatif, cabang eksekutif meliputi kekuasaan negara dan pemerintahan, kekuasaan pada cabang yudikatif. Cabang Eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, seperti ditetapkan dalam UUD 1945.

Berdiri atas 3 Undang-Undang Dasar itu, bentuk sistem politik yang berlaku adalah sistem demokrasi, dimana berdasarkan UUD 1945 adalah sistem presidensial, sedangkan atas dasar Konstitusi RIS dan UUDS 1950 berbentuk sistem parlementer. Seperti dikemukakan lebih lanjut di bawah, pada sistem presidensial, kepala negara juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sedangkan pada sistem parlementer presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri yang ditetapkan oleh parlemen atau Presiden.

Dalam sistem parlementer liberal, Perdana Menteri ditetapkan oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, serta melakukan pembentukan kabinet. Kondisi ini menyebabkan Perdana Menteri dan kabinet silih berganti dalam waktu yang singkat, berdasarkan mosi tidak percaya parlemen yang dapat berasal dari keinginan satu partai atau lebih di parlemen.

### **Tentang UUD 1945.**

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis konstitusi negara dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI. Seperti diungkapkan di atas, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI, dengan ditandatangani oleh semua anggota PPKI. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh KNIP dalam sidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lahirnya UUD 1945 sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia oleh para pejuang pendiri bangsa dan NKRI (*the founding fathers*).

Dalam UUD 1945 dimulai dengan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan, berisikan pernyataan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, serta uraian tentang Pancasila dan Pancasila sebagai dasar falsafah NKRI. Dengan demikian, Pancasila menjadi sebagai dasar pembentukan serta keberadaan negara dan pemerintahan NKRI, ketentuan dasar bagi hak dan kewajiban negara dan pemerintahan, serta seluruh rakyat Indonesia.



Berkaitan dengan pembukaan UUD 1945, sejarah mencatat bahwa pada masa sidang pertama BPUPKI dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberinama Pancasila. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat “*dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 1945, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI.

Adapun kutipan sebagian dari pembukaan UUD 1945, baik sebelum atau setelah UUD 1945 diamandemen tertulis, “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Pembuatan UUD 1945 dilakukan selama 29 Mei hingga 16 Juni 1945, dengan perumus dan penyusun rancangan adalah PPKI dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tanggal 18 Agustus 1945 UUD 1945 disahkan oleh PPKI sehingga menjadi konstitusi NKRI, bersamaan dengan penetapan Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden NKRI. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan UUD 1945, sedangkan berdasarkan konstitusi RIS dan UUDS 1950 Peresiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dikuasai oleh Perdana Menteri.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. UUD 1945 pada masa Orde Baru berlangsung dari Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. UUD 1945 pada masa Orde Baru menjadi konstitusi yang diakui cocok untuk Indonesia dan karena itu bersifat sakral, melalui sejumlah peraturan.

Pertama, Ketetapan MPR nomor I tahun 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Kedua, Ketetapan MPR nomor IV tahun 1983 yang menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR nomor IV tahun 1983.

UUD 1945 pada era reformasi mengalami 4 kali amandemen, pada kurun waktu tahun 1999-2002 rezim Presiden Adurrahman Wahid dan Ketua MPR Amien Rais. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, Perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, Perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001, Perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002.

Skema singkat UUD 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut; Sebelum mengalami perubahan atau amandemen, UUD 1945 yang asli terdiri atas pembukaan, batang tubuh mencakup 16 bab, 37 pasal, 65 ayat dimana 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah mengalami 4 kali amandemen, UUD 1945 meliputi 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan.

### **C. Pemahaman Lembaga Negara, Negara Dan Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945, Serta Bentuk Negara Indonesia Sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Hingga Sekarang.**

**Lembaga Negara.** Atas dasar UUD 1945, lembaga negara di Indonesia meliputi Presiden dan Wakil Presiden di bidang eksekutif. Di bidang legislatif terdapat lembaga negara tempat wakil rakyat hasil pilihan rakyat, terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD serta MPR yang terbentuk dari DPR dan DPD. Di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung disingkat MA yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman dan sebagai pengadilan negara tertinggi.

**Negara.** Dalam UUD 1945, negara dimaksudkan selain meliputi keberadaan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang (UU), anggaran dan pengawas eksekutif. Juga, negara mencakup keberadaan eksekutif sebagai pemerintahan yang mengusulkan UU, pimpinan dan anggota MA dan MK serta KY kepada DPR. Serta, negara meliputi keberadaan yudikatif yang mempunyai aktivitas untuk penegakan hukum.

**Pemerintahan.** Dalam UUD 1945, pemerintahan dimaksudkan meliputi Presiden dan Wakil Presiden bersama para Menteri pimpinan lembaga pemerintahan. Tercakup dalam pemerintahan juga Kejaksaan Agung yang tidak langsung dipilih oleh Presiden, tetapi diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk ditetapkan. Demikian juga halnya, pimpinan lembaga pemerintahan yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR untuk ditetapkan, yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), para Kepala Staf Angkatan, KSAD untuk darat, KSAL untuk laut, KSAU untuk udara, Kepala Kepolisian. Juga sama untuk pimpinan dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### **Bentuk Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sejak Kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Hingga Sekarang**

Kecuali karena konstitusi RIS diberlakukan, Indonesia sejak sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, pada dasarnya berbentuk negara kesatuan dan republik,

merdeka dan berdaulat, disebut NKRI. Bentuk negara Republik Indonesia ini didasarkan atas kemerdekaan yang diraih dan diberlakukan UUD 1945.

Namun, bentuk negara kesatuan Indonesia diinterupsi menjadi negara federasi, ketika konstitusi Republik Indonesia Serikat disingkat RIS diberlakukan selama 27 Desember 1949 hingga 15 atau 17 Agustus 1950. Seperti diungkapkan di atas, terbentuknya negara federasi dan berlakunya konstitusi RIS didasarkan atas pengakuan kedaulatan RIS melalui Konferensi Meja Bundar. Tujuan Belanda didasarkan atas keinginan melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan.

Bentuk negara federasi Indonesia terdiri dari sejumlah negara bagian dengan memiliki kedaulatan sendiri secara otonom. Sebagai kelanjutan dari kesepakatan pada Konferensi Meja Bundar, Belanda juga mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Selama masa dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, undang-undang dasar yang diberlakukan adalah UUDS 1950. Bentuk negara dalam masa UUDS 1950 adalah juga kesatuan, republik, merdeka dan berdaulat, sama dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang diberlakukan UUD 1945. Dengan demikian bentuk negara adalah kesatuan dan republik atau disebut NKRI, serta negara merdeka dan berdaulat.

#### **D. Sistem Politik Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Tanggal 17 Agustus 1945.**

**Sistem demokrasi.** Seperti telah diungkapkan sebelumnya, sistem demokrasi, dengan singkatan SD, dipahami dimana pimpinan dan anggota dari 3 cabang kekuasaan pada legislatif, eksekutif, serta yudikatif, dihasilkan dari pemilihan oleh rakyat. Pemilihan rakyat disebut pemilihan umum, yang bersifat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberja). Pemilihan rakyat secara langsung dilakukan baik untuk wakil rakyat di parlemen atau DPR dan DPD dimana keduanya merupakan unsur MPR, maupun untuk Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal pemilihan rakyat secara tidak langsung untuk kekuasaan



JURNALASIA

eksekutif, berarti pemilihan Kepala dan Wakil untuk kekuasaan eksekutif dipilih oleh wakil rakyat pada lembaga legislatif. Sedangkan, pemilihan rakyat secara tidak langsung untuk wakil rakyat kadang juga dilakukan tanpa pemilihan rakyat, tetapi ditunjuk oleh setiap partai dan ditetapkan oleh Presiden.

**Sistem presidensial.** Sistem presidensial berarti Presiden tidak saja menjabat kepala negara, tetapi juga sekaligus menjabat kepala pemerintahan. Kemudian Presiden yang berkuasa mempunyai hak prerogatif membentuk kabinet pemerintahan. Hak prerogatif Presiden di sejumlah negara juga berlaku untuk kekuasaan yudikatif serta lembaga tinggi negara lainnya seperti KPK dan lainnya. Hak prerogatif tersebut pada umumnya dalam bentuk usulan dari pihak eksekutif untuk disetujui pihak legislatif. Selain itu, hak prerogatif Presiden juga berlaku untuk pengajuan Rancangan Undang-Undang dan peraturan lainnya ke parlemen atau DPR, serta penetapannya. Misalnya, sistem Presidensial dimaksud berlaku di negara Amerika Serikat atau U.S.A., Perancis dan Indonesia.

**Sistem parlementer.** Dalam sistem parlementer, Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai lambang negara. Adapun kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, berdasarkan ketetapan parlemen yang terdiri dari anggota berasal dari sejumlah partai, atau sebagai alternatif berdasarkan penunjukan oleh presiden hasil pilihan rakyat. Sistem parlementer dapat mengalami ketidakstabilan, karena Perdana Menteri yang ditetapkan oleh parlemen serta pemerintahannya mengalami silih berganti dalam waktu yang relatif pendek sebelum masa tugas penuh. Contoh, suasana di Indonesia berdasarkan UUDS 1950. Suasana ini timbul karena berlaku sistem parlementer murni, dimana Perdana Menteri ditetapkan dan diganti oleh parlemen, serta dalam parlemen terdapat unsur multi partai.

Syarat untuk terjamin kestabilan sistem parlementer, apabila parlemen terdiri dari 2 partai atau kelompok partai. Syarat lainnya, yang terpilih menjadi Perdana Menteri pemegang kekuasaan pemerintahan adalah Ketua Umum dari partai atau dari partai pada kelompok partai yang mempunyai jumlah anggota parlemen lebih besar berdasarkan hasil pemilu. Sebagai contoh, sistem parlemen ini diterapkan di negara Inggris Raya (Great Britain) dan Malaysia, dimana raja pengganti Presiden sebagai kepala negara. Juga di Jerman dimana ada Perdana Menteri dan Presiden, yang semuanya ditetapkan berkuasa berdasarkan pemilihan umum oleh rakyat Jerman.

Kedua syarat tersebut di atas tidak bisa terpenuhi biasanya disebabkan karena parlemen terdiri dari lebih dari dua atau multi partai atau kelompok partai. Kondisi ini akan menyebabkan Perdana Menteri dan pemerintahannya silih berganti, yang berarti sistem parlementer tidak mengalami kestabilan. Untuk Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden, maka kestabilan sistem parlementer ditentukan oleh Presiden dan parlemen. Sebagai contoh, Indonesia pada masa tahun 1945-1949. Pada sistem parlementer, Perdana Menteri mempunyai hak prerogatif seperti Presiden pada sistem presidensial sebagaimana dikemukakan di atas.

**Sistem Demokrasi Selama Berlakunya UUD 1945 Hingga Berlakunya Konstitusi RIS.** Berdasarkan UUD 1945, sistem politik yang

dianut di NKRI adalah berbentuk SD dengan sistem presidensial dan bukan sistem parlementer, tetapi realisasinya mempunyai variasi di setiap era pemerintahan. Misalnya, dalam pemberlakuan pertama UUD 1945 selama masa 18 Agustus 1945 saat UUD 1945 disahkan hingga 27 Desember 1949 ketika Konstitusi RIS diberlakukan. Pada masa pertama itu, SD mempunyai 2 bentuk dan berarti terdapat inkonsistensi terhadap UUD 1945, yang mengamanatkan kepala negara dan kepala pemerintahan semuanya dijabat oleh Presiden. Amanat ini hanya terealisasi dalam periode pemberlakuan UUD 1945 dari 17 Agustus 1945 hingga 14 November 1945, suatu periode yang singkat.

Kenyataan itu terjadi, karena Presiden Sukarno selaku kepala pemerintahan diganti oleh Sutan Sjahrir, yang kemudian menjabat Perdana Menteri dari 14 November 1945 hingga terjadi Agresi Militer Belanda I yang dimulai pada 21 Juli 1947. Penggantian Presiden Sukarno tersebut disebabkan oleh keinginan Belanda untuk tidak melakukan pembicaraan dan negosiasi dengan Sukarno, tetapi Belanda merasa lebih cocok dengan Sutan Sjahrir. Selanjutnya, pemberlakuan SD dengan bentuk sistem parlementer berlangsung hingga mencakup masa 2 Perdana Menteri berikutnya setelah Sutan Sjahrir. Pertama, Perdana Menteri Amir Sjarifudin yang menjabat Perdana Menteri setelah terjadi Agresi Militer I hingga 4 hari setelah Perjanjian Renville pada 19 Januari 1948. Kedua, Mohammad Hatta yang menjabat Perdana Menteri atas dasar Konstitusi RIS dari 29 Januari 1948 hingga 15 Agustus 1950.

Dalam masa tiga Perdana Menteri itu berlaku sistem pemerintahan parlementer, dimana kekuasaan pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, tetapi ditunjuk oleh Presiden Sukarno dan bukan oleh parlemen atau DPR. Dasar hukum sistem parlementer ini hanya ada untuk pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta, yaitu Konstitusi RIS. Namun, untuk sistem parlementer masa Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifudin tetap berlaku UUD 1945, suatu keadaan inkonsistensi terhadap UUD 1945.

**Sistem Demokrasi Selama Berlakunya UUDS 1950.** Sistem demokrasi pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah SD liberal atau sistem parlementer liberal, dengan 7 kabinet hasil penetapan oleh



parlemen. Masa kabinet itu mulai 6 September 1950 hingga 5 Juli 1959, yaitu sejak beberapa minggu setelah Perdana Menteri Mohammad Hatta dari kabinet RIS menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno, hingga 5 Juli 1959 ketika Dekrit Presiden Sukarno ditetapkan. Masa semua kabinet itu merupakan periode berlakunya UUDS 1950, dengan amanat sangat penting diberikan UUDS 1950 agar dibuat UUD atau konstitusi baru pengganti UUDS 1950.

Dalam sistem demokrasi liberal, Perdana Menteri ditetapkan oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Aspek dari sistem parlementer liberal ini merupakan kelemahan pokok penyebab Perdana Menteri dan kabinet silih berganti dalam waktu relatif singkat sebelum masa jabatan selesai.

Situasi itu timbul karena 2 syarat seperti terungkap di atas tidak terpenuhi. Parlemen atau DPR mempunyai anggota lebih dari dua partai atau kelompok partai, jadi negara mempunyai parlemen dengan sistem multi partai. Oleh sebab itu, apabila misalnya salah satu partai mempunyai ketidakpuasan, maka parlemen dapat serta merta mengajukan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri dan pemerintahan. Akhirnya, terjadi peristiwa silih berganti dalam waktu pendek dengan Perdana Menteri dan pemerintahan baru.

Ketidakstabilan yang disebabkan oleh UUDS 1950 inilah menjadi penyebab dikeluarkan dan ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu kembali ke UUD 1945. Bersamaan dengan itu, penyebab lain adalah karena pembuatan UUD baru pengganti UUDS 1950 tidak kunjung selesai, padahal terpenuhinya hal itu merupakan amanat dari UUDS 1950.

Amanat itu telah berumur hampir 9 tahun, sejak 14 Agustus 1950 saat ditetapkannya UUDS 1950 hingga saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa 9 tahun itu termasuk ketika Pemilu tahun 1955 yang bersifat jurdil diadakan. Konstituante hasil pilihan rakyat terbentuk, kerjanya hanya dalam banyak perdebatan, permusyawaratan, serta penulisan konsep undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950, selama dua setengah tahun hingga 5 Juli 1959.

**Sistem demokrasi di Indonesia sejak UUD 1945 berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.** Pemberlakuan UUD 1945 sejak 5 Juli 1959 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga sekarang telah meliputi 7 masa atau orde dan 7 Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pertama, Orde Demokrasi Terpimpin dengan Presiden Sukarno, selama masa dari 5 Juli 1959 hingga 30 September 1965.

Kedua, Orde Baru dengan Presiden Suharto, selama masa 1 Oktober 1965 hingga 21 Mei 1998. Ketiga, Orde Transisi ke Reformasi dengan Presiden B. J. Habibie, yang berkuasa selama dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Keempat, Orde Reformasi dengan Presiden Abdurrahman Wahid selama periode dari pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, yang selanjutnya diteruskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri untuk masa dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Kelima, Orde Reformasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan 2 masa Presiden dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Keenam, Orde Reformasi dengan Presiden Joko Widodo, selama masa dari 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024.

Sistem demokrasi dalam 7 masa Presiden dan pemerintahan tersebut di atas didasarkan atas UUD 1945. Dengan demikian, sistem demokrasi di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang adalah sistem presidensial. Ini berarti Presiden negara Indonesia berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, baik dengan cara penetapan dan hasil pemilihan oleh rakyat secara tidak langsung maupun secara langsung.

## **E. Sistem Ekonomi Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Hingga Sekarang**

**Sistem Ekonomi Sejak Kemerdekaan Hingga Tahun 1959.** Perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan sangat dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda melalui kekuasaan penjajahnya. Pada awal setelah kemerdekaan Indonesia, perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh penjajahan koloni Belanda, serta demikian pula untuk masa dari tahun 1950 hingga 1959 dengan penguasaan oleh 5 perusahaan besar (*the big five*) milik Belanda.

Daya beli rakyat dalam keadaan sangat rendah dan sulit, karena rakyat berusaha hanya dari hasil bumi tanpa pengolahan. Usaha rakyat tersebut sebagian besar dalam bentuk kegiatan produksi dengan mengandalkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan barang modal dan teknologi primitif serta ala kadarnya. Karena itu, sebagian kebutuhan rakyat disediakan oleh pemerintah dengan sistem jatah dan gratis, misalnya seperti garam.

Dengan demikian, selama masa dari kemerdekaan tahun 1945 hingga 1959, sistem ekonomi Indonesia bukan sistem pasar dan juga bukan berbentuk sistem non pasar, tetapi berjalan terkendali. Pengendalian tersebut dilakukan oleh Belanda atau pemerintah Indonesia atas dukungan Belanda atau secara internasional melalui lembaga internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya.

#### **Sistem Ekonomi Sejak Tahun 1960 Hingga Tahun 1997.**

Perekonomian Indonesia sejak tahun 1960 lambat laun mulai dikuasai oleh penduduk domestik di Indonesia. Perusahaan 5 besar Belanda dan kegiatan usaha Belanda dalam bentuk lainnya kemudian diambil alih oleh negara Indonesia melalui nasionalisasi. Dalam pada itu, penduduk domestik Indonesia terus mengembangkan kegiatan usaha produksi, dagang, ekspor impor, karena Indonesia negara merdeka dan berdaulat serta bersatu. Oleh karena itu, perekonomian Indonesia sejak tahun 1960 hingga 1997 terus berkembang dengan baik dan cepat, dengan menghasilkan peningkatan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia, berkurangnya kemiskinan dan pengangguran rakyat, serta persatuan Indonesia tambah meningkat dan semakin erat.

Perkembangan ekonomi Indonesia saat itu berjalan dengan sistem ekonomi yang sebagian atas dasar perencanaan ekonomi dan sisanya berjalan dengan sistem pasar, jadi bersifat SEBPASM. Kondisi sistem ekonomi dimaksud disebabkan oleh keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk Badan Usaha Logistik (BULOG), serta sering adanya intervensi pemerintah melalui ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi pasar dan perekonomian.

Perjalanan sistem ekonomi untuk masa sejak tahun 1960 hingga tahun 1997 itu, sejalan dengan sistem politik yang dianut di Indonesia dalam bentuk SD. Sebagai konsekuensi logis SD, sistem ekonomi Indonesia menjadi memiliki kebebasan atau liberal pasar dan untuk perekonomian. Tetapi model sistem ekonomi Indonesia dimaksud, tidak sepenuhnya liberal berdasarkan mekanisme pasar. Jadi bukan sistem ekonomi model SEPASM tetapi model SEBPASM.

Adapun untuk pasar keuangan (*financial markets*) yang timbul secara intensif sejak awal tahun 1980an adalah liberal pasar sepenuhnya, sesuai SEPASM. Pasar keuangan dimaksud meliputi pasar uang Rupiah, pasar valuta asing, pasar saham, pasar surat utang jangka panjang. Sebelum tahun 1998, pasar valuta asing dengan kurs ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Sistem kurs tetap (*Fixed exchange rate system*) kemudian Sistem kurs mengambang terkendali (*Managed floating exchange rate system*). Namun sejak tahun 1998 sistem kurs yang berlaku adalah Sistem kurs bebas pasar (*Market free floating exchange rate system*). Dalam pada itu, sistem devisa atau valuta asing (*foreign exchange system*) adalah bebas, pembatasan bersifat relatif kecil (*insignificant*). Pembatasan adalah hanya untuk maksimum transaksi valas guna menghindari spekulasi, serta pengawasan transaksi devisa guna menghindari timbulnya pencucian uang (*money laundry*).

Dengan demikian, sistem finansial sebagai bagian dari Sistem ekonomi adalah liberal, sesuai dengan SEPASM. Oleh karena itu, Sistem ekonomi Indonesia terdiri dari SEBPASM untuk sektor non finansial, serta SEPASM pada sektor finansial.



## BAB VI

# SUASANA SISTEM POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 1945 - 1949



BERDIKARI ONLINE

**BARAT** bayi yang baru lahir dan kemudian belajar merangkak, tahun 1945 hingga 1949 menjadi masa-masa yang penting bagi perjalanan awal bangsa Indonesia. Secara politik, Republik yang baru merdeka ini belum sepenuhnya terlepas dari sisa-sisa pengaruh penjajahan, apalagi Belanda masih ingin menguasai kembali Indonesia melalui langkah politik dan langkah militer yang dilakukannya.



Dari sisi ekonomi, belum ada yang terasa berbeda. Semua gerakan perekonomian masih merupakan sisa-sisa penjajahan. Jauh di pelosok dan pedalaman, rakyat Indonesia masih melakukan aktivitas ekonomi secara tradisional untuk bertahan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup lainnya dengan cara pertukaran barang produksi atau jasa. Sementara perusahaan-perusahaan besar tetap dikuasi oleh Belanda.

Walau UUD 1945 sudah disahkan sehari setelah kemerdekaan, tapi belum berarti banyak, apalagi membawa perubahan. Wilayah Negara Republik Indonesia yang luas, serta keterbatasan baik dari segi infrastruktur dan sumber dana, perjalanan untuk menerapkan dan menjalankan amanah dari UUD 1945 dalam sistem politik dan ekonomi bagi Bangsa Indonesia, sungguh memakan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Perjalanan pemerintahan belum bisa stabil, salah satunya adalah karena campur tangan pemerintah Belanda yang masih berupaya untuk bisa menguasai Indonesia kembali.

Sebagai negara, mengawali tulisan pada Bab VI, terlebih dahulu dikemukakan penjelasan tentang sumber dan pengertian untuk dasar bagi tulisan sejarah yang dikemukakan pada Bab VI ini. Dasar itu adalah tulisan sejarah yang dimuat dalam Google dan Wikipedia serta Kompas.com. Tulisan dalam media publikasi itu adalah tentang Sejarah Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia selama masa tahun 1945 hingga 1949.

Tulisan sejarah pada Bab VI ini disajikan untuk melengkapi informasi dan wawasan tentang sejarah Republik Indonesia. Semua tulisan pada bagian A di bawah akan terefleksi pada bagian B dan C di bawah.

## **A. Sistem politik dan sistem ekonomi Republik Indonesia 1945 hingga 1949**

UUD 1945 tidak sempat diterapkan sepenuhnya, termasuk sistem politik selama masa tahun 1945 hingga 1949. Padahal UUD 1945 telah disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenyataan itu disebabkan karena lembaga legislatif



ID.WIKIPEDIA

terdiri dari DPR, DPD dan MPR berdasarkan UUD belum bisa terbentuk karena tidak sempat diadakan pemilihan umum oleh rakyat berdasarkan UUD 1945.

Dalam situasi itu, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi tidak sepenuhnya. Presiden Sukarno terpaksa merubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, berarti Perdana Menteri selain dapat diganti oleh Presiden, tetapi juga dapat diganti oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Keadaan inkonsistensi dari pemberlakuan UUD 1945 terjadi sejak Presiden Sukarno menunjuk Sutan Sjahrir menjabat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 14 November 1945. Pada tanggal 15 November 1945 Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengumumkan kabinet, sedangkan Presiden Sukarno hanya berfungsi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Hingga tahun 1950 sistem pemerintahan parlementer terus berlangsung, dengan Perdana Menteri berikutnya Amir Sjarifuddin dan kemudian Mohammad Hatta.

Tetapi pada tanggal 15 Agustus 1950 Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri kabinet RIS menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno. Kejadian ini memberi arti bahwa UUD 1945 yang mengamanatkan sistem pemerintahan presidensiil berlaku kembali. Oleh sebab itu negara Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari negara federasi dalam masa RIS.

Semua kejadian dan kondisi di atas pada dasarnya disebabkan oleh karena perjuangan rakyat Republik Indonesia selama masa tahun 1945 hingga 1949 dalam menghadapi Belanda yang ingin melanjutkan penjajahannya. Selain itu, situasi dimaksud juga disebabkan karena pemerintahan Republik Indonesia tidak bisa berjalan dengan stabil dan dinamis berdasarkan UUD 1945.

Jadi terdapat inkonsistensi selama tahun 1945 hingga 1949, dimana UUD 1945 tetap ada tidak diganti dengan undang-undang dasar lain, tetapi sistem demokrasi bersifat parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen dapat menjatuhkan Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian sistem politik selama masa tahun 1945 hingga 1949 adalah demokrasi parlementer, tidak sesuai dengan UUD 1945 yang tetap ada tidak diganti.

**Sistem ekonomi Republik Indonesia pada masa tahun 1945 hingga 1949.** Perekonomian pada masa tahun 1945 dikuasai oleh Belanda, dengan keberadaan perusahaan dan aturan milik pemerintah Hindia Belanda. Sistem ekonomi yang berlaku tidak dapat dikatakan atas dasar pasar atau non pasar. Yang ada hanya sistem ekonomi koloni Belanda di Republik Indonesia.

Keadaan serupa juga dihadapi oleh negara-negara lain yang terlibat dalam perang dunia kedua. Terutama negara-negara di Eropa dan Asia. Banyak negara yang harus memulai lagi perekonomian mereka mulai dari nol, karena tak banyak yang tersisa akibat perang. Di Indonesia, Agresi militer Belanda seteah kemerdekaan, juga membuat terjadinya pengungsian, sehingga sentra-sentra perekonomian tak bisa berkembang bahkan terhenti. Alat dan barang produksi sulit didapatkan, terutama untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Masyarakat hidup apa

adanya dengan mengandalkan sistim perekonomian tradisional yakni mengandalkan hasil pertanian, pedagang kecil atau bekerja sebagai buruh dengan upah padi atau beras atau bahan pangan lainnya.



## B. Sejarah timbulnya perjuangan untuk kemerdekaan dan berdirinya Republik Indonesia

**Indonesia semasa penjajahan dikenal dengan nama nusantara.** Sebelum kemerdekaan, sejarah mengungkapkan Indonesia sangat mungkin lebih sering disebut nusantara atau kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau. Di atas daratan nusantara, pemegang kekuasaan terdiri dari sejumlah kerajaan besar maupun kecil, seperti kerajaan Majapahit, Mataram, Sriwijaya, Goa Makassar. Antar kerajaan, sejarah mengungkapkan mereka tidak mempunyai hubungan dan kesatuan satu sama lain, bahkan cenderung berlangsung terjadi peperangan antar kerajaan tertentu.

Sementara itu, kekuasaan atas daerah kepulauan tertentu berada dalam penjajahan negara asing, antara lain Portugis dan Belanda. Penjajah datang ke nusantara bermula untuk perdagangan demi keuntungan mereka. Misi perdagangan penjajahan Belanda di nusantara dimulai oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* disingkat VOC pada abad ke

18. Kemudian di akhir abad ke 18 VOC dinasionalisasi oleh pemerintahan Belanda, karena VOC bangkrut. Pada tahun 1806-1915 perdagangan dan penjajahan Belanda pindah ke Inggris, tetapi kemudian Kembali ke Belanda.

**Penjajah mencampuri suasana politik, serta penolakan rakyat nusantara terhadap kehendak penjajah.** Selanjutnya, para penjajah Belanda dan Inggris mencampuri suasana politik di beberapa kerajaan khususnya di Jawa. Bahkan sejumlah anggota kerajaan atau priyayi dijadikan sebagai perantara oleh Belanda dengan rakyat di kerajaan. Rakyat dipaksa menghasilkan produk tanaman dan lainnya yang akan dibawa Belanda ke Eropa untuk dijual dengan keuntungan yang besar. Untuk itu Belanda memberlakukan tanam paksa dan kerja rodi dan kerajaan tidak dapat menghalangi kemauan penjajah Belanda. Dalam pada itu, Inggris menerapkan pajak tanah di Jawa, dengan besaran berjumlah sekitar dua perlima dari hasil kerja tahunan rakyat. Penerimaan pajak dan hasil bumi dibawa ke Inggris dan Eropa dan seterusnya dijual dengan keuntungan yang besar. Kemudian, timbul penolakan dari rakyat terhadap kehendak para penjajah, atas penerapan sistem tanam paksa dan kerja rodi, serta penguasaan nusantara dan rakyat. Kehendak penjajah itu berakibat menyengsarakan rakyat dan melemahkan kemampuan dan keberanian para kerajaan.

**Timbul Zaman Liberal dan ekspansi penjajahan Belanda serta integrasi rakyat di nusantara.** Sementara itu, di Belanda suara kelompok liberal di Belanda menonjol berkembang hingga memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda pada sekitar tahun 1870. Dengan pergolakan penolakan itu, serta diuntungkan karena kemenangan kelompok liberal, berakibat di nusantara timbul suasana baru yang dikenal sebagai Zaman Liberal di masa sekitar tahun 1870 hingga awal abad 20. Di zaman ini, sistem tanam paksa disederhanakan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Namun bagi rakyat zaman liberal tidak lebih baik dari masa sebelumnya dengan sistem tanam paksa dan pajak tanah. Rakyat dimana-mana menderita karena kelaparan, kurang pangan, penyakit, sedikit pendapatan.

Di Zaman liberal, juga Belanda melakukan ekspansi geografis penjajahan ke pulau di luar pulau Jawa. Ekspansi ini dimaksudkan selain

untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, juga dilakukan dengan alasan untuk mencegah negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris mengambil area nusantara yang belum dikuasai dan dijajah. Karena ekspansi itu, timbul peperangan rakyat di daerah tertentu nusantara dengan Belanda, salah satu yang terkenal adalah perang Aceh yang sempat berlangsung sekitar 40 tahun dari tahun 1873 hingga 1913. Ekspansi juga mengakibatkan timbul komunikasi dan integrasi antara rakyat di pulau Jawa dengan rakyat di pulau lain di nusantara.

**Timbul kebangkitan nasionalisme dan kesatuan rakyat nusantara untuk kemerdekaan dari penjajahan.** Pada awal tahun 1900an, Belanda sebagai penjajah kemudian menerapkan politik dan kebijakan bayar hutang budi terhadap pribumi nusantara. Tujuannya tidak saja untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup rakyat pribumi. Tetapi, politik balas budi ini juga dimaksudkan untuk sedikit melunakkan hati rakyat. Hasilnya, dengan politik balas budi ini, rakyat memperoleh pendidikan dan pengetahuan sehingga rakyat pribumi nusantara mulai menyadari hal-hal berkaitan dengan kebebasan, kemerdekaan dan demokrasi.

Dari segi perekonomian, hasil dari penerapan politik balas budi tersebut tidak terlalu berpengaruh untuk meningkatkan standar kehidupan rakyat nusantara. Namun, hasil yang sangat penting adalah bangkitnya kesadaran dalam bentuk nasionalisme, kesadaran nasional dan kesatuan di nusantara. Hasil ini disebabkan karena Belanda dalam masa penjajahan ini bersedia mendorong tumbuhnya intelektual dan elite rakyat serta kebebasan. Kebebasan terkait dengan menyampaikan kritik, penolakan, keberatan terhadap penjajah dan pemerintah kolonial Belanda.

**Timbul pejuang kemerdekaan dan nusantara menjadi Indonesia merdeka.** Suasana di nusantara dengan adanya politik bayar hutang Belanda tersebut di atas, memberi hasil lanjutan berupa tumbuhnya elit rakyat di nusantara, baik dari sisi pengetahuan, rasa perjuangan, keberanian, maupun kekayaan. Mereka menjadi terbuka dan berani mengorganisir pergerakan terhadap penjajahan untuk kemerdekaan nusantara menjadi Indonesia merdeka. Tidak hanya di Indonesia, bahkan



para pemuda yang memperoleh kesempatan pendidikan di Negeri Belanda juga membuat gerakan yang bertujuan melawan penjajahan. Memang pada awalnya, Belanda sebagai penjajah mengizinkan timbulnya gerakan dan organisasi politik.

Timbulnya organisasi politik dimulai pada tahun 1908, mahasiswa di Batavia nama Jakarta dulu di zaman penjajahan, mendirikan asosiasi Budi Utomo. Pendirian organisasi ini merupakan saat monumental bagi timbulnya nasionalisme dan persatuan rakyat di nusantara untuk merdeka dan tradisi pergerakan politik oleh elit di nusantara.

Kemudian pada tahun 1911, bentuk dari kebangkitan nasionalisme juga ditandai dengan didirikannya partai Sarekat Islam. Awalnya, pendirian partai untuk keperluan mendukung pengusaha pribumi terhadap dominasi pengusaha Tionghoa. Selanjutnya, partai dikembangkan untuk terus membangkitkan kesadaran nasional di bumi nusantara.

Juga, pada tahun 1912 Muhammadiyah didirikan untuk Gerakan sosial dan agama Islam masyarakat di nusantara. Gerakan komunis juga berdiri pada tahun 1914 untuk keperluan ide-ide Marxisme, kemudian perpecahan internal pada Gerakan ini menimbulkan pendirian partai komunis. Di tahun 1926, organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama (NU) didirikan, yang merupakan kelanjutan dari Pondok Pesantren Tebuireng yang telah berdiri di tahun 1899. Pada tahun 1927 sejumlah nasionalis mendirikan partai yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI) untuk melawan Belanda dikala represif.

Sumpah pemuda pada tahun 1928 juga merupakan gerakan kebangkitan dan kesadaran nasionalisme melalui kongres bagi para pemuda di nusantara. Kongres pemuda menyatakan 3 hal pokok, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu Bahasa. Dalam kongres dinyanyikan pertama kali lagu kebangsaan nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Juga dalam kongres, untuk pertama kali bendera nasional yaitu merah putih dikibarkan.

Akibat dari politik balas budi tersebut dengan memberi ruang kepada para pemuda serta kaum intelektual untuk berpolitik di nusantara, akhirnya merepotkan pemerintah Belanda sendiri. Belanda

sebagai penjajah bereaksi dengan merubah politik dan kebijakannya, dari rezim toleran karena politik bayar hutang budi menjadi rezim yang represif. Pemerintah kolonial Belanda mulai menekan semua gerakan yang dianggap subversif. Kebijakan inilah yang menyebabkan para pemimpin dan elit di nusantara ditangkap, terutama Sukarno dan Mohammad Hatta.

**Momentum untuk kemerdekaan dan berdirinya negara Indonesia merdeka.** Tindakan represif dilakukan dalam bentuk menekan organisasi nasionalis karena melakukan subversif terhadap Belanda. Tindakan represif juga dilakukan dengan cara menangkap para pemimpin organisasi nasionalis. Namun, tindakan represif ini justru semakin membangkitkan rasa nasionalisme yang telah membara pada diri para pejuang kemerdekaan dan rakyat nusantara pada umumnya. Dalam kondisi yang tertekan dan sulit, mereka terus secara intensif berjuang untuk kemerdekaan nusantara menjadi negara Indonesia merdeka.

Kemudian perjuangan para pejuang memperoleh momentum yang sangat mendukung. Keadaan ini timbul karena pada tahun 1942 Jepang berkeinginan mengambil alih penjajahan Belanda di nusantara, karena ingin memperoleh hasil dan isi bumi nusantara, terutama minyak. Jepang memberi kesan kepada para pejuang dan rakyat pribumi nusantara bertindak sebagai saudara tua terhadap saudara muda. Bahkan Jepang mempekerjakan rakyat nusantara menggantikan pejabat dan pegawai Belanda. Salah satu bagian terpenting dari kedatangan Jepang sehingga diterima oleh rakyat Indonesia adalah janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun kenyataannya, rakyat pribumi nusantara mengalami kesengsaraan karena kerja paksa (*romusha*), penyiksaan, serta kekurangan makan dan pakaian serta obat.

Hal positif, Jepang mendidik, melatih, memberi senjata kepada para pejuang dan rakyat nusantara. Yang juga sangat penting, Jepang memberi dukungan politik kepada para pejuang kemerdekaan dan terutama kepada pimpinan para pejuang. Kondisi positif itu membuat kemampuan para pejuang untuk melakukan proklamasi kemerdekaan nusantara menuju Indonesia merdeka menjadi meningkat dan dengan keyakinan sangat tinggi. Kemudian momentum untuk menyatakan proklamasi

Indonesia merdeka datang, sebagai akibat dari berakhirnya Perang Dunia ke II. Akhir perang di dunia ini disebabkan karena Sekutu Amerika Serikat dan negara Eropa Barat berhasil menaklukkan lawannya dalam Perang Dunia ke II, termasuk Jepang. Penjajahan Jepang di nusantara berakhir dan Belanda di nusantara yang sudah rusak berusaha mengembalikan jajahannya di nusantara yang disebut Hindia Belanda. Dengan situasi seperti itu, para pemimpin pejuang kemerdekaan nusantara melihat kesempatan yang tepat untuk kemerdekaan nusantara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Sukarno dan Mohammad Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan nusantara menjadi negara Indonesia merdeka.



### C. Suasana Politik Indonesia Setelah Kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Hingga Tahun 1949

**Lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia.** Sehari setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 lahir sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas. Proses pengesahan UUD 1945 ditandai dengan perdebatan pada BPUPKI dan PPKI tentang Piagam Jakarta yang akhirnya dijadikan sebagai naskah pembukaan UUD 1945.

**Penerapan UUD 1945 tidak efektif.** Sesungguhnya, hingga 27 Desember 1949 saat UUD 1945 diganti dengan konstitusi RIS, UUD

1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kondisi ini disebabkan oleh karena MPR dan DPR yang seharusnya terbentuk berdasarkan UUD 1945 tidak bisa terealisasi. Karena itu, berdasarkan maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 ditetapkan kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, serta kemudian pada tanggal 14 November dibentuk kabinet semi presidensial. Peristiwa ini tercatat sebagai perubahan pertama untuk sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sebagai penyebab keadaan dimaksud karena para pejuang dan rakyat Indonesia disibukkan harus terus berjuang untuk mengusir penjajahan Belanda.

**Belanda kembali menjajah Indonesia.** Keinginan Belanda kembali untuk menjajah Indonesia, dimulai sejak berakhirnya perang dunia ke II pada tahun 1945. Sesuai dengan perjanjian di Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan koloni Jepang kepada penjajah sebelumnya setelah menang perang dunia ke II, termasuk semua pendudukan di nusantara kepada Belanda. Pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama Belanda negara sekutu mendarat di Sabang Aceh, kemudian pada 15 September 1945 Inggris tiba di Jakarta. Kembalinya negara sekutu di nusantara diboncengi oleh NICA (*Nederland Indies Civil Administration*) yaitu pemerintah sipil Hindia Belanda atau pemerintah Belanda nusantara dengan dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook. NICA menginginkan pembentukan sebuah persemakmuran dengan anggota diantaranya Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda.

Sejak Belanda kembali datang di nusantara, terjadi 18 pertempuran selama periode 9 Desember 1945 hingga 10 Agustus 1949, antara pejuang dan rakyat nusantara yang kemudian menjadi Republik Indonesia dengan Belanda dan tentara sekutu. Termasuk pertempuran diantaranya, pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946, peristiwa 10 November 1945, Bandung lautan api tanggal 23 Maret 1946, pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan selama Desember 1946-Februari 1947, Agresi militer I pada 21 Juli-5 Agustus 1947, Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

**Sukarno diganti Sutan Sjahrir dan sebabnya.** Dr. Hubertus J. van Mook pimpinan Hindia Belanda mengumumkan tidak ingin berbicara dengan Presiden Sukarno untuk berunding antara pemerintahan Hindia Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan van Mook

tersebut memicu dan menjadi penyebab perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, walaupun UUD 1945 tetap berlaku. Perubahan ini berasal dari kejadian penggantian pucuk pimpinan perjuangan secara terpaksa, dari Presiden Sukarno kepada Sutan Sjahrir. Kemudian, Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan oleh Presiden Sukarno, sedangkan kepala negara Republik Indonesia tetap berada pada Presiden Sukarno. Pada 15 November, Sutan Sjahrir membentuk kabinet pemerintahannya.

Sutan Sjahrir dianggap oleh van Mook kepala pemerintah Hindia Belanda sebagai figur yang tepat untuk diajak berunding. Pada 4 Desember 1945 Sutan Sjahrir mengumumkan bahwa pemerintahannya menerima tawaran Belanda dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Di pihak lain, Presiden Sukarno tidak setuju dengan rencana Belanda menciptakan Indonesia sebagai negara federasi dan persemaikmuran dengan Belanda sebagaimana deklarasi pemerintah Belanda pada 10 Februari 1946 seperti dikemukakan di bawah.

Berdasarkan pernyataan pemerintah Belanda pada 10 Februari 1946, bentuk dari negara Indonesia yang direncanakan pada dasarnya berupa penggantian negara Republik Indonesia menjadi negara federasi Indonesia. Negara federal Indonesia itu terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri. Parlemen negara federasi Indonesia merupakan hasil pilihan secara demokratis dimana anggota parlemen terdiri dari mayoritas orang Indonesia, ditambah orang Belanda dan orang Indonesia yang ditunjuk oleh Belanda.

Sikap Sutan Sjahrir itu didasarkan atas diplomasi dengan anggapan bahwa persetujuan terhadap rencana Belanda itu merupakan suatu strategi untuk melenyapkan penjajahan Belanda, sekaligus nilai tawar agar Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pada perundingan delegasi Sutan Sjahrir dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe di sekitar April-Mei 1946, Sutan Sjahrir kembali menjelaskan bahwa titik tolak perundingan adalah pengakuan atas Republik Indonesia sebagai negara berdaulat, dengan dasar ini Indonesia akan mau bekerjasama dengan Belanda. Tetapi pemerintah Belanda menawarkan

suatu kompromi yaitu, setuju mengakui Republik Indonesia sebagai salah satu negara federasi yang akan dibentuk berdasarkan deklarasi 10 Februari 1946. Tambahan tawaran dari Belanda, yaitu dalam bentuk mengakui pemerintahan *de facto* Republik Indonesia atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan sekutu. Namun, Sutan Sjahrir menolak semua tawaran.

Selanjutnya, setelah Sutan Sjahrir mengirim surat rahasia kepada Van Mook pada tanggal 17 Juni 1946, timbul desas desus dan anggapan Sutan Sjahrir bersedia menerima pengakuan *de facto* Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Madura. Suasana ini berujung pada tanggal 27 Juni 1946, Sutan Sjahrir diculik di Surakarta dan ditahan, karena dianggap penghianat menjual tanah airnya sendiri.



**Pusat Pemerintahan Republik Indonesia Dipindahkan Ke Yogyakarta Dan Sutan Sjahrir Kembali Menjadi Perdana Menteri.** Di sekitar akhir tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta semakin memburuk karena terjadi pertempuran dan kekerasan antara pejuang Republik Indonesia dengan Belanda. Berhubungan dengan kondisi itu, pemerintahan beserta Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dipindah ke Yogyakarta, meninggalkan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta.



Pada tanggal 28 Juni 1946, Sukarno berpidato di radio Yogyakarta dan mengumumkan mengambil alih semua kekuasaan pemerintahan selaku Presiden Republik Indonesia. Tetapi setelah Sutan Sjahrir dibebaskan pada 3 Juli 1946, pada 2 Oktober 1946 kembali berkuasa sebagai Perdana Menteri, serta membentuk kabinet dengan situasi berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masjumi. Pada tanggal 15 November 1946 terdapat perjanjian Linggarjati dengan maksud pembentukan Republik Indonesia Serikat dan pada perjanjian terlibat Sukarno dan Sutan Sjahrir.

Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil atau aksi militer atau agresi militer pertama, yang kemudian menyebabkan Sutan Sjahrir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan selanjutnya digantikan oleh Amir Syarifudin. Pihak Republik Indonesia kewalahan, tetapi beruntung Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan unsur pokok dalam pasukan sekutu tidak menyukai aksi polisonal itu dan meminta Belanda segera menghentikan aksi militer tersebut. Aksi Militer I kemudian pada 19 Januari 1948 menyebabkan terjadi perjanjian Renville, di atas kapal perang Amerika Serikat bernama Renville. Akibat lain adalah pada tanggal 23 Januari 1948 Perdana Menteri Amir Syarifudin mengundurkan diri. Kemudian Mohammad Hatta atas penunjukkan oleh Presiden Sukarno menjadi pemimpin pemerintahan dengan kabinet bersifat presidential darurat yang berlangsung selama tahun 1948-1949. Sifat sistem pemerintahan ini disebabkan oleh karena Perdana Menteri Mohammad Hatta memberi pertanggung jawaban kepada Presiden Sukarno. Perdana Menteri Mohammad Hatta membentuk kabinet pada 28 Januari 1948.

Agresi militer ke II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan Belanda ke Yogyakarta dan penangkapan Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir serta sejumlah tokoh lainnya. Pengambil alihan kota Yogyakarta oleh Belanda, menyebabkan dibentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Reaksi terhadap agresi militer ke II, Panglima Besar Sudirman mengadakan serangan umum 1 Maret 1949. Juga, selama 7-10

Agustus 1949 dilakukan serangan umum Surakarta oleh para pejuang dan para mahasiswa serta pelajar di bawah pimpinan Slamet Riyadi.

**Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda berdasarkan Konferensi Meja Bundar.** Akibat dari Aksi Militer ke II, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga 7 Mei 1949 lahir perjanjian Roem Royen. Akhirnya melalui pertemuan Republik Indonesia dan Belanda pada Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, dihasilkan kesepakatan: Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat; Irian Barat yang kemudian disebut Papua akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Selanjutnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Jadi selama periode 1945 hingga 1949 ini, pemerintah Republik Indonesia belum bisa fokus untuk mengembangkan dan menerapkan sistem politik dan sistem perekonomian, karena masih disibukkan dengan gerakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamakan pada tanggal 17 Agustus 1945.



# **BAB VII**

## SISTEM POLITIK DAN SISTEM EKONOMI SEJARAH PEMERINTAHAN PARLEMENTER INDONESIA SELAMA MASA TAHUN 1950- 1959



### **A. Sistem Politik Dan Sistem Ekonomi Republik Indonesia Pada Masa Tahun 1950 Hingga 1959**

Setelah hampir 5 tahun merdeka, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Rakyat kembali bersorak girang. Artinya tidak ada lagi tekanan hingga agresi militer Belanda yang akan dihadapi oleh putra-putra bangsa. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan sudah dilalui dan berharap pembangunan yang sebenarnya untuk menegakkan sendi-sendi perekonomian bangsa sudah bisa mulai dilakukan.

Pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diumumkan pada 27 Desember 1949, Bangsa Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup besar. Namun rakyat Indonesia tidaklah terlalu cemas dengan hal itu. Berbekal sumber daya alam yang dimiliki, sejumlah pengusaha dan saudagar di berbagai wilayah di Indonesia mulai bangkit.

Salah satu bukti dari harapan para pelaku ekonomi ini adalah ketika beberapa saudagar besar di Padang, Propinsi Sumatera Tengah, sudah mulai melakukan aktivitas dagangannya. Bakat dagang yang memang sudah turun temurun, membuat beberapa saudagar tersebut kembali berspekulasi dengan membeli serta mendatangkan berbagai barang kebutuhan dari berbagai kota lain, termasuk mengimpor dari Singapura. Beberapa kapal dagang dari berbagai kota lain, dalam dan luar negeri, mulai sering sandar di Pelabuhan Muara dan Pelabuhan Teluk Bayur.

Beberapa diantaranya juga sudah berani melakukan ekspor hasil perkebunan, seperti Pala, Kulit Manis dan Cengkeh. Pada saat itu hanya komoditi rempah ini yang bisa menjadi andalan ekspor. Komoditas yang sangat laku di pasaran dunia. Mereka tak terpengaruh dengan gonjang-ganjing politik yang lebih banyak terjadi di pemerintahan pusat.

Hebatnya, pada Kabinet Natsir, pemerintah sudah berani mengeluarkan bantuan kredit kepada para pengusaha. Program yang resmi diluncurkan bulan April 1950 diberi nama Program Benteng. Tercetusnya Gerakan Benteng didasari atas gagasan penting untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Program Benteng tahap 1 resmi dijalankan selama 3 tahun (1950-1953) dengan 3 kabinet berbeda (Natsir, Sukiman, dan Wilopo). Selama 3 tahun, lebih dari 700-an bidang usaha bumiputera memperoleh bantuan kredit dari program ini. Akan tetapi, hal yang diharapkan dari program ini tidak sepenuhnya tercapai, bahkan banyak pula yang akhirnya membebani keuangan negara.

Pemberian kredit kepada para pengusaha bumiputera dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan perekonomian nasional. Akan tetapi, kebijakan ini ternyata tidak mampu meruntuhkan dominasi para

pengusaha asing. Tekadnya tentu saja agar para saudagar ini bisa menguasai perekonomian dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Termasuk bagi para saudagar yang beraktivitas di Padang, sebuah kota yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera.

Namun aktivitas ekonomi yang sudah mulai bertunas ini, tak tumbuh lama. Bahkan para saudagar ini pun belum sempat menurunkan ilmu dagang dan aset mereka kepada generasi penerusnya, ketika mulai timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh jatuh bangungnya kabinet berdampak pada ketidakberlanjutan program ekonomi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya operasional pertahanan dan keamanan negara. Di Padang, banyak saudagar harus menggulung tikar dan kembali memanggul senjata, bersimpati dengan gerakan PRRI yang tidak puas dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Demikian pula halnya dengan kota-kota dagang lainnya, seperti Palembang, Medan Makassar hingga Ambon. Perang saudara yang tak dapat dielakkan akhirnya membuat ekonomi yang mulai menyala, kembali redup. Walau bukan lagi menghadapi penjajahan Belanda, apapun bentuknya, perang hanya menyisakan sengsara. Penduduk, pedagang serta kaum intelektual yang sudah mulai bekerja, akhirnya hanya bisa menyuruk dalam rimba. Sebagian diantaranya juga ikut memanggul senjata. Walau akhirnya semua kembali ke pangkuan ibu pertiwi, namun kesempatan untuk berdagang dan menggerakkan perekonomian sudah banyak yang hilang percuma. Hal yang sama juga terjadi di berbagai wilayah dan kota lainnya di Indonesia. Sebuah ironi bagi negara yang masih muda.

Sistem politik dan sistem ekonomi Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 juga tidak sempat berlaku selama masa tahun 1950. Akhirnya 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit Presiden yang menetapkan kembali ke UUD 1945. Kenyataan ini terjadi karena selama



periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950 berlaku konstitusi RIS, kemudian sejak 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 disingkat UUDS 1950 hingga dekret Presiden ditetapkan pada 5 Juli 1959. Dengan diberlakukan UUDS 1950, menyebabkan sistem pemerintahan berubah lagi dari sistem parlementer ke sistem presidensiil, tetapi dialami hanya selama 2 hari dari 15 ke 17 Agustus 1950.

Dengan demikian, selama masa tahun 1950 hingga 1959 berlaku sistem pemerintahan parlementer, jadi demokrasi yang berlaku adalah demokrasi parlementer. Hal ini berarti bahwa Perdana Menteri dan kabinet ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen yang terdiri dari multi partai. Partai tersebut memiliki sistem dan kebijakan yang berbeda satu sama lainnya, dan dapat berbeda pandangan menyikapi suatu kondisi dalam proses pemerintahan. Sistem dan kondisi pemerintahan seperti itu bersifat liberal, karena parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan dilaksanakan bersama kabinet.

**Sistem ekonomi Republik Indonesia.** Diujung periode telah dibentuk Bappenas. Sebagian besar rakyat telah melakukan kegiatan usaha, dengan bantuan pemerintah melalui sistem alokasi, perusahaan Belanda dinasionalisasi menjadi *big-five*. Tetapi semua kegiatan ekonomi dan pasar pada dasarnya tidak dilakukan melalui mekanisme pasar melainkan melalui perencanaan dan pengaturan serta kebijakan pemerintah. Departemen pemerintahan hanya bekerja secara terbatas dalam hal kualitas dan kuantitas serta dana. Pajak hampir tidak ada, sehingga APBN tidak aktif. Bank sentral hanya bersifat sebagai bank sirkulasi.

## **B. Suasana Politik Republik Indonesia Pada Masa Tahun 1950 Hingga 1959**

**UUD 1945 tidak sempat berlaku selama hampir 9 tahun penuh hingga 5 Juli 1959.** UUD 1945 juga tidak sempat berlaku selama masa tahun 1950 hingga 5 Juli 1959 ketika Presiden Sukarno mengeluarkan



dekrit Presiden yang menetapkan kembali ke UUD 1945. Kenyataan ini disebabkan oleh karena selama periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950 berlaku konstitusi RIS. Kemudian sejak 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1950 disingkat UUDS 1950. Masa berlaku UUDS 1950 hampir 9 tahun penuh, hingga dekret Presiden ditetapkan pada 5 Juli 1959 untuk kembali memberlakukan ke UUD 1945. Pada 14 Agustus 1950, UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Konstitusi ini disebut sementara, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum mendatang, yang terealisasi pada tahun 1955 berdasarkan hasil pemilu 1955.

Dalam kaitan dengan kabinet RIS, pada 15 Agustus 1950 Perdana Menteri Mohammad Hatta menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno. Kejadian ini menyebabkan UUD 1945 berlaku, negara federasi di bawah pemerintahan RIS menjadi negara kesatuan. Juga, sistem pemerintahan berubah dari sistem parlementer menjadi sistem

presidensiil, tetapi seluruh keadaan berkaitan dengan pemberhentian pemerintahan RIS hanya berlangsung 3 hari dari 15 ke 17 Agustus 1950.

Kemudian, pemberlakuan UUDS 1950 menyebabkan sistem pemerintahan berubah lagi dari sistem presidensiil menjadi sistem parlementer yang bahkan mempunyai sifat sistem parlementer murni atau liberal. Kondisi sistem parlementer ini juga disertai dengan sistem multi partai, sehingga partai peserta dalam pemilihan umum cukup banyak. Dalam pemerintahan sistem parlementer, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri ditetapkan oleh parlemen, bukan oleh Presiden seperti pada masa Republik Indonesia selama tahun 1945 hingga 1949. Pada sistem parlementer ini, Presiden berkedudukan hanya sebagai kepala negara, tidak seperti sistem parlemen selama masa 1945 hingga 1949 dimana Presiden yang menetapkan Perdana Menteri. Jadi, demokrasi parlementer murni atau liberal dalam kenyataannya memunculkan ketidakstabilan pemerintahan karena Perdana Menteri dan kabinet silih berganti, berarti menimbulkan ketidakstabilan politik.

Selain itu, dalam pemerintahan sistem parlementer, kelangsungan Perdana Menteri dan kabinet biasanya memerintah dalam waktu yang tidak lama. Dalam masa 1950 hingga 1959, terdapat 7 kali atau rata-rata setiap lebih 1 tahun sekali dilakukan penetapan Perdana Menteri, sedangkan pada masa 1945 hingga 1949 terdapat 3 kali atau rata-rata kurang dari 2 tahun sekali. Keadaan ini, menyebabkan Perdana Menteri dan kabinet silih berganti, baik dalam sistem parlementer dengan Perdana Menteri ditetapkan oleh parlemen, atau ditunjuk oleh Presiden seperti keadaan pada masa tahun 1945 hingga 1949. Yang juga sangat penting, keadaan itu juga menimbulkan ketidak-stabilan pemerintahan dan suasana politik. Semua kondisi sebagai akibat dari kelemahan dari sistem parlementer.

Kelemahan pemerintahan sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950 di atas menyebabkan kondisi negara dan kemajuan sosial budaya ekonomi terhambat dan terganggu. Bersamaan dengan itu, juga UUDS 1950 memberi amanat agar dibuat undang-undang dasar atau konstitusi baru. Namun, amanat itu sudah dalam 9 tahun tidak terselesaikan,

bahkan walaupun oleh Konstituante hasil pemilu. Pemilu tahun 1955 berhasil membentuk Konstituante secara demokratis berdasarkan UUDS 1950. Namun, Konstituante gagal memenuhi amanat UUDS 1950 untuk melahirkan konstitusi baru menggantikan UUDS 1950. Oleh sebab itu, Presiden Sukarno menyampaikan konsep tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu tahun 1955, berisi ide untuk kembali ke UUD 1945. Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi pada pokoknya kembali ke UUD 1945 dan berlaku Demokrasi Terpimpin. Juga, Presiden Sukarno membubarkan konstituante hasil pemilu tahun 1955, kemudian pembentukan parlemen dilakukan dengan penunjukkan Presiden Sukarno. Juga, dalam Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno menjadi Kepala Negara, sekaligus menjadi kepala pemerintahan dengan membentuk kabinet atas dasar hak *prerogative* menunjuk anggota kabinet.

Dengan demikian, selama masa tahun 1950 hingga 1959 berlaku sistem pemerintahan parlementer, jadi demokrasi yang berlaku adalah demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer selama masa 1950 hingga 1959, Perdana Menteri ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kondisi ini berarti Perdana Menteri dan kabinet akan sangat bergantung pada partai anggota parlemen. Perdebatan dan pertentangan partai di parlemen akan melahirkan mosi tidak percaya, sehingga Perdana Menteri dan kabinet silih berganti atau mengalami jatuh bangun. Jadi, sistem dan kondisi demokrasi dan pemerintahan seperti itu bersifat liberal, karena parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan dilaksanakan bersama kabinet.

Sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950 itu diakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ada 3. Pertama, Kembali berlakunya UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Kedua, Pembubaran konstituante bentukan berdasarkan hasil pemilu tahun 1955. Ketiga, Pembentukan lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara disingkat MPRS, serta lembaga Dewan Pertimbangan Agung Sementara disingkat DPAS.

Sisi positif dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dikemukakan :

1. Perintah Presiden untuk kembali ke UUD 1945 telah memberikan undang-undang dasar sebagai pijakan hukum dan pedoman yang

mendasar dan jelas bagi kelangsungan negara dan untuk melaksanakan pemerintahan; 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan.

Secara menyeluruh dan rinci, terdapat sejumlah alasan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan. Kesatu, Kegagalan Konstituante hasil pemilu 1955 membuat UUD baru. Kedua, Situasi politik dan ketidakstabilan keamanan dalam negara semakin buruk. Ketiga, Konflik antar partai yang terus menerus terjadi mengganggu stabilitas nasional. Keempat, para politisi partai yang saling berbeda pendapat sering bersikap menghalalkan segala cara agar tujuan masing-masing partai atau kelompok partai tercapai. Kelima, UUDS 1950 dengan penerapan sistem demokrasi liberal ternyata tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Keenam, timbul sejumlah pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia yang semakin mengarah kepada gerakan separatis wilayah dari negara Indonesia.

### **C. Situasi setiap kabinet pemerintahan selama masa tahun 1950 hingga 1959**

Republik Indonesia selama masa tahun 1950 hingga 1959 berjalan dengan UUDS 1950, yang mempunyai ciri demokrasi liberal atau murni, serta multi partai. Oleh sebab itu, rezim pemerintahan silih berganti atau jatuh bangun, Perdana Menteri dan kabinet terus bergantian dalam waktu yang relatif cukup singkat. Masa jabatan yang sangat singkat dari setiap kabinet membuat program ekonomi yang dicanangkan sulit untuk mencapai hasil maksimal.

**Berikut kabinet Parlementer Indonesia dalam kurun waktu 1950 hingga 1959.** Kabinet pertama, Kabinet Natsir, dengan masa pemerintahan yang relatif cukup singkat dari 6 September 1950 – 21 Maret 1951, terdiri dari 17 Menteri dan Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Partai Masyumi (Agama Islam). Komposisi anggota kabinet 4 dari Partai Masyumi, 1 dari PSII, 1 dari Partai Kristen Indonesia, 1 dari Partai Katolik, 2 dari PIR, 2 dari Partai Sosialis Indonesia, 1 dari Partai Demokratik, 1 dari Partai Parindra, 5 dari Non Partai. Yang tidak masuk

dalam kabinet antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia.

Jatuhnya kabinet pertama karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1950 mengenai DPRD dan DPRDS. Mosi dari PNI disebabkan oleh karena peraturan dimaksud dinilai menguntungkan Partai Masyumi. Pada 21 Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno.

**Kabinet kedua**, Kabinet Sukiman-Suwiryo, dengan masa pemerintahan yang relatif cukup singkat dari 26 April 1951–3 April 1952, terdiri dari 16 Menteri dengan Perdana Menteri Sukiman dan Suwiryo, yang merupakan koalisi dari Partai Masyumi dan PNI.

Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Soebardjo dan Duta Besar AS Merle Cochran. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada ikatan *Mutual Security Act (MSA)*. DI dalam MSA, terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok Barat. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

**Kabinet ketiga**. Kabinet Wilopo (PNI) (3 April 1952 - 3 Juni 1953). Program kerja kabinet Wilopo adalah:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum  
Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia
2. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
3. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif



Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.

**Kabinet ke empat.** Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955). Kabinet yang disebut juga dengan kabinet Ali-Wongsonegoro merupakan koalisi NU dan PNI ini memiliki program kerja:

1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum
3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
5. Pelaksanaan politik bebas - aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
6. Penyelesaian pertikaian politik

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihindangi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

**Kabinet kelima.** Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 3 Maret 1956). Kabinet dari Masyumi ini mempunyai program kerja:

1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
2. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat.

Kabinet ini jatuh bukan karena keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Domissioner selama 20 hari yaitu sampai terbentuknya kabinet baru.

Prestasi dan keberhasilan kabinet ini diantaranya:

1. Mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk di dalamnya keberhasilan pengendalian harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi.
2. Berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota-anggota DPR.
3. Berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.

**Kabinet ke enam.** Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957). Kabinet yang merupakan koalisi PNI, Masyumi dan NU ini memiliki program kerja disebut rencana pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut :

1. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2. Menyelesaikan masalah Irian Barat
3. Pembentukan provinsi Irian Barat
4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

5. Pembentukan daerah - daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD
6. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai
7. Menyehatkan keseimbangan keuangan negara
8. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional

Program pokoknya adalah:

1. Pembatalan KMB
2. Pemulihan keamanan dan ketertiban
3. Melaksanakan keputusan KAA

Hasil Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II :

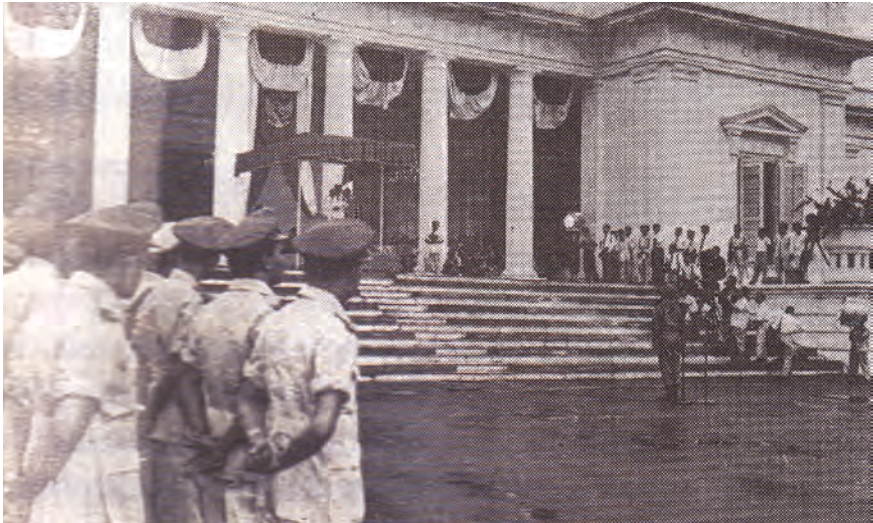
1. Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode *planning and investment*, hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.
2. Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden.
3. Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.

**Kabinet ke tujuh.** Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 5 Juli 1959)

Program kerja Kabinet Djuanda atau juga disebut Kabinet Karya memiliki 5 program yang disebut Pancakarya yaitu:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB

4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan



GPP.NKRI

### **Dekret Presiden 5 Juli 1959**

Kata dekrit, kemudian digunakan untuk menunjukkan adanya perintah dari kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengakhiri atau memutuskan sesuatu yang terkait dengan sistem pemerintahan yang berjalan. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno berisi:

1. Pembubaran Konstituante hasil Pemilu 1955;
2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950;
3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan.

Beberapa alasan mengapa Presiden Soekarno harus mengeluarkan dekrit adalah sebagai berikut.

1. Kegagalan Konstituante untuk membuat UUD baru meskipun sudah berkali-kali bersidang. Padahal, UUD sangat dibutuhkan sebagai pedoman hukum yang penting dalam melaksanakan pemerintahan.

2. Situasi politik dan ketidakstabilan keamanan dalam negara semakin memburuk.
3. Konflik antarpolisi yang terus-menerus terjadi sangat mengganggu stabilitas nasional.
4. Para politisi partai yang saling berbeda pendapat sering bersikap membenarkan segala cara agar tujuan kelompok/partai tercapai.
5. UUDS 1950 yang menerapkan Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
6. Sejumlah pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia semakin mengarah kepada gerakan separatis.

Dengan keluarnya dekrit ini, akhirnya bisa menjadi pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara melalui perintah untuk kembali ke UUD 1945; Dekrit ini sekaligus menyelamatkan negara dari disintegrasi dan krisis politik yang berkepanjangan serta memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara (MPRS dan DPAS) yang selama masa Demokrasi Liberal tertunda pembentukannya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno adalah dekrit yang mengakhiri masa parlementer.

## **BAB VIII**

# EKONOMI KERAKYATAN DALAM PANDANGAN

Dr. H. M. Azis Syamsuddin,  
S.E., S.H., M.A.F., M.H.



“Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki  
maka hendaklah dia melestarikannya”

(HR Al-Baihaqi)

### **A. Konsep Ekonomi Kerakyatan**

Konsepsi ekonomi kerakyatan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konstitusi negara Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi negara tersebut telah mengatur dengan sangat jelas konsep ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia.



**Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.**

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Lebih dari 75 tahun yang lalu, para pendiri Bangsa Indonesia sudah memikirkan bagaimana melindungi, memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia melalui kedaulatan dalam bidang ekonomi. Pasal 33 pada Undang Undang Dasar 1945 diatas, merupakan sebuah amanah bagi penyelenggara negara Republik Indonesia agar bisa mewujudkannya melalui berbagai kebijakan yang dianggap tepat. Mengelola ekonomi sesuai kemampuannya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

Dalam Pasal 33 tersebut tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan tersebut adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya mengenai: (1) Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, (2) Peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting untuk menjamin kehidupan rakyat, (3) Kekayaan bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.

Jadi, ekonomi kerakyatan merupakan bentuk dari sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Negara mendorong Koperasi dan menghimpun UMKM, menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengertiannya, merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sebuah sistem yang sudah dipikirkan sejak puluhan tahun silam, dan masih tepat untuk diterapkan hingga saat ini dan hingga ke depannya. Dari pengertian di atas, maka sektor usaha yang paling tepat adalah UMKM dan Koperasi. Disamping itu, perlu juga usaha besar dan BUMN untuk memberikan efek pertumbuhan bagi UMKM dan Koperasi yang bermitra dengannya.

Berdasarkan amanah ini, maka sistem yang paling tepat dan adil untuk diterapkan adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini merupakan suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Sedangkan ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat yang mengelola sumber daya ekonomi secara swadaya, sesuai dengan apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Sama halnya dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, ekonomi kerakyatan juga memiliki tatanan teori dan sistem yang kokoh.

Ekonomi kerakyatan memiliki cara pandang tersendiri dalam pengelolaan aset ekonomi dan pendistribusiannya. Pendistribusian aset ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara untuk menjamin pendistribusian barang dan jasa kepada warga negara secara adil. Dalam hal ini, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terkecuali. Negara dengan diskresi dan kewenangan yang dimilikinya, memberikan akses dalam membantu warga negara yang kurang beruntung dalam kepemilikan aset ekonomi, sehingga semua warga negara nantinya bisa merasakan kesejahteraan dan kemakmuran.

## **B. Dampak Ekonomi Kerakyatan dalam Perekonomian**

Secara teori, ekonomi menginginkan kesejahteraan buat seluruh lapisan rakyat. Harus diakui, pembangunan ekonomi juga

banyak menumbuhkan kalangan atas dan kalangan menengah. Namun harus disadari bahwa rakyat yang berada di kalangan bawah, kondisi kehidupannya masih berada pada taraf “masih sekedar cukup”, jumlahnya masih banyak. Kesenjangan pendapatan dan kondisi antara kalangan atas menengah dan kalangan bawah masih sangat lebar. Ekonomi kerakyatan paling tepat diterapkan untuk mengatasi jurang kesejahteraan antara yang atas dan bawah.

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, pemerintahan saat ini terus berupaya untuk bisa melaksanakan ekonomi kerakyatan. Caranya, dengan memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM dan Koperasi. Memberikan porsi yang cukup dan kesempatan yang sama bagi rakyat Indonesia dalam berusaha. Sementara setiap usaha besar milik negara seperti BUMN harus membimbing, membantu dan mendampingi setiap usaha kecil, sebagai syarat dalam melakukan aktivitas usahanya.

Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sudah menjawab bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Jadi *founding father* sudah mempersiapkan dalam bentuk konstitusi negara untuk menjalankannya, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak berpihak kepada koperasi, UMKM serta usaha-usaha rakyat yang seringkali kalah bersaing dengan usaha besar.

### **C. Kendala Ekonomi Kerakyatan Dalam Perekonomian**

Dengan adanya Ekonomi Kerakyatan, keuntungannya adalah rakyat sebagai pelaku akan langsung mendapatkan hasilnya, sehingga efek pemerataan pembangunan akan lebih cepat terasa. Hingga saat ini sistim Ekonomi Kerakyatan masih merupakan pilihan terbaik, selain perlu dukungan oleh usaha besar seperti BUMN dan swasta untuk menggapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Misalnya di bidang *hi-tech*, yang memerlukan modal besar, teknologi canggih yang harus dibiayai oleh pemodal besar atau negara.



JURNALINSPIRASI.CO.ID

Seluruh sektor ekonomi yang dilakukan oleh rakyat akan memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan usahanya, sehingga struktur ekonomi akan ditopang oleh sektor-sektor UMKM dan jenis usaha lainnya. Susunan ekonomi akan berbentuk belah ketupat, dimana sektor menengah akan membesar, sedangkan ekonomi kecil dan besar tidak terlalu dominan. Pemilikan aset ekonomi harus didistribusikan sebanyak-banyaknya kepada rakyat.

Walau Ekonomi Kerakyatan lebih menysasar kepada usaha kecil, namun kendala yang dihadapi tidaklah kecil. Beragam persoalan yang muncul untuk mengembangkan sistim ini antara lain adalah dari segi persyaratan, permodalan, dan keterampilan serta pengetahuan yang *applicable*. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara negara diharapkan dapat mengatasi, melindungi serta mengembangkan usaha kecil berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan seperti kemudahan perizinan, perpajakan, pelatihan, akses untuk menggunakan CSR serta menetapkan persyaratan UMKM dan Koperasi. Kemudian usaha-usaha kecil tersebut harus menjadi mitra serta mendapatkan porsi dalam proses kerja usaha besar (*joint venture*, *asing*) atau BUMN.

Selain itu, saat ini kepemilikan aset ekonomi oleh sebagian besar rakyat sangat kecil, sedang sebagian kecil rakyat menguasai aset ekonomi yang sangat besar, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat lebar. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada ekonomi kerakyatan, sehingga menyebabkan perekonomian nasional tidak efisien, *trickle down effect* tidak berjalan, sehingga kemiskinan dan pengangguran terjadi secara masif. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu kembali menjalankan dengan sungguh-sungguh amanah konstitusi untuk berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga harus konsisten menjalankan tiga fungsi yang dimilikinya untuk kepentingan rakyat, antara lain fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, sehingga distribusi aset ekonomi kepada sebagian besar rakyat dapat terjadi tanpa mendistorsi pasar.



#### D. Praktek Ekonomi Kerakyatan

Mungkin belum ada negara yang sepenuhnya mampu menjalankan ekonomi kerakyatan secara murni, pasti dilakukan dengan *mixed* (campuran), karena perekonomian negara di dunia saat ini sudah sangat terbuka. Beberapa negara yang mampu mendorong sektor UMKM atau



sektor rumah tangga untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasionalnya seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, adalah *role model* yang bisa dijadikan contoh, bagaimana sektor UMKM dan Rumah Tangga mampu bekerjasama dengan usaha besar dan sangat berperan dalam perekonomian nasional. Contohnya Jerman dan Jepang adalah contoh dua negara industri maju yang berhasil menerapkan sistim ekonomi kerakyatan, karena kedua negara maju ini memiliki industri besar yang ditopang oleh industri kecil sebagai *supplier manufacture*.

*“Apa rahasia kekuatan ekonomi Jerman? Ternyata bukan perusahaan-perusahaan raksasanya, melainkan perusahaan menengah dan kecil, yang disebut “Mittelstand. Perusahaan “Berliner Schrauben” (Sekrup Berlin) adalah salah satu perusahaan Mittelstand, sektor menengah-kecil Jerman yang sering disebut-sebut sebagai penopang utama perekonomian Jerman serta rahasia kestabilannya. Perusahaan-perusahaan ini dikenal giat, gesit dan pantang menyerah. Merekalah yang melahirkan inovasi-inovasi penting yang menjadi terobosan baru. 60 persen tenaga kerja di Jerman bekerja di sektor Mittelstand, yang menghasilkan lebih dari 50 persen PDB.”*

Berkaca dari kondisi Bangsa Indonesia yang memiliki akar budaya kekeluargaan yang kuat, serta contoh ekonomi kerakyatan yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju, maka sistim ini sangat cocok diterapkan di Indonesia, karena sejalan dengan amanah UUD NRI 1945, sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang penuh gotong royong dan kekeluargaan, jumlah penduduk yang besar dan tahap ekonomi saat ini yang sangat mendukung.

Indonesia sebenarnya memiliki potensi dan peluang untuk menerapkan sistim ekonomi kerakyatan secara lengkap. Tata ekonomi yang dituntut oleh konstitusi telah memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Selain itu, sektor ekonomi UMKM di Indonesia mampu menyerap 99 persen dari total tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB. Tinggal bagaimana pelaku-pelaku ekonomi UMKM & Koperasi mampu beradaptasi dan terus melakukan inovasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.



Untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah menelurkan berbagai kebijakan dan aturan-aturan turunannya. Kebijakan itu antara lain dengan terbentuknya Kementerian UMKM dan Koperasi, adanya aturan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bagi pelaku usaha besar, adanya berbagai kemudahan bagi pelaku usaha kecil, kredit bagi UMKM dan koperasi, serta adanya prioritas sektor usaha UMKM dan Koperasi yang terlarang dijamah oleh usaha besar. Berbagai kebijaksanaan ini harus terus diperkuat dan diperbaharui secara berkala oleh pemerintah dan para ahli serta praktisi UMKM dan Koperasi.

Sistem politik di Indonesia yang mengedepankan sistem Demokrasi Pancasila, selalu mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Tinggal bagaimana Pemerintah konsisten dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan amanah konstitusi terutama pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah perlu menata kembali kebijakan ekonomi yang selama ini dijalankan. Salah satunya, kebijakan impor yang besar, seringkali merugikan kepentingan industri dalam negeri, terutama sektor UMKM dan Koperasi maupun usaha besar dan BUMN yang telah berjalan.

Pemerintah sudah banyak melahirkan kebijakan yang mendukung diterapkannya ekonomi kerakyatan. Memberikan kesempatan yang besar terutama dari sisi permodalan, pelatihan, pasar kepada UMKM untuk terus berkembang. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bentuk konkret kebijakan Pemerintah kepada sektor UMKM yang notabene adalah ekonomi rakyat.

Contoh kongkrit penerapan ekonomi kerakyatan ditandai dengan usaha rakyat yang berkembang, dimana dalam kondisi Covid-19 cukup banyak melahirkan pengusaha kecil. Selain itu ada aturan mitra bagi usaha besar dan BUMN, dan aturan kredit murah bagi UMKM dan koperasi. Mendorong sektor UMKM untuk terus maju dan berkembang, memberikan fasilitas permodalan, pelatihan untuk meningkatkan skill, akses pasar. Dalam setiap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dibangun Pemerintah, menempatkan sektor UMKM sebagai salah satu sektor penting dalam mengembangkan KEK. Hal tersebut tercermin

dari kebijakan Pemerintah dalam memberikan fasilitas permodalan, insentif fiskal dalam bentuk keringanan perpajakan, serta kemudahan dalam kepemilikan aset pertanahan sehingga para petani bisa memiliki aset untuk dimanfaatkan.

Negara harus pro aktif mendukung ekonomi kerakyatan dengan memudahkan peraturan, fasilitasi permodalan, keahlian dan pastikan mereka mendapat porsi dalam proses industri besar dan BUMN dengan target persentase tertentu dan sektor-sektornya. Ekonomi Kerakyatan sangat cocok diterapkan dalam fase milenial, karena fase sekarang sektor IT berkembang pesat, dan anak muda sangat mudah berinteraksi dengan IT untuk memulai usahanya. Tentu dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini. Kalangan millennial juga terus didorong mengembangkan *start-up* untuk memperkuat ekonomi nasional kedepannya, karena potensi dan kemampuan yang dimilikinya.



PUISI NORMANTIS

## E. Tantangan Ekonomi Kerakyatan

Walau disebut sebagai Ekonomi Kerakyatan, namun para pelakunya tidak harus beraktivitas secara tradisional. Berbagai usaha kecil tersebut harus bergerak bersama zaman agar tak tertinggal dan bisa berkembang. Informasi dan teknologi banyak membantu kaum muda dan pengusaha



MATA PUISI

UMKM untuk memulai bisnisnya. Bisnis *start-up* banyak digagas oleh anak muda yang adalah pelaku langsung dari sistem Ekonomi Kerakyatan ini. Banyak lulusan Perguruan tinggi yang mampu memulai usahanya. Dalam hal ini Pemerintah harus membantu dan memfasilitasinya.

Keberhasilan *start-up* perusahaan-perusahaan *Financial Technology* (Fintech) dalam mengembangkan pembiayaan langsung kepada masyarakat (*peer to peer landing*), sangat membantu mempermudah cara bagi UMKM mendapatkan akses pendanaan. Kondisi ini perlu terus dikawal dan dibantu agar tujuan untuk mempermudah usaha masyarakat bisa terus dikembangkan.

Seperti yang sudah diterapkan di negara maju, kelak ekonomi kerakyatan di Indonesia diharapkan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi bangsa ini untuk bertahan dan maju menuju masyarakat adil dan Makmur. Indonesia akan lebih mampu mengatasi berbagai hambatan ekonomi, dibanding dengan hanya mengandalkan ekonomi canggih atau industri besar. Kemajuan teknologi informasi

yang sangat cepat diharapkan bisa menjadi salah satu faktor penunjang pelaksanaannya, khususnya untuk sektor UMKM. Fintech harus menjadi sarana yang efektif dalam mendorong UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh akses yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang ada bisa diwujudkan.

Dalam situasi pandemi Covid-19, dampak penyebarannya telah menyebabkan dua sisi ekonomi menjadi bermasalah, baik sisi *demand* dalam bentuk konsumsi atau daya beli masyarakat, maupun dari sisi *supply*. Dunia usaha, khususnya industri besar dan UMKM tidak bergerak, sehingga menyebabkan mesin ekonomi terganggu bahkan mati mendadak (*sudden death*). Harapan terbesar yang bisa membantu masyarakat adalah kebijakan belanja Pemerintah yang bisa membantu konsumsi dan daya beli masyarakat maupun mendorong dunia usaha untuk pulih kembali. Daya tahan ekonomi kerakyatan selama Pandemi diharapkan bisa segera pulih, guna menopang perekonomian nasional. Ekonomi kerakyatan bisa menjadi alternatif di tingkat regional yang tumbuh mengisi kekosongan usaha besar yang lesu. Untuk itu, pemerintah perlu terus memberikan prioritas dan dukungan, karena sektor kerakyatan akan memberikan ketahanan ekonomi bagi 40 persen masyarakat rakyat berada pada golongan terbawah. Oleh sebab itu, Kebijakan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus berhasil.



## BAB IX

# DAMPAK COVID-19 DAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA



“Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat, sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah”

(HR Ath-Thabrani)

**S** **EORANG** pedagang gorengan yang mangkal di jalan masuk sebuah kompleks perumahan di Jakarta Selatan, tampak risau berdiri disamping gerobak gorengannya. Sudah pukul 10 malam, tumpukan beberapa jenis gorengan masih menutupi setengah etalase kaca gerobak tersebut. Tak biasanya begini. Sudah hampir pertengahan malam, gorengannya masih menumpuk tinggi. Biasanya, selepas Isya, ia sudah mendorong pulang gerobaknya, karena dagangannya sudah bisa disebut ‘tandas’.





Sejak 5 bulan terakhir, sang pedagang ini tak bisa lagi berharap banyak. Bahkan selama bulan puasa lalu, penjualan lesu. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bulan Ramadhan selalu menjadi puncak tertinggi penjualan sepanjang tahun. Setiap menjelang berbuka, ia selalu kewalahan melayani pembeli. Para pengurus masjid selalu memborong gorengan dalam jumlah banyak. Pada malam libur, ia bisa berdagang hingga sahur, karena masih banyak pembeli yang mencari kudapan sambil beraktivitas dan beribadah di malam hari.

Pada bulan Ramadhan tahun 2020, ia sudah sangat bersyukur jika bisa menjual 2 sisir Pisang Kepok yang mulai digoreng selepas Ashar. Ditambah dengan Singkong Goreng, Ubi Goreng serta Bakwan. Semua dibuat dalam jumlah yang serba terbatas, karena pembelinya juga tak banyak. Senyum ramahnya kepada para pelanggan, juga tak bisa terlihat, karena semua yang beraktivitas diluar rumah diwajibkan memakai masker. Syukurlah masih ada sedikit keuntungan yang bisa dibawa pulang untuk membeli kebutuhan keluarganya.

Di sisi lain, para penghuni kompleks perumahan yang selama ini menjadi pelanggannya, sudah jarang melintas. Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah membuat jalan masuk ke perumahan ini terlihat lengang, seperti takut-takut menghampiri gerobaknya. Angkutan umum yang biasa menurunkan penumpang di gerbang perumahan ini, bisa dihitung dengan jari. Bahkan Pedagang Ketoprak yang biasa mangkal disebelahnya, tak pernah kembali lagi sejak memutuskan pulang kampung saat lebaran.

Kondisi ini memang berdampak banyak. Tidak saja bagi pedagang gorengan, tapi pedagang kecil lainnya hingga perusahaan besar juga merasakan. Ketakutan dan kecemasan akan wabah Covid-19, hanya bisa dipasrahkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Berbagai aturan, sistim serta teori perekonomian seakan tak berdaya menghadapi wabah ini. Manusia adalah korbannya. Korban penyakit akibat penyebaran virus ini dan korban dampak ekonomi akibat wabah ini.

Untuk mengatasinya, berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia melakukan revisi dalam peraturan dan perundang-undangan agar perekonomian tetap berjalan dan manusia yang menjadi penduduknya bisa bertahan hidup dan tercukupi kebutuhannya. Berikut analisa dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia menghadapi wabah ini.

### **Dampak yang Terjadi dalam Waktu Singkat :**

1. Karena harus *sosial distancing* dan *physical distancing*, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), artinya gerakan bebas penduduk dan aktivitas kehidupan terhenti dan dibatasi, tidak ada kehidupan normal.
2. Situasi itu segera menyebabkan perusahaan-perusahaan transportasi (udara, darat, laut) tidak beraktivitas. Juga demikian perusahaan-perusahaan pariwisata, mal (kecuali supermarket, apotik), serta perusahaan dan usaha jasa lainnya seperti gunting rambut, hias, usaha ojek, kuliner, rumah dan warung makan.
3. Pengangguran tanpa gaji penuh mulai terjadi, bahkan banyak juga terdapat pengangguran karena perusahaan dan usahawan tutup, dimana hanya diberi pesangon tidak penuh.



LIPUTAN6.COM

### **Akibat yang Ditimbulkan:**

1. Pendapatan masyarakat dan perusahaan menurun drastis, pengusaha dan usahawan mengalami rugi.
2. Bank-bank mulai mengalami seret arus kas (*cashflow*) masuk, juga penyaluran dana arus kas keluar seret dan tidak lancar, pendapatan turun dan bisa jadi minus. Karena debitur kredit dan pemilik surat berharga utang yang dibeli bank tidak bayar secara lancar bahkan jadi macet.
3. Penerimaan pajak mengalami penurunan, karena pendapatan masyarakat, perusahaan dan usahawan turun bahkan tidak beraktivitas.

### **Penduduk atau masyarakat, para pengusaha dan usahawan terpaksa menunggu:**

1. Kehidupan bisa berangsur-angsur pulih normal, PSBB dikecilkan skalanya secara pelan-pelan.



2. Sementara itu masyarakat serta para pengusaha dan usahawan memberikan semangat bersatu mematuhi kebijakan serta bersemangat membantu pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi dan melawan Covid-19.
3. Vaksin Covid-19 berhasil ditemukan dan dicoba, serta akhirnya berhasil digunakan. Pengobatan Covid-19 untuk status OPD (Orang Dalam Pengawasan) dan PDP (Pasien Dalam Perawatan), harus berjalan lancar efisien dan efektif di pusat dan daerah.

### **Dampak karena wabah Covid-19 berlangsung lebih dari 3 bulan**

Apabila masalah Covid-19 berlangsung lebih dari 3 bulan, perekonomian secara keseluruhan akan dapat runtuh atau hancur karena:

1. Pendapatan masyarakat, perusahaan dan usahawan akan turun secara signifikan. Banyak perusahaan akan tutup. Pengangguran akan naik signifikan. Daya beli masyarakat akan turun signifikan.

2. Akibatnya, Agregat Permintaan (*Aggregate Demand* atau AD) akan menjadi sangat lemah.  $AD = C + I + G + X - M$ ; C = konsumsi melemah karena pendapatan terus menurun, I = investasi melemah karena investasi lagi tidak menarik bagi para investor investasi fisik maupun dana karena itu harga saham dan obligasi turun jeblok, G = Belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi semakin terbatas kemampuan untuk membiayai kebutuhan dan kehidupan rakyat serta menghadapi dampak covid-19 pada perekonomian secara keseluruhan, X = ekspor tidak bisa naik karena kondisi ekonomi global karena dampak Covid-19, M = impor bisa turun karena daya beli turun. Sehingga Neraca Perdagangan dan Neraca Berjalan (*Current Account*) bisa tidak defisit.
3. Karena AD turun, kemudian berakibat produksi dan Agregat Suplai (*Aggregate Supply* atau AS atau  $Y = \text{Produk Domestik Bruto atau PDB}$ ) turun. Walau demikian, Y turun tidak diikuti inflasi dan suku bunga turun tetapi naik, karena suplai barang dan jasa menjadi terbatas, serta sebagai dampak dari kondisi dan aktivitas bank-bank pada Uang Beredar dan suku bunga.
4. Pendapatan pajak negara akan turun signifikan, tidak bisa membiayai belanja negara yang juga terus meningkat secara berarti. Sehingga APBN tidak bisa diandalkan untuk menjaga kemajuan dan stabilisasi ekonomi.
5. Suku bunga naik tidak bisa ditahan.
6. Kurs bergejolak sangat tinggi dan tidak stabil.
7. Ujung dari semua dampak bermuara pada bank-bank, tidak mempunyai kelancaran dan peningkatan arus kas dengan arus kas *netto negative*. Ini karena arus kas masuk dari pelunasan kredit dan tagihan bank seret dan bahkan macet, jadi tagihan bank macet (*non performing loans*) naik dan jadi tinggi, sehingga modal bank tergerus jadi negatif. Juga, arus kas masuk dari dana masyarakat hampir tidak ada, penarikan dana oleh masyarakat pemilik dana



di bank-bank terus terjadi. Akhirnya sejumlah bank tidak mampu bayar penarikan dan transfer dana. Situasi ini menyerupai kondisi krisis tahun 1998.

Situasi dari dampak Covid-19 tersebut di atas menyerupai krisis pada tahun 1998 dan selanjutnya, yang berawal dari kenaikan dan gejolak kurs akibat utang dalam Dollar Amerika Serikat tinggi dan hampir semua bank bermasalah karena kredit dan tagihan macet yang tinggi.

### **Bailout Terhadap Dampak Wabah Covid-19 Selama 3 Bulan Lebih**

Bailout terhadap dampak Covid-19 berlangsung lebih dari 3 bulan, dalam bentuk perlu dilakukan rekapitulasi APBN dan rekalisasi bank-bank bermasalah dan bank-bank tidak bermasalah tapi terkena masalah penarikan dana oleh masyarakat keluar dari bank-bank, serta membentuk badan negara untuk penyelesaian bank-bank yang dibailout, dengan uraian lebih lanjut berikut ini.

1. Bank Indonesia (BI) melakukan rekap APBN dan negara, dengan kredit BI kepada negara atau APBN melalui pembelian obligasi negara. Saat ini, cara tersebut sangat perlu ditempuh, karena utang ke negara-negara lain mungkin masih bisa, seperti dari U.S.A., Uni Eropa, China. Tapi bahaya kalau utang luar negeri jadi besar. Selain membayar dengan US Dollar, juga dapat berada dalam control pihak kreditur pemberi utang. Uraian lanjut sebagai berikut.
  - a. Jumlah nilai nominal obligasi minimal Rp. 500 triliun, jangka waktu 30 tahun, suku bunga 1% atau 2% agar tidak memberati APBN dengan kondisi bayar bunga di tiap akhir tahun (jadi *add on*), serta masa bebas bayar (*grace period*) utang pokok selama 10 tahun.
  - b. Penggunaan dana kredit BI tersebut, harus diawasi oleh DPR dan BPK. Mempunyai administrasi komputerisasi yang bagus dan jelas. Pemeliharaan administrasi obligasi yang diterbitkan dan diberikan ke BI harus dengan komputerisasi yang baik dan jelas.



- c. Penggunaan dana kredit BI dimaksud, sebaiknya tidak untuk membiayai infrastruktur dan bayar hutang APBN, tapi untuk restrukturisasi APBN karena harus mestrukturisasi bank-bank dan membiayai program pemerintah pada APBN untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat banya. Seperti, membiayai defisit BPJS, memajukan bidang pendidikan utamanya SD hingga semua jenis Sekolah Menengah Atas.
  - d. Pencetakan uang mulai dari sekarang, mengingat jumlah yang sangat banyak dalam kapasitas pencetakan uang Peruri dan tempat lain yang ditunjuk negara.
  - e. Pencetakan uang dimaksud harus diawasi oleh BIN dan DPR agar menjadi transparan bagi publik secara terbatas.
2. Mengatasi dampak inflasi dari kredit BI (*deficit financing*) dengan membeli obligasi pemerintah, harus melalui bank-bank karena dana itu akhirnya akan berlabuh di semua bank, serta pemerintah harus sigap, dengan uraian seperti di bawah ini.
- a. BI harus menerapkan kebijakan dan pengaturan pagu kredit (*credit ceiling*) setiap bank seperti dilakukan sebelum tahun 1983. Sebab itu, BI perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan kredit setiap bank, bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - b. Selain dengan pengendalian dana dan kredit pada bank-bank, pemerintah harus sigap untuk pengendalian harga dalam perekonomian, khususnya harga barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari bagi rakyat banyak. Yaitu melalui Bulog, Depertemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Kepolisian, BIN, terkait dengan kelancaran perdagangan dan persediaan bahan-bahan keperluan hidup.
  - c. Juga, perhatikan dan awasi dana lebih atau surplus pada APBN tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada, tentu akan sangat membantu untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

3. Pemerintah dan negara melakukan rekap bank-bank dan penyelesaian bank-bank bermasalah, dengan ungkapan selanjutnya berikut ini.
  - a. Pemerintah membentuk BPPN baru dengan menetapkan pimpinan yang kapabel dan jujur serta berdedikasi.
  - b. Penerbitan obligasi negara untuk penyertaan pemerintah pada bank-bank yang tidak ditutup, guna menopang modal bank-bank agar menjadi cukup sesuai ketentuan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk setiap bank.
4. BPPN, dengan uraian berikut ini.
  - a. Menutup bank-bank bermasalah parah agar tidak timbul resiko sistematis bagi perekonomian.
  - b. Mengelola bank-bank yang diambil alih karena tidak ditutup, dengan menunjuk pimpinan bank.
  - c. Menjual aset-aset bank yang ditutup, dengan harga minimal 7-8% berbanding 10% nilai buku, jadi maksimum rugi hanya 2% dari nilai buku, bukan seperti pada krisis 1998 di tahun 1998-2002 dengan harga 1% berbanding 10% nilai buku.
5. OJK memperkenankan bank-bank melakukan penyertaan modal selama 5 tahun terhadap debitur, sejumlah nilai buku sisa kredit atau tagihan. Ketentuan ini sekarang masih berlaku.
6. Bank-bank yang tidak ditutup atau masih diteruskan beroperasi, perlu melakukan restrukturisasi kredit dan tagihan lainnya, atau aktiva produktif, berdasarkan kualitas masih berjalan produktif (*performing loans or assets*). Ini perlu diawasi oleh OJK dan BI bila perlu.



# BAB X

## KESIMPULAN DISKUSI DUA GENERASI



MYCITY.CO.ID

**S** **EJAK** dilahirkan, manusia sudah mempunyai naluri. Setidaknya naluri untuk makan dan bertahan hidup. Setelah itu berlanjut dengan munculnya naluri untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja serta naluri untuk bisa memiliki segala sesuatu sebagai sebuah kemakmuran bagi manusia itu. Semua naluri inilah yang mendorong manusia untuk bertindak dan melakukan aktivitas. Dan semua aktivitas untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan melahirkan tindakan ekonomi.



Allah SWT Maha Mengetahui. Sang Pencipta menghadirkan semua manusia sebagai makhluk mulia, berakal dan berakhlak sebagai penghuni bumi dengan beragam perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya membuat manusia saling berinteraksi, saling membutuhkan dan saling bersilaturahmi. Untuk urusan dunia tujuannya sama; Untuk saling mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, Allah SWT juga sudah melengkapi bumi dengan seluruh isinya. Tujuannya juga sama; Untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia.

Bumi yang terus berputar sudah menghadirkan banyak peristiwa dan sejarah. Berbagai peristiwa yang terjadi antar manusia seperti perang, perebutan kekuasaan, saling rampas hingga saling bunuh juga terjadi karena hasrat manusia untuk mendapatkan sesuatu lebih dalam memenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah Allah SWT melengkapi penciptaan manusia dengan akal dan akhlak, agar manusia terhindar dari perilaku hewani dalam memenuhi kebutuhannya. Walau kadang peristiwa tersebut juga tak bisa dihindari.

Sejak zaman Nabi Adam AS, manusia sudah melakukan kegiatan ekonomi. Mulai dari mencukupi kebutuhan dengan mencari yang sudah disediakan oleh alam, kemudian mengusahakan sendiri kebutuhan tersebut dengan beternak, menanam hingga berdagang dan tukar menukar kebutuhan dengan manusia lainnya.



Ketika keahlian manusia semakin bertambah, mulai diciptakan alat-alat sederhana untuk memproduksi atau mencari berbagai barang kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah kapal yang bisa digunakan untuk mengarungi lautan untuk mencari kebutuhan dari belahan dunia lainnya. Kemudian juga membuat berbagai mesin besar untuk menciptakan berbagai barang kebutuhan, karena jumlah manusia juga semakin bertambah.

Saat manusia sudah bisa bepergian dan menjelajah ke wilayah lain, bahkan melintasi benua lain, maka semakin terbuka kesempatan bagi manusia untuk mencari kebutuhannya di tempat yang jauh tersebut, sekaligus membawa barang-barang yang tidak atau belum ada di tempat yang mereka datangi. Muncullah aktivitas ekonomi lintas wilayah yang disebut dengan perdagangan.

Selain akal dan akhlak, Allah SWT juga melengkapi manusia dengan nafsu, sebagai penguji bagi makhluk mulia yang ditempatkanNya di muka bumi ini. Nafsu inilah yang membuat manusia tidak lagi beraktivitas untuk sekedar menutupi kebutuhannya, tapi juga ingin menguasai sumber-sumber kebutuhan tersebut.

Fakta sejarah mengungkapkan berbagai peperangan, intrik politik hingga penguasaan jalur perdagangan sejak berabad lampau, didasari karena keinginan manusia yang berebut saling ingin 'menguasai' berbagai sendi kehidupan manusia lainnya. Dan berbagai cara pun dilakukan. Ujungnya; Beradu senjata!

Berbagai perang sudah terjadi sejak manusia hidup berkelompok, berkerajaan hingga bernegara. Bentuknya pun bermacam-macam. Ingin merebut kekuasaan, ingin merebut wilayah, untuk menguasai akses perdagangan hingga berbentuk penjajahan. Di Abad modern, Perang Dunia I dan Perang Dunia II merupakan kejadian terbesar yang meruntuhkan banyak sendi perekonomian dunia. Akibat perang, banyak manusia tak bisa beraktivitas untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

Namun dentuman meriam yang memekakkan telinga sejak pagi hingga petang, rentetan tembakan hingga raungan pesawat yang memuntahkan berbagai senjata untuk memusnahkan manusia, tak



sepenuhnya bisa menghentikan aktivitas ekonomi. Bagi sebagian orang, perang juga menjadi sebuah kesempatan bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya berdagang senjata, yang menjadi kebutuhan utama bagi semua pihak yang saling baku hantam ini. Kegiatan ekonomi sudah menjadi naluri yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia untuk mencukupi kebutuhan dalam kondisi apapun.

Indonesia yang dulu disebut Nusantara, sejak dahulu sudah menjadi tempat hidup dan berkehidupan bagi manusia yang ditakdirkan untuk menghuninya. Kehidupan manusia yang mendiami ribuan pulau juga dimulai dengan hidup berkelompok, berkerajaan hingga akhirnya menjadi sebuah negara yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai aktivitas manusia untuk mencukupi kehidupannya juga berlangsung di wilayah ini. Termasuk berbagai perebutan kekuasaan dan perang diantara kerajaan-kerajaan yang ada.

Kedatangan para pedagang Bangsa Eropa awalnya disambut baik. Melakukan aktivitas ekonomi dengan para pedagang yang sudah jauh-jauh datang dengan mengarungi samudra luas ini dianggap lebih menguntungkan. Namun itu tak berlangsung lama, perebutan wilayah perdagangan diantara sesama pendatang dari Eropa ini, akhirnya menyulut keinginan untuk menguasai wilayah-wilayah yang bisa mendatangkan keuntungan di Nusantara. Kekayaan alam yang dimiliki deretan pulau di khatulistiwa ini memang mengggiurkan. Hingga ada yang menyebutnya "*kepingan surga yang jatuh ke bumi*".

Kekayaan alam ini pula yang membuat ambisi dan nafsu para pendatang ingin menguasainya. Dan penduduknya pun harus menderita selama 350 tahun. Tak bisa lagi memanfaatkan dan menguasai kekayaan alamnya sendiri. Semua keuntungan dibawa para penjajah. Para saudagar pribumi dan raja-raja yang berkuasa hanya mendapatkan '*recehnya*' saja. Itupun kalau ada. Kesempatan untuk menjadi makmur dan sejahtera, pupus.

Kesadaran untuk berbangsa dan bernegara akhirnya datang dengan munculnya tokoh-tokoh intelektual serta pemuda-pemuda yang sudah muak dengan penjajahan dan ingin berdiri sendiri menjadi sebuah



bangsa dan sebuah negara yang punya jati diri. Cita-cita tersebut baru sepenuhnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. 350 tahun dikuasai bangsa asing yang datang dari negeri jauh, sungguh sebuah perjalanan sejarah yang berat dan tak singkat.

Merdeka bukan berarti semua selesai. Justru perjalanan baru dimulai, terutama untuk menyejahterakan rakyatnya. Sebagai sebuah negara, berbagai aturan dan perundangan juga dibentuk, UUD 1945 adalah salah satunya. Perlindungan serta kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk berusaha mencukupi kebutuhannya merupakan hal pokok yang juga disebutkan dalam peraturan bernegara tersebut. Namun 5 tahun pertama, rakyat Indonesia belum bisa berbuat banyak untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi secara penuh dan berkelanjutan. Bangsa ini masih disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaannya, hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan negara jajahannya ini.

Mengatur sebuah negara tentu tak terlepas dari sistem politik. Karena sistem politik yang mengatur berbagai sendi kehidupan bernegara lainnya, termasuk diantara sistem ekonomi. Sistem politik parlementer sepanjang tahun 1950 hingga 1959 salah satu penyebab perkembangan ekonomi juga tak kunjung mekar. Selain karena sistem ini tidak sesuai



SENTRA RAK

dengan amanah UUD 1945, ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya pemerintahan membuat pembangunan di bidang perekonomian hanya 'begitu-begitu saja' kalau tak disebut semakin terpuruk. Hal ini diperparah dengan berbagai pergolakan bersenjata yang terjadi di sejumlah daerah.

Pada zaman orde baru, rakyat mulai bisa bernafas lega. Kestabilan politik dan keamanan mulai terkendali, termasuk diantaranya hubungan luar negeri yang memang dibutuhkan untuk membangun perekonomian kala itu. Pemerintah mengeluarkan dan menerapkan berbagai kebijakan untuk membangun perekonomian. Para ahli ekonomi, pakar pertanian serta para ilmuwan lainnya mulai menularkan dan menerapkan ilmu serta keahlian mereka. Dan Indonesia mulai menggeliat.

Perjalanan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi tersendat ketika terjadi krisis pada tahun 1998, yang diikuti kemudian dengan terjadinya reformasi. Gonjang ganjing politik ikut berperan ketika bangsa ini kembali harus terseok mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi. Namun semangat bernegara, bertanah air dan berbangsa sesuai UUD 1945 terus menjadi pendorong bergeraknya berbagai sendi kehidupan.

Berbagai peristiwa sejarah sudah mencatat bahwa sistem ekonomi kerakyatan bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang kebal terhadap berbagai perubahan dan peristiwa. Selain sejalan dengan amanah UUD 1945, sistem ekonomi kerakyatan ini tetap bisa bertahan disaat industri besar jatuh berguguran disapu wabah covid-19. Sebuah sistem yang harus terus dijalankan, dikembangkan dan dilindungi oleh pemerintah agar rakyat Indonesia tak kehilangan akal, ketika peristiwa besar datang mendera.

Hingga buku ini selesai ditulis, wabah covid-19 masih menjadi kendala utama dalam menjalankan sistem perekonomian bernegara. Berbagai rencana, aturan yang sudah disiapkan sebelumnya, menjadi tertunda. Pemerintah terpaksa harus membuat berbagai kebijakan agar perekonomian tetap berjalan walau harus tertatih. Rakyat harus tetap bergerak dan beraktivitas untuk menutupi kebutuhannya. Apapun yang terjadi, manusia tetap harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah fitrah manusia. Saling membutuhkan dan kemudian bertemu dalam aktivitas ekonomi.



# Daftar Pustaka

- Agustine, Oly Viana. 2014. Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015. Jakarta : Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
- Bhudianto, Wahyu. 2012. Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Globalisasi Perekonomian. Surakarta : Jurnal Transformasi Vol.XIV No 22 Tahun 2012.
- Blanchard, Olivier Jean and Fischer, Stanley. 1989. Lectures on macroeconomics. Cambridge, MA: MIT Press.
- Craig, D. and Porter, D. 2006: Development beyond neoliberalism? Governance, poverty reduction and political economy. London: Routledge
- Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press
- Keynes, John Maynard. 1936. The general theory of employment, interest, and money. New York:Harcourt, Brace.
- Lipsey, Richard G. Steiner, Peter O and Purvi Douglas D, 1988. Microeconomics. Indiana: Harper & Row
- Mubyarto, dkk. 2014. Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
- Revrisond Baswir. 2009. Ekonomi Kerakyatan vs. Neoliberalisme. Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.



Sukirno, Sadono. 2002. Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Jakarta: Rajawali  
Pers.

Samuelson, Paul A. and Nordhaus William D, 1992. Economics. New York:  
McGraw-Hill

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 17 Tahun 2003

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Indonesia\\_1950\\_1959](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_1950_1959)

[https://www.dw.com/id/kekuatan-ekonomi-jerman-terutama-  
ditopang-oleh-mittelstand/a-46572137](https://www.dw.com/id/kekuatan-ekonomi-jerman-terutama-ditopang-oleh-mittelstand/a-46572137)

<https://portal-ilmu.com/sistem-ekonomi-kerakyatan/>





**“Negeri ini berlimpah dengan sumber daya alam, letaknya yang strategis dan jumlah penduduknya yang besar serta religius, merupakan modal dasar pembangunan nasional dan keunggulan untuk membangun ekonomi kerakyatan”**

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.

Perjalanan suatu bangsa merupakan perjalanan yang panjang, tidak hanya dimulai dari proklamasi pernyataan kemerdekaan bangsa tersebut, namun jauh sebelumnya. Berbagai suku bangsa yang ada di belahan dunia telah menunjukkan upaya kerasnya dalam mencukupi kehidupan dari corak ekonomi primitif, tradisional hingga modern. Kebutuhan hidup harus diperjuangkan walaupun negara/kerajaan belum terbentuk, dan karena itu kehidupan manusia terus berjalan.

Manusia secara individu memerlukan berbagai kebutuhan hidup yang dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri, namun akan memberatkan dirinya. Karena itu timbul pertukaran antara satu individu dengan individu lainnya dalam upaya untuk saling memenuhi kebutuhan di antara mereka. Dengan berjalannya waktu, bertambah jumlah individu menjadi keluarga dan masyarakat, dimana di antara mereka saling membutuhkan dan mencukupi apa yang dapat disediakan di kalangan masyarakat tersebut. Transaksi ini yang dikenal dengan nama Ekonomi Kerakyatan, telah jauh tumbuh sebelum ada kerajaan maupun negara, dan hingga sekarang masih berjalan dalam menopang kehidupan ekonomi bangsa.

Ekonomi Kerakyatan ini pada fase selanjutnya akan ditentukan oleh dinamika politik yang dianut oleh negara tersebut, baik yang berbentuk demokrasi, sosialis ataupun komunis.

Buku ini menyajikan dengan runtut pergerakan Ekonomi Kerakyatan yang banyak dipengaruhi oleh politik yang dijalankan oleh pemerintah dari berbagai fase kehidupan bernegara, gerakan ekonomi tradisional di zaman kemerdekaan, sistim parlementer hingga perekonomian dewasa ini yang ditandai dengan pandemi Covid-19.

BAGIAN PENERBITAN  
BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN  
SETJEN DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan  
Jakarta - 10270  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id



[dpr.go.id](http://dpr.go.id)